



LPPM  
UNIVERSITAS  
ATMA JAYA YOGYAKARTA

PUSKIT UAJY

Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur

PROCEEDING  
**SENANT**  **2014**  
SEMINAR NASIONAL INDONESIA TIMUR

**Sabtu, 14 Juni 2014**

Auditorium Kampus 4, Gedung Theresa UAJY  
Jalan Babarsari No.5 Yogyakarta



**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  
melalui Pendidikan di Indonesia Timur**

Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur (PUSKIT) UAJY 2014

PROCEEDING

# SENANTI 2014

Hak Cipta © 2014, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Cetakan ke-	05	04	03	02	01
Tahun	18	17	16	15	14

Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta  
Telpon (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525  
Website : [penerbit.uajy.ac.id](http://penerbit.uajy.ac.id)  
E-mail : [penerbit@mail.uajy.ac.id](mailto:penerbit@mail.uajy.ac.id)

## **DEWAN REDAKSI**

### **Prosiding Seminar Nasional Indonesia TIMUR 2014 - SENANTI**

Sekretariat: Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur (PUSKIT)

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Email : [puskit@mail.uajy.ac.id](mailto:puskit@mail.uajy.ac.id)

Website : <http://puskit.uajy.ac.id>

#### **Pelindung**

Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Dr. R. Maryatmo, M.A.

#### **Penasehat**

Ketua LPPM UAJY : Dr. Ir. Y. Djarot Purbadi, MT.

#### **Penanggung Jawab**

Kepala Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur UAJY

#### **Panitia Pelaksana/ Organizing Committee:**

Ketua : Nobertus Ribut Santoso S.S., M.A.

Sekretariat : Yonathan Dri Handarkho ST, M.Eng

Bendahara : Agatha Padma Laksitaningtyas, S.T., M.Eng

#### **REVIEWER**

Prof.Ir.Prasasto Satwiko, MBSc, Ph.D

Dina Listiorini, S.Sos, M.Si

#### **Sie Materi, Makalah & Prosiding**

J. Ade Prasetya Seputra, ST, MT.

Dina Listiorini, S.Sos, M.Si

#### **Sie Acara, Publikasi & Humas**

Olivia Lewi Pramesti, M.A.

Theresia D. Wulandari S.Fil., M.M.

Maria S.M.

Brayant Putra Tanu

## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Pertama tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat Nya kita semua bisa berkumpul dalam Seminar Nasional Indonesia Timur (SENANTI) ini dalam kondisi sehat wal afiat. Patut kita syukuri juga kita masih diberi kesempatan untuk member kontribusi pemikiran untuk pembangunan Indonesia Timur pada umumnya, dan pembangunan manusianya pada khususnya.

Keprihatinan kita melihat ketertinggalan pembangunan Indonesia Timur dalam berbagai bidang sudah lama kita rasakan, namun nampaknya ketimpangan pembangunan antara Barat dan Timur tidak juga beranjak berkurang. SENANTI ini pasti akan sangat bermakna untuk memberikan kontribusi pemikiran untuk mengembangkan Indonesia Timur. Sangat diharapkan juga bahwa hasil hasil pemikiran dari seminar ini bisa ditindak-lanjuti menjadi penelitian dan pengabdian, dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk Indonesia Timur.

Saya sangat sepekat bahwa fokus utama pembangunan Indonesia Timur adalah pendidikan. Wajib belajar 12 tahun harus dituntaskan seratus persen. Semua anak harus tamat minimal SLTA. Namun ada dua dimensi yang perlu dicermati. Yang pertama adalah soal substansi pendidikan. Yang kedua yang harus dicermati adalah hal hal lain yang perlu diperhatikan agar program wajib belajar 12 tahun tersebut bisa terlaksana.

Yang pertama adalah soal substansi pendidikan. Pendidikan harus direorientasikan agar setiap anak didik diajari kembali untuk hidup dan berkembang bersama lingkungannya. Pendidikan mestinya tidak menjauhkan anak didik dari lingkungannya. Kita harus ingat pepatah kuno yang mengatakan "*Non scholae sed vitae discimus*", yang artinya kita belajar bukan untuk sekolah, tetapi kita belajar untuk hidup. Anak didik harus diperkenalkan kembali dengan lingkungannya, agar ketika lulus mereka bisa terus hidup dan bekembang bersama lingkungannya. Jangan sampai anak didik terasingkan dan tercerabut dari lingkungannya. Karena pendidikan adalah investasi sumber-daya manusia yang sangat mendasar dan strategis untuk mendukung daya saing nasional, maka pendidikan harus menjadi program pemerintah pusat.

Yang kedua ialah harus dirancang agar wajib belajar 12 tahun bisa terlaksana seratus persen. Program wajib belajar 12 tahun harus disertai dengan program peningkatan kesehatan terutama bagi ibu dan anak. Anak anak harus mendapatkan gizi dan pertumbuhan yang cukup agar mereka memiliki kemampuan intelegensia yang memadai untuk bisa belajar untuk hidup. Banyak anak Indonesia yang karena faktor kemiskinan mengalami kekurangan gizi, sehingga pertumbuhan fisik dan intelegensianya kurang memadai.

Yang ketiga adalah program keluarga berencana. Pertumbuhan penduduk Indonesia sekarang ini sebesar 1.94% per tahun. Kemampuan nasional untuk menyediakan lapangan kerja hanya sebesar 0.77% dari total penduduk. Setiap tahun selalu terdapat 1.18% angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempunyai pertumbuhan penduduk sampai 2.07 persen. Kemampuan NTT untuk menyediakan lapangan kerja tentu lebih sedikit dibanding angka nasional, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap pasti akan lebih besar dari angka rata rata nasional. Potensi penyerapan tenaga kerja di NTT cenderung lebih rendah dari angka nasional, maka perlu ada peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun juga perlu ada pengendalian pertumbuhan penduduk di sisi lain.

Yang keempat adalah program percepatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda beda. Pengelolaan kekayaan sumber-daya yang potensial di setiap daerah harus melibatkan masyarakat setempat. Kekayaan sumber-daya lokal tersebut harus dikembangkan sebagai modal dasar berkembangnya daerah tersebut secara utuh.

Yang kelima adalah infrastruktur yang memfasilitasi agar komunikasi dan transportasi antar daerah dan antar pulau di NTT bisa berjalan lancar. Mekanisme pasar tidak akan sempurna karena ketidak-sempuranaan komunikasi dan transportasi antar daerah dan antar pulau. Segala potensi daerah akan berkembang kalau juga difasilitasi pasar hasil produksinya.

Hasil SENANTI pasti dinanti untuk sungguh mampu memberdayakan perekonomian Indonesia Timur. Dengan ketekunan, kesungguhan, dan keterlibatan pasti akan ditemukan solus- solusi yang semakin komprehensif untuk pengentasan daerah tertinggal Indonesia Timur. Marilah upaya kita terus dibarengi dengan doa. Kita percaya Tuhan pasti selalu beserta kita. Amin.

Selamat menjalankan seminar.

Yogyakarta, 14 Juni 2014

REKTOR UAJY,

Dr. R. Maryatmo, MA.

## **SAMBUTAN KETUA PANITIA SENANTI 2014**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya prosiding Seminar Nasional Indonesia Timur (SENANTI) 2014 dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan di Indonesia Timur” diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2014 di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Prosiding ini berisi sekumpulan makalah dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah dipresentasikan dan didiskusikan pada seminar ini.

Seminar Nasional Indonesia Timur (SENANTI) 2014 diselenggarakan untuk membuka wawasan guna mengembangkan kualitas pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Seminar ini juga memberikan kesempatan bagi para pemakalah yang merupakan akademisi dan praktisi untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian atau kajian kritis terhadap pendidikan di Indonesia Timur. Hasil dari diseminasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang kritis guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia Timur melalui pendidikan. Seminar ini terbagi ke dalam beberapa sub tema yaitu: meningkatkan pendidikan berbasis gender, meningkatkan pendidikan berbasis teknologi tepat guna, meningkatkan pendidikan kesadaran hukum, dan meningkatkan pendidikan kesadaran ekonomi.

Akhirnya, ijin saya atas nama panitia Seminar Nasional Indonesia Timur (SENANTI) 2014 mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, pemakalah, moderator serta berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik.

Yogyakarta, 14 Juni 2014  
Ketua Panitia,

Nobertus Ribut Santoso, S.S., M.A.

## DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI.....	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.....	iv
SAMBUTAN KETUA PANITIA SENANTI 2014 .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
MODEL PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN TEKNIK MANET PADA KAWASAN TERTINGGAL.....	1
ILMU-ILMU HUMANIORA DAN PEMBAHARUAN-PEMBAHARUAAN IDENTITAS DI PAPUA .....	10
REKAYASA PROGRAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DI INDONESIA TIMUR .....	22
PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TERHADAP PENDIDIKAN AGRIBISNIS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KUALITAS EKONOMI PETANI.....	33
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN <i>ENTREPRENEURSHIP</i> LOKAL (Usulan Model Pembangunan Masyarakat Nusa Tenggara Timur).....	39
ALTERNATIF MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK INDONESIA TIMUR .....	51
KOMPLEKSITAS KEKERASAN KEPADA ANAK PEREMPUAN KASTA ATA DI SUMBA TIMUR .....	63
PERENCANAAN PENINGKATAN INDEKS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAWASAN TIMUR INDONESIA .....	68
TANTANGAN DAN PELUANG PERBAIKAN POLA PENDIDIKAN MAHASISWA INDONESIA TIMUR .....	77
PENINGKATAN PENDIDIKAN KESADARAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DENGAN PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.....	86

# MODEL PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN TEKNIK MANET PADA KAWASAN TERTINGGAL

**S.N.M.P. Simamora**

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)  
Institut Teknologi Bandung  
E-mail : snmpsimamora@students.itb.ac.id

## ABSTRAK

Keterbatasan penyediaan infrastruktur pada kawasan tertinggal yang belum terjangkau peralatan dan perangkat teknologi umumnya seperti komputer dan jaringan internet bukanlah halangan untuk terus menggiatkan proses pembelajaran dan eksplorasi pengetahuan bagi siswa, masyarakat pendidikan bahkan mahasiswa. Teknik MANET (Mobile Adhoc Network) merupakan suatu teknik pengembangan model komunikasi ad-hoc berbasis wireless network yang dapat mengalihfungsikan sebuah terminal komputer dalam jaringan wireless agar berperan sebagai sebuah *backwarding/fowarding devices* yang umumnya dikenal sebagai *access-point*. Dalam penelitian ini telah dilakukan sejumlah implementasi pada kondisi indoor-building maupun outdoor-building bagaimana dengan teknik MANET pembelajaran dapat terus dilakukan untuk tujuan eksplorasi pengetahuan dan yang pasti dalam mencerdaskan anak bangsa dalam kondisi kekurangan ketersediaan infrastruktur yang ada. Model yang ditawarkan berupa topologi jaringan komputer dan aplikasi serta layanan yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan bagi dukungan proses belajar-mengajar di sekolah, kampus, dan home-schooling, bahkan dapat dimanfaatkan untuk jaringan komunikasi internal dalam perkantoran atau lembaga/instansi sejenis.

**Kata kunci:** MANET, jaringan intranet, *backwarding/fowarding devices*, teknologi informasi

## 1. PENDAHULUAN

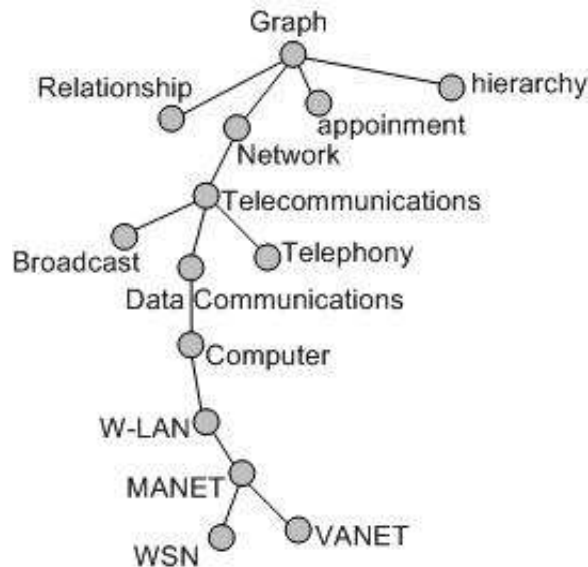
Infrastruktur merupakan hal kunci yang perlu diperhatikan dalam membangun kawasan penduduk yang modern, mutakhir, dan berwawasan maju. Oleh sebab itu menjadi hal yang tidak mustahil apabila sebuah kawasan digolongkan masih tertinggal apabila pembangun infrastruktur di kawasan tersebut lambat bahkan 'jalan di tempat'. Demikian juga pendidikan sebagai pedoman dasar dalam pengetahuan dan pengembangan suatu teknologi mutlak juga diperhatikan untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang saat ini ada atau sedang dilakukan.

Terlebih dalam pembelajaran yang melibatkan komponen komputer untuk bidang Teknologi Informasi, adalah sebuah hal yang tidak dapat dengan mudah dikesampingkan. Infrastruktur jaringan listrik, elemen *software*, *hardware*, dan *brainware* merupakan komponen-komponen vital dan sebagai kunci dalam kesuksesan (*sucessfull key factor*) pembelajaran berbasis Teknologi Informasi. Dan sudah semestinya kalangan masyarakat, khususnya sivitas akademika, serta pemerintah terkait bahkan pengusaha atau *enterpreuner* dapat dengan bijak memposisikan keterkaitan erat pembangun kawasan tertinggal dengan produktivitas yang diraih masing-masing entitas. Pembangunan suatu bangsa haruslah tercermin dari pemerataan hasil kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh komponen bangsa.

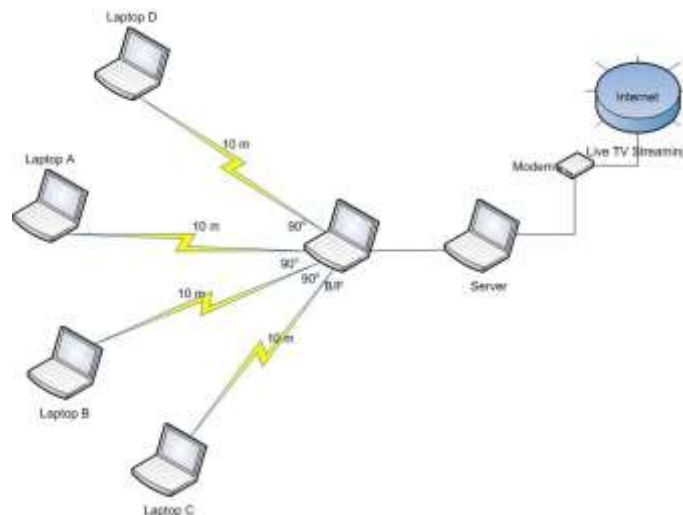
Dalam keterkaitan Teknologi Informasi sebagai bidang yang senantiasa mengalami perkembangan pesat [1][2], adalah dapat dipastikan sangat membantu dalam penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan, bahkan komunikasi antar setiap daerah yang masing minim akan transportasi baik kendaraan maupun jalan yang menghubungkan setiap daerah tersebut.

Dalam bidang jaringan *wireless*, berdasar [3] seperti ditunjukkan pada gambar 1 bahwa *Mobile Ad-hoc Network* (MANET) merupakan solusi teknologi penyedia infrastruktur jaringan pada kondisi bencana, minim fasilitas telekomunikasi, dan kebutuhan yang mendesak [4]. Teknologi MANET memungkinkan setiap *node* dalam jaringan dapat berperan sebagai *backwarding/fowarding devices*; dimana hal ini umumnya diistilahkan sebagai *cell-station*, yakni *access-point*.





Gambar 1. Klasifikasi jaringan untuk taksonomi MANET



Gambar 2. Jaringan MANET secara sederhana [5]

Solusi pembelajaran Teknologi Informasi efektif dilakukan dengan model diskusi dan praktek, sehingga memang sangat membutuhkan penyediaan infrastruktur jaringan yang lengkap, seperti: media-transmisi (yakni *cable*), *node* (yakni komputer/laptop), dan *backwarding/fowarding devices* (yakni: *hub*, *switch*, atau *access-point*); serta untuk koneksi ke jaringan *internet* dibutuhkan modem nirkabel. Oleh sebab itu MANET merupakan solusi efektif dalam penyediaan infrastruktur yang optimum untuk dukungan dalam pembelajaran Teknologi Informasi. Teknik MANET mengkondisikan bahwa setiap *node-node* yang terhubung dalam jaringan *wireless* dapat berperan sebagai fungsi sentral, yakni *switching*, dan *routing* sehingga elemen *backwarding/fowarding* terpenuhi. Di samping itu peranan *cable* digantikan oleh koneksi gelombang radio (yakni *wireless coonnection*) dan komputer di sisi *client* pada jaringan sendiri yang telah memainkan peranan sebagai *workstation*, *server*, dan *cell-station*.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Jaringan Wireless

Salah satu jaringan komputer yang tergolong dalam media-transmisi yang digunakan untuk koneksi adalah *wireless network*. Kelebihan jaringan ini adalah minimasi *cost* dalam infrastruktur fisik *cable* oleh sebab digantikan oleh *radio-wave*. Jaringan *wireless* dapat didefinisikan sebagai sejumlah *node* komputer yang dikoneksikan menggunakan gelombang radio sebagai media-transmisinya dan umumnya skalabilitas yang dimiliki secara lokal (*private network*). Topologi jaringan yang umum digunakan adalah *star*, *mesh*, *bus*, *ring*, *loop*, dan *tree*. Sedangkan teknologi jaringan *wireless* yang digunakan adalah mengacu pada standarisasi IEEE 802.11, yakni mengatur perihal koneksi *wireless access fixed network* yang disebut WiFi (*Wireless Fidelity*) [6][7]. Untuk menghubungkan setiap terminal-terminal komputer *client* dalam jaringan maka digunakan *backwarding/fowarding devices*; untuk koneksi menggunakan *cable*, perangkat yang umum digunakan adalah: *switch* dan *hub*. Sedangkan untuk koneksi menggunakan *wireless*, digunakan *access-point*.

Namun dengan teknik MANET, yang sebelumnya dalam jaringan membutuhkan perangkat *backwarding/fowarding devices*, setiap komputer *client* dapat dialihfungsikan sebagai *backwarding/fowarding devices* [2][4][5]. Hal ini bisa dilakukan oleh sebab peranan penting dari protokol *routing* yang berjalan di *Host-to-Host layer* pada struktur lapisan komunikasi data TCP/IP. Umumnya pada teknik MANET protokol *routing* yang digunakan ada dua jenis yakni: *proactive protocol* dan *reactive protocol*. Pada [1], [2], [4], [5], [6], [8], dan [15] menggunakan protokol OLSR (*Optimized Link State Routing*) yang tergolong *proactive protocol*, sedangkan [3] dan [9] menggunakan protokol AODV (*Ad-hoc On Demand Distance Vector*) yang tergolong dalam *reactive protocol*.

### Mobile Ad-hoc Network (MANET)

*Mobile Ad-hoc Network* (MANET) menggunakan standar regulasi IEEE 802.11 untuk menjalankan standar regulasi IEEE 802.15 yakni *personal area network*, yang umumnya dalam penggunaan sehari-hari disebut dengan *Bluetooth*. Topologi jaringan yang dibentuk dalam teknik MANET adalah *point-to-point* yang bersifat *temporary*, *dynamic* dan *multi-point-relay* [8][9]. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa protokol *routing* yang digunakan secara umum terbagi dua yakni *proactive protocol*, dimana protokol akan aktif senantiasa tanpa ada permintaan terlebih dahulu panggilan *routing* dari/antar *node* yang saling bertetangga [10][2], dan *reactive-protocol* yakni protokol yang bekerja melakukan perutean *packet-data* apabila ada permintaan dari *node-node* yang saling bertetangga [11][3].

Pergerakan *node* dalam jaringan MANET bersifat perpindahan bukan pergerakan [12] sehingga panggilan yang dibangun hanyalah efektif apabila *node* terminal *client* berada pada posisi *fixed*, oleh sebab teknologi WiFi rentan *disconnected* apabila terjadi pergerakan [13]. Oleh sebab topologi yang terbentuk pada jaringan MANET bersifat *dynamic* dan *flexible*, maka teknik komunikasi yang terbangun disebut dengan teknik MANET [12][7]. Dalam hal pengalamatan sendiri, teknik MANET tidak bergantung pada hal khusus penggunaan IPv4 dan IPv6 [5][8][10][15] dengan kata lain pengalamatan ini dapat baik dijalankan pada jaringan *wireless* berbasis teknik MANET.

### Data dan Informasi

Menurut [6] dan [13] data merupakan representasi fakta untuk mendeskripsikan sebuah *event* atau kondisi, sehingga apabila sejumlah data telah diproses menjadi sebuah nilai yang memberi arti dan nilai positif bagi si penerimanya maka disebut dengan informasi. Dalam bidang Teknologi Informasi, layanan (*services*) yang umum dikenal dan digunakan adalah layanan data, layanan informasi, dan layanan komunikasi [14]; dimana penyebutan ketiga jenis layanan ini diposisikan secara hirarki bahwa semakin memungkinkan bersifat *real-time* (waktu-nyata) atau kontinyu proses yang *real* berlangsung.

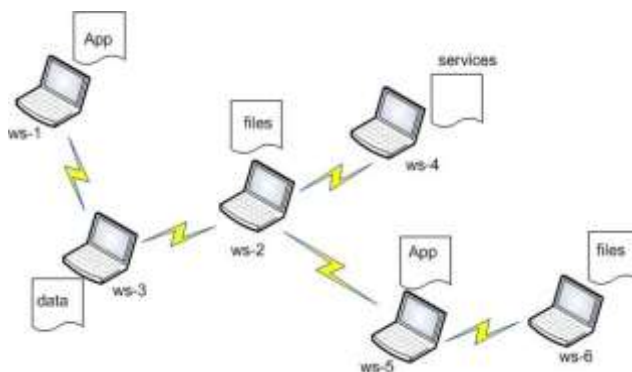
Contoh layanan data adalah FTP (*file transfer protocol*), *download/upload services*, *data-streaming*, *live-streaming* [3][6][8][12]; contoh layanan informasi adalah *web-site*, *blog* [4][11], dan contoh layanan komunikasi adalah VoIP (*Voice over Internet Protocol*), *web-chat*, *video-chat* [2].

Hampir semua layanan yang dikenal dalam Teknologi Informasi khususnya *internet* dapat dijalankan pada jaringan MANET.

**Teknologi Informasi dan Terapannya**

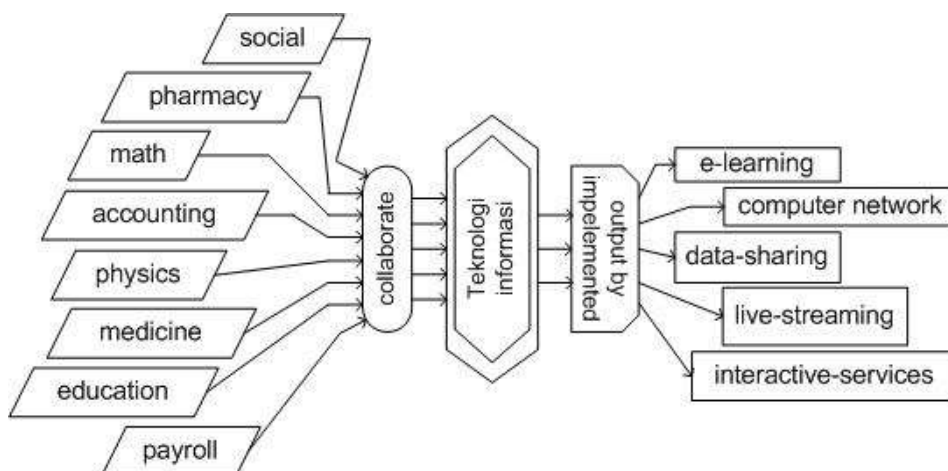
Manfaat Teknologi Informasi sudah banyak dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat dan kalangan, oleh sebab biaya penggunaan murah, fleksibel dalam pemakaian, dan telah terintegrasi dengan berbagai layanan teknologi yang lain; bahkan dapat mengintegrasikan berbagai perangkat dan sistem dalam heterogen bidang seperti finansial, perbankan, pendidikan, personalia, pengawasan, dan komunikasi jarak jauh. Oleh sebab itulah mengapa konvergensi bidang Teknologi Informasi dan telekomunikasi melahirkan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lazim disebut juga dengan istilah telematika [1][2][14].

Model pembelajaran Teknologi Informasi menggunakan teknik MANET dapat diartikan sebagai sejumlah *host-computer client* yang diintegrasikan dalam satu jaringan *wireless* dimana layanan yang dapat dijalankan oleh masing-masing *node client* tersebut saling *independent* (bebas dan tidak saling bergantung) satu-dengan yang lain, sehingga model komunikasi berantai akan terbentuk dan saling bisa berinteraksi antar *end-user* tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu oleh sebab proses berjalan saling-berantai (*chain-communication*).



**Gambar 3.** Model pembelajaran Teknologi Informasi dengan Teknik MANET

Seperti halnya pembelajaran secara *interactive* menggunakan komputer dan keping cakram yang disebut CD (*compact-disc*) maupun *software* aplikasi untuk berbagai bidang pelajaran dan ilmu pengetahuan seperti: matematika, elektronika, fisika, kimia, biologi, astronomi, akuntansi, dan basis-data, maka tentu saja berbagai bidang ilmu ini semakin menarik dan *user-friendly* apabila dijalankan menggunakan pemanfaatan Teknologi Informasi baik metode, teknik, dan teknologi yang ditawarkan/dimiliki.



**Gambar 4.** Framework model konvergensi pembelajaran berbagai bidang ilmu dengan Teknologi Informasi

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur berdasar penelitian-penelitian sejenis yang telah memberikan hasil berupa implementasi layanan yang digunakan, serta beberapa kasus untuk melihat kualitas dalam parameter-parameter QoS (*Quality of Service*). Parameter-parameter QoS yang umum digunakan seperti: *end-to-end delay*, *packet-loss*, dan *throughput* [6][7][13].

Penelitian yang digunakan dengan metode *survey-paper* dalam menganalisis model pembelajaran Teknologi Informasi dengan Teknik MANET, serta digunakannya objek riset kawasan tertinggal oleh sebab dan alasan sebagai suatu fakta yang bersifat rentan untuk dijadikan implementasi awal dalam pencarian manfaat yang *reliable* terhadap terapan Teknologi Informasi; walaupun tidak menafikan beberapa dampak negatif nantinya yang muncul dengan terapan Teknologi Informasi bagi kalangan masyarakat yang masih awam dan gagap teknologi. Walaupun kekhawatiran ini dapat dicegah dengan mekanisme pengawasan dan sistem proteksi pada *node server* sebagai titik kontrol melalui *modem* ke jaringan publik *internet*. Disamping itu juga sangat riskan dan tidak memungkinkan melakukan proses tukar-menukar *file* yang tergolong pornografi, kriminal, atau tindakan ekstrim negatif lainnya oleh sebab jaringan MANET yang dibangun bersifat privat dan lokal.

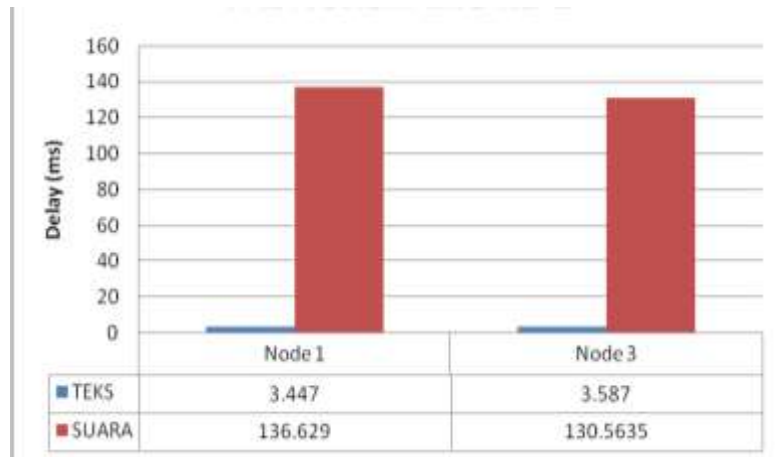
Setiap makalah yang dirujuk hampir mayoritas menggunakan metode kuantitatif dengan perhitungan QoS untuk menilai analisis layanan yang dibangun, disamping juga ada yang menggunakan metode kualitatif seperti MOS (*Mean Opinion Score*) [2][4]. Khusus [2] menggunakan metode MOS menggunakan rumus kuantitatif merujuk pada VQ Manager (*Voice Quality Manager*).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil implementasi teknik MANET pada maksimal 3 *node* seperti ditunjukkan pada gambar 5 dengan *service* yang dijalankan adalah *download file* tipe *text* dengan format \*.docx dan *audio-streaming* dengan format *file* \*.mp3. Pada [6] menunjukkan bahwa *end-to-end delay* pada layanan *text* cenderung lebih kecil dibandingkan dengan layanan *audio-streaming* seperti diperlihatkan pada gambar 6. Hal ini sesuai dengan [7] dan [14] bahwa tipe data *text* dalam jumlah *packet-data* yang dikirimkan cenderung lebih kecil dibandingkan *packet-data* dalam representasi tipe-data *voice/audio*. Oleh sebab *end-to-end delay* berbanding lurus dengan jumlah *packet-data* yang ditransmisikan dengan asumsi menduduki pada kapasitas kanal data (*throughput*) yang sama. Sehingga apabila semakin kecil *packet-data* yang dikirimkan maka *end-to-end delay* semakin singkat juga.



Gambar 5. Model 3 node dengan teknik MANET



**Gambar 6.** Perbandingan end-to-end delay untuk layanan text dan audio-streaming berdasar model 3 node [6]

Layanan *audio-streaming* dan layanan *text* tergolong layanan data, yakni suatu layanan yang berjalan hanya menggunakan satu saluran komunikasi saja yang disebut dengan *simplex communication method*. Sehingga *user* yang menjalin komunikasi masing-masing memiliki satu kanal transportasi saja dimana dua *node* yang saling menjalin komunikasi tersebut hanya memiliki status *node* sebagai *transmitter* saja dan *node* lain berperan sebagai *receiver* saja. Hal ini berbeda dengan [2] yang melakukan perbandingan layanan VoIP dan *chatting*, jika dilihat dan diamati dari pendekatan jenis layanan Teknologi Informasi yang digunakan adalah layanan komunikasi. Walaupun tipe data multimedia yang digunakan masing-masing pada [2] dan [6] relatif sama yakni *text* dan *voice*.

Jarak efektif pada teknik MANET untuk antar *node* yang saling bertetangga agar dapat menjalin komunikasi yang baik adalah sejauh 5 meter. Hal ini mengacu kepada kapabilitas teknologi WiFi untuk jarak rata-rata antar *node-transmitter* dan *node-receiver* efektif 5 meter agar mode *fresnell zone* dapat terbentuk pada area *line-of-sight* (LOS) yang bersih (*clearance*). Dengan demikian model pembelajaran Teknologi Informasi dapat menggunakan fasilitas VoIP dan *chatting* untuk misalkan melakukan diskusi interaktif pada bidang-bidang pelajaran atau kajian bidang pengetahuan tertentu, atau melakukan praktek/demo simulasi untuk pengajaran jaringan komputer. Seperti disebutkan pada [11] bahwa mobilitas *node* pada jaringan MANET efektif dilakukan asalkan tetap berada pada jangkauan *line-of-sight node-node* yang terhubung dan saling bertetangga tersebut, sehingga [12] menyebutkan bahwa topologi jaringan yang terbentuk pada *node-node* yang saling terhubung dan saling bertetangga tersebut adalah bersifat dinamis untuk setiap perpindahan yang dilakukan dalam membangun komunikasi antar *node-node* yang terhubung. Oleh sebab itu, teknik MANET memiliki fleksibilitas dan dinamika pergerakan yang tergantung pada protokol *routing* yang digunakan. Seperti disebutkan pada [7],[11], dan [13] panggilan komunikasi yang dilakukan pada *node* terminal komputer pada jaringan MANET efektif dilakukan pada mode perpindahan, bukan pergerakan dengan alasan teknik *handover* yang dimiliki pada *mobile-network* tidak ada pada teknologi WiFi, sehingga dibutuhkan sebuah teknik *handover* dalam jaringan *wireless* yang disebut dengan *mobile-IP*. Pada *mobile-IP*, pergerakan setiap *node-terminal* akan dipantau dalam tabel *routing* yang telah bersifat *fixed* untuk daftar *IP-Address* yang telah diposisikan secara *virtual* dan *temporary*, sehingga jika diintegrasikan dengan teknik MANET, maka akan muncul teknik baru selanjutnya yang disebut dengan MONET (*Moving Area Network*).

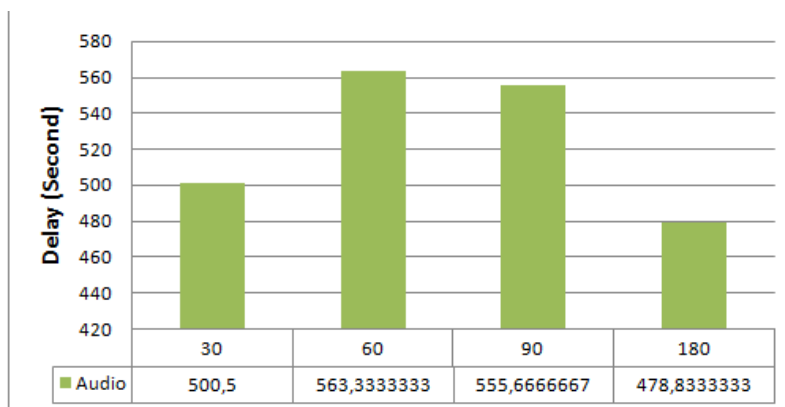
Tabel 1: Skala nilai MOS dan R-Factor yang disajikan pada VQManager [2]

user-satisfaction level	MOS	R-Factor
sangat-puas	$4.3 < x \leq 5.0$	$90 < x \leq 100$
puas	$4.0 < x \leq 4.3$	$80 < x \leq 90$
cenderung puas	$3.6 < x \leq 4.0$	$70 < x \leq 80$
buruk	$3.1 < x \leq 3.6$	$60 < x \leq 70$
sangat buruk	$2.6 < x \leq 3.1$	$50 < x \leq 60$
tidak dapat diterima	$1.0 < x \leq 2.6$	$x \leq 50$

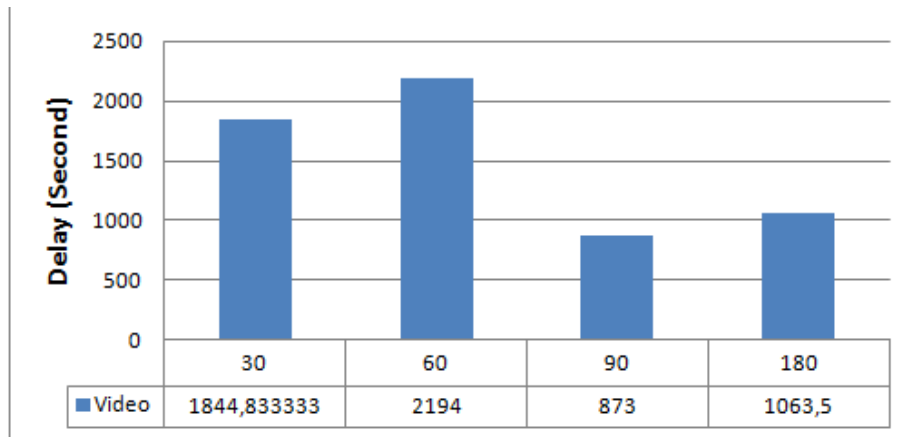
Oleh sebab jaringan *wireless* memiliki kelebihan dalam minimasi *cost* penyediaan infrastruktur fisik, maka umumnya tepat digunakan untuk membangun skalabilitas jaringan komputer yang bersifat lokal (*local network*). Untuk media-transmisi *cable* sendiri umumnya digunakan pada *external network*, atau dalam skalabilitas *public-network* serta untuk kondisi *outdoor-building*. Sedangkan dalam perbandingan *indoor-building* dan *outdoor-building* berdasar [2] menyebutkan bahwa nilai QoS yang terukur pada parameter *packet-loss* cenderung lebih kecil dalam *indoor-building* dibandingkan *outdoor-building* untuk layanan yang diuji adalah VoIP dan *chatting*; walaupun perbedaan yang muncul di sisi *end-user* tidak terlalu signifikan karena terukur pada satuan *milli-second* (ms).

Layanan VoIP dan layanan *chatting* tergolong layanan komunikasi, yakni suatu layanan yang berjalan menggunakan mode komunikasi 2-arah yakni *full-duplex*, sehingga *user* yang menjalin komunikasi masing-masing memiliki dua kanal yang berbeda yakni *down-stream* dan *up-stream*. Kanal *down-stream* berperan untuk menerima *packet-data* dari *transmitter* dan kanal *up-stream* berperan untuk mengirimkan *packet-data* (membalas komunikasi) dari *receiver* ke *transmitter*. Layanan VoIP berbasiskan tipe data *voice/audio/speech* sehingga layanannya bisa disebut *voice-streaming* sedangkan layanan *chatting* berbasiskan tipe data *text*, sehingga layanannya bisa juga disebut *text-streaming*.

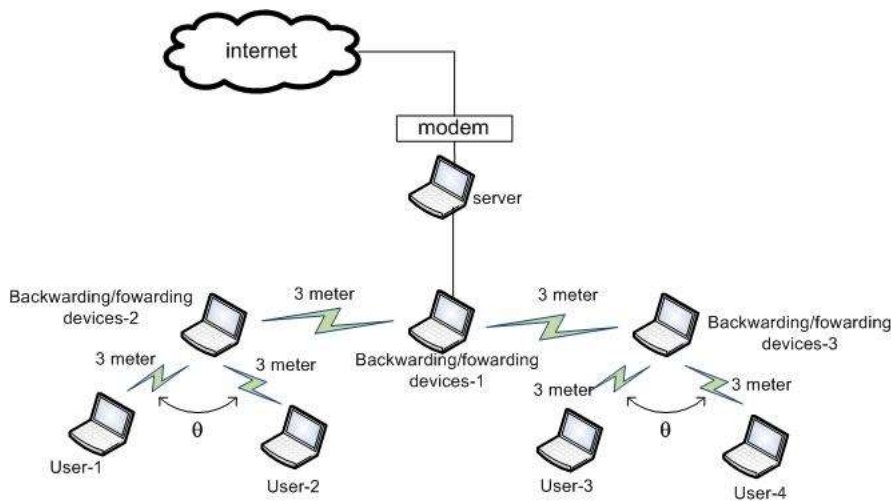
Pada [15] juga melakukan penelitian sejenis seperti pada [2] untuk kondisi *outdoor-building*, dimana hasilnya ditunjukkan pada gambar 7 dan 8; yakni *end-to-end delay* yang didapatkan lebih kecil untuk layanan suara dibandingkan dengan video. Dan sebagai informasi bahwa layanan yang diujikan tersebut adalah *audio-streaming* dan *video-streaming*, dengan model jaringan MANET yang disimulasikan seperti pada gambar 9 ini. Kedua layanan masing-masing diakses melalui koneksi *internet* dari sebuah *web-site* yang menyediakan layanan *audio-streaming* dan *video-streaming*.



Gambar 7. Kurva nilai end-to-end delay untuk audio pada setiap peubah posisi [15]



Gambar 8. Kurva nilai end-to-end delay untuk video pada setiap peubah posisi [15]



Gambar 9. Arsitektur mobile ad-hoc network yang dibangun [15]

## 5. KESIMPULAN

Layanan yang dikenal dalam Teknologi Informasi senantiasa mengalami perkembangan dan peningkatan signifikan dalam hal *interactive*, fitur, kombinasi jenis layanan, serta aspek *user-friendly*. Sehingga sangat tepat digunakan dalam model-model pembelajaran dalam kondisi *indoor-building* maupun *outdoor-building*. Terlebih lagi dengan dukungan teknik MANET dimana setiap *node-node* yang saling terhubung dalam satu jaringan lokal sangat fleksibel dan dinamis pada setiap posisi yang dimiliki untuk membangun panggilan komunikasi tersebut. Dengan demikian model pembelajaran Teknologi Informasi dengan teknik MANET sangat tepat diimplementasikan pada kawasan dengan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang masih minim.

Teknik MANET menawarkan fleksibilitas komunikasi dalam area LOS yang dimiliki masing-masing *node-node* terminal, sehingga *end-user* dapat fleksibel dan nyaman dalam melakukan panggilan komunikasi. Terlebih lagi berbagai layanan Teknologi Informasi yang umumnya dikenal dapat baik dijalankan pada infrastruktur jaringan *wireless*.

Protokol *routing* dalam teknik MANET sangat berperan penting untuk memainkan dan menjalankan kesuksesan layanan Teknologi Informasi yang dipilih, sehingga semakin baik kualitas yang dimiliki protokol *routing* maka reliabilitas dan aspek *robustness* dapat senantiasa



dipertahankan untuk setiap panggilan komunikasi yang dibangun pada masing-masing *node* terminal dalam jaringan *wireless*.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

1. Kazemi, H.S. "Distributed Monitoring System for Mobile Ad Hoc Networks: Design and Implementation". Thesis. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University. 2007.
2. Sopandi, M., Simamora, S.N.M.P., Sularsa, A., "Membangun Layanan Komunikasi VoIP dan Chat pada MANET (Mobile Ad-hoc Network) dengan menggunakan Protokol OLSR", Proceedings, SITIA2010 T.Elektro-ITS Surabaya, 2010. ISSN : 2087-331X.
3. Simamora, S.N.M.P., Juhana, T., Kuspriyanto, Fajarini, A. L. "Pemodelan Graf Dalam Jalur Komunikasi Data Pada Mobile Ad-Hoc Network". Proceeding Of KNSI, 14–15 Februari 2013, hal.221-226 STMIK Bumi Gora, Mataram, Indonesia. ISBN: 978-602-17488-0-0.
4. Simamora, S.N.M.P., Thalib, I., Sularsa, A. "MANET As A Solution Network Implementation In The Provision Of Services In Regional Disaster Information". Proceeding Konferensi ICISBC (The 1st International Conference on Information Systems for Business Competitiveness) 2011 tanggal 8-9 Desember 2011. Graduate School of Information Systems, Univ. of Diponegoro, Semarang, hal:54-60. ISBN: 978-979-097-198-1.
5. Simamora, S.N.M.P., Juhana, T., Kuspriyanto, Setiawan, N. "IPv6 Addressing Technique based Dynamic Host Configuration Protocol in Mobile Ad-hoc Network", The 7th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA) 30-31 October 2012, STEI-ITB. Denpasar. Bali. hal:280-283 ISBN: 978-1-4673-4549-1.
6. Lord Sing, V., Simamora, S.N.M.P., Siregar, S. "Evaluasi Performansi OLSR (Optimized Link State Routing) pada Mobile Ad-hoc Network". Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Vol.7 No.2 Maret 2011 hal.177-186. Fak. Ilmu Komputer, Universitas Pelita Harapan, ISSN: 1412-9523
7. Kumar, A., Singla, A. K. "Performance evaluation of MANET Routing Protocols on the basis of TCP traffic pattern", International Journal of Information Technology Convergence and Services (IJITCS) Vol.1, No.5, October 2011.
8. Simamora, S.N.M.P., Juhana, T., Kuspriyanto, Bagjarasa, N. R. "Sistem Pemodelan Perpindahan Terminal-User secara Terpola untuk Mengukur Pola Perubahan Throughput pada Topologi MANET". Seminar Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (SeTISI 2013) Fak. Teknologi Informasi, Univ. Kristen Maranatha, Bandung hal.186-191. ISBN:978-602-98685-3-1
9. Zhu, C. "Medium Access Control and Quality-of-Service Routing for Mobile Ad Hoc Networks". Dissertation. University of Maryland. 2001.
10. Johnson, D. et al., IETF RFC, "The Dynamic Source Routing Protocol (DSR) for Mobile Ad Hoc Networks for IPv4". 2007
11. Puttonen, J. "Mobility Management in Wireless Networks". Dissertation. Dept. of Mathematical Information Technology. Univ. of Jyväskylä. Finland. 2006.
12. Simamora, S.N.M.P. "Dynamics System Modeling Approach in Node Mobility on Mobile Ad-hoc Network". The 1st Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (CITACEE 2013). 16 November 2013. Departement of Computer Engineering, Univ. Diponegoro. hal.35-39. ISSN: 2338-5154.
13. Taneja, S. & Bhalla, V. K. "Analysis the Performance of MANET Protocols by Varying the Number of Connections". International Journal of Mobile & Adhoc Network, Vol: 2 issue: 2, hal.185-191.
14. Simamora, S.N.M.P., Juhana, T., Kuspriyanto, Ardianita, W. "Analisis Sistem Waktu-Nyata pada Komunikasi Full-duplex untuk Jalur Komunikasi Data", Proceeding of Conference The Annual Discovery in ICT-M (ADICT) 19 Desember 2012. Politeknik TELKOM. Bandung. hal:103-108. ISSN: 2302-1896.
15. Simamora, S.N.M.P., Juhana, T., Kuspriyanto, Ruhyani, A. "The Comparative Analysis of Data-streaming Services for Position Variable in Mobile Ad-hoc Network". Proceedings, SITIA (14th Seminar on Intelligent Technology and Its Applications) 2013. 16 Mei 2013. T.Elektro-ITS Surabaya, 2013. ISSN:2338-2023



# ILMU-ILMU HUMANIORA DAN PEMBAHARUAN-PEMBAHARUAAN IDENTITAS DI PAPUA <sup>1</sup>

I Ngurah Suryawan

Jurusan Antropologi Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat  
[ngurahsuryawan@gmail.com](mailto:ngurahsuryawan@gmail.com)

## Abstrak

Artikel ini merefleksikan bagaimana dasar-dasar ilmu-ilmu humaniora yang khususnya dikembangkan di pendidikan tinggi dan realitas yang berkembang di Tanah Papua. Ilmu-ilmu humaniora pada dasarnya berusaha mendidik manusia untuk menjadi lebih manusia dan bergerak memahami identitasnya sesuai dengan konteks sejarah dan kebudayaannya. Artikel ini mendalami bagaimana penempatan dan kontekstualisasi ilmu-ilmu humaniora dalam menafsirkan identitas budaya Papua yang terus bergerak dinamis. Mengajukan pendidikan humaniora sangat memungkinkan rakyat Papua untuk terus-menerus memperbaharui identitasnya di tengah interkoneksi global.

**Kata kunci:** ilmu-ilmu humaniora, refleksi, identitas, Papua, pendidikan

## 1. Pendahuluan

Pendidikan Antropologi yang berkembang di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) terbukti memiliki peminat yang tinggi dan lapangan kerja yang menjanjikan bagi lulusannya. Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Cenderawasih (Uncen) telah banyak melahirkan lulusan antropologi yang kini terserap di berbagai lapangan kerja dari mulai aparat birokrasi, lembaga swadaya masyarakat hingga jajaran bagian *community development* (pemberdayaan masyarakat) perusahaan investasi multinasional. Sementara belum genap dua tahun kelahirannya, Jurusan Antropologi Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari, Papua Barat sudah menerima hampir 150 mahasiswa, meski yang kemudian bertahan menyusut menjadi 100-an mahasiswa dalam 2 angkatan. Meski kuantitas bukan menjadi ukuran kemajuan, potensi yang dimiliki oleh peminat ilmu-ilmu humaniora, khususnya ilmu antropologi pantas untuk dikedepankan.

Jumlah mahasiswa yang mendaftar di Jurusan Antropologi di Tanah Papua ini pun menunjukkan antusiasme generasi muda Papua mempelajari tentang kebudayaannya. Seorang lulusan ilmu Antropologi Uncen berkisah kepada saya bahwa motivasinya yang paling besar dalam mempelajari ilmu antropologi jauh-jauh dari Nabire ke Jayapura adalah ingin mempelajari ilmu tentang kebudayaan yang akan dipergunakan untuk “mencatat” kebudayaan di kampungnya masing-masing. Di Jurusan Antropologi Universitas Negeri Papua (UNIPA), puluhan mahasiswa dari salah satu fakultas eksata pindah ke Jurusan Antropologi dengan berbagai alasan. Salah satu

---

<sup>1</sup> Artikel ini awalnya adalah makalah untuk kuliah umum mahasiswa Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Semester Ganjil 2013/2014 di Aula Fakultas Sastra, 16 Agustus 2013. Judul awal makalah singkat ini adalah Ilmu-Ilmu Humaniora dan Refleksi Identitas: Pengalaman Papua. Bagian lainnya dikembangkan dari artikel “Media dan Mediasi Budaya” yang dimuat di *Harian Manokwari Express*, 25 Februari 2014. Bagian tentang cerita rakyat dan pendidikan bersumber dari “Cerita Rakyat, Mediasi Budaya, dan Pendidikan yang Percaya Diri di Tanah Papua” adalah pengantar 2 buku cerita yaitu *Legenda Suku Irires Kabupaten Tambrauw Papua Barat* dan *Kisah Fabel Suku Irires Kabupaten Tambrauw Papua Barat* (Yogyakarta: Kepel Press, Fakultas Sastra Unipa dan Tanoto Foundation, 2014). Dilakukan penambahan dalam beberapa bagian untuk penyempurnaan artikel ini. Versi terakhir diterbitkan dalam Noken, Jurnal Bahasa, Sastra, Sosial Budaya Edisi 2 Nomor 2 Maret 2014 dengan judul “Ilmu-Ilmu Humaniora dan Refleksi Identitas dalam Konteks Papua”.

mahasiswa yang mengikuti kelas kuliah organisasi sosial yang saya ampu menuturkan, “Bapa, sa pu tempat di sini sudah. Di jurusan sebelumnya sa pu otak ini seperti mati,” ujarnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan perspektif di atas, artikel ini berusaha mengelaborasi perspektif antropologi dalam melihat kompleksitas persoalan identitas dan heterogenitas budaya di Papua. Perhatian secara khusus tertuju kepada dinamika pemekaran daerah yang melahirkan fragmentasi (baca: keterpecahan) di dalam masyarakat Papua menurut marga dan etnik. Oleh karena itulah diperlukan refleksi dari ilmu antropologi dan ilmu-ilmu humaniora secara umum dalam melihat fenomena paradoks identitas dan kebudayaan Papua dalam kasus pemekaran daerah yang dimaksud. Artikel ini akan dimulai dengan ulasan tentang perspektif dan dinamika ilmu-ilmu humaniora di Papua, dilanjutkan dengan pembahasan tentang pendidikan yang beridentitas Papua dan introduksi dari birokrasi dalam bentuk pemekaran daerah yang berimplikasi pada transformasi social budaya. Bagian terakhir akan mencoba merefleksikan perspektif dari ilmu antropologi dalam melihat dinamika pemekaran dan pendidikan dalam usaha mengembangkan pembaharuan-pembaharuan identitas Papua ke depan.

## 2. Kajian Pustaka

Dalam sebuah esainya, intelektual terkemuka Papua, Pendeta Dr. Benny Giay mengungkapkan bahwa perlu refleksi di kalangan lembaga pendidikan di Papua untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga yang emansipatif dan transformatif. menuju Papua Baru. Lembaga pendidikan di Papua bukan hanya menempatkan dirinya semata-mata sebagai lembaga pewaris nilai-nilai sosial budaya generasi masa lampau. Yang terjadi justru lembaga pendidikan ini tidak akomodatif kepada perubahan jaman (Giay, 2000: 93-102). Diperlukan terobosan dari lembaga pendidikan di Papua untuk menangkap kegelisahan dan pergolakan di yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Kegelisahan dan pergolakan tersebut terekspresikan melalui berbagai fenomena social budaya yang terpentaskan di public maupun tersimpan rapat dibalik kebungkaman rakyat untuk bersuara.

Ilmu-ilmu humaniora adalah pengetahuan yang bersumber dan terus hidup melalui pengalaman manusia dalam berkomunitas dan mengkonstruksi (membentuk) kebudayaannya. Konstruksi manusia dalam relasinya berkomunitas itulah yang membentuk ilmu-ilmu humaniora seperti bahasa, sastra, arkeologi, sejarah, antropologi. Semuanya masuk ke dalam rumpun-rumpun ilmu budaya yang membedakan dirinya dengan ilmu social dan politik (sosiologi, komunikasi, kriminologi, administrasi, dll). Karena fokusnya pada pembentukan kebudayaan manusia, ilmu-ilmu humaniora menysar secara langsung refleksi identitas-identitas manusia dalam rentang sejarah yang terus berubah sesuai dengan konteks, ruang, waktu, dan kepentingan manusia tersebut.

Ilmu humaniora tentu berbeda dengan ilmu pasti dan sangat jauh dari pemikiran tentang pragmatisme pendidikan untuk melayani dunia kerja, pasar global, dan sudah tentu kuasa kapital (investasi) yang menggerogoti negeri ini dan juga manusia-manusia di dalamnya. Subyek yang dipelajari dalam ilmu-ilmu humaniora terus bergerak dan dinamis, sementara yang mempelajarinya juga mempunyai pengalaman pribadi yang terus berubah sesuai dengan konteks historisnya. Oleh karena itu hasil dari belajar antropologi lebih bersifat pengetahuan reflektif dan apresiatif yaitu pada penemuan eksistensi manusia itu sendiri. Ilmu humaniora meletakkan kebenaran ada dalam rentang sejarah sosial manusia, dalam relasi kuasa/politik, ketika manusia harus membuat strategi dan siasat untuk mengorganisir hidupnya di dunia nyata.

Pendidikan pada prinsipnya berkaitan dengan revolusi kesadaran historis (sekalgus kritis) manusia akan hakekat hidupnya. Eksistensi manusia terbentang antara masa lampau dan masa depan. Dengan demikian pendidikan itu arahnya tidak hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga pada usaha pemahaman atas diri sendiri dalam konteks historisnya. Ada tiga poin penting yang patut direnungkan. *Pertama*, pengetahuan manusia itu bersifat historis, maka sifat

---

<sup>2</sup> Komunikasi pribadi dengan salah seorang lulusan Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih (Uncen) melalui jejaring sosial di akhir November 2013 dan catatan saat perkuliahan Organisasi Sosial di Jurusan Antropologi UNIPA tahun ajaran 2012-2013.

dogmatis bertentangan dengan sikap historis manusia itu. *Kedua*, perlu tekanan dalam pendidikan pada “proses” bukan hanya dalam “produk”. *Ketiga*, perlunya menghidupkan kesadaran historis dengan membiasakan peserta didik melihat “akar-akar” sejarah dan masalah-masalah masa kini yang kita hadapi. Pendidikan seperti inilah yang berwawasan kemanusiaan, jadi juga berwawasan antropologi.<sup>3</sup>

Lalu, seperti apakah pendidikan ilmu-ilmu humaniora (antropologi) yang berwawasan kemanusiaan dan beridentitas Papua itu? Saat berkesempatan melakukan penelitian pustaka di perpustakaan Universiteit Leiden Belanda di awal tahun 2012, saya menemukan sebuah dokumen berjudul, *ITU DIA ! Djalan Pengadjaran Mambatja untuk Nieuw Guine* yang ditulis I.S Kijne dan diterbitkan J.B. Wolters-Groningen, Djakarta-1951. Pada awalnya saya belum mengetahui benar begitu pentingnya buku ini dalam meletakkan pondasi dasar pendidikan dasar di Tanah Papua (dulu disebut West Nieuw Guinea oleh Pemerintahan Belanda). Para misionaris ini faham betul bahwa dasar-dasar pendidikan selayaknya dikembangkan sesuai dengan konteks dan kearifan lokal suatu daerah. Proses pendidikan dengan demikian harus menyentuh kehidupan keseharian masyarakatnya, bukan malah tercerabut dari akar kebudayaan dan identitasnya.

Beberapa puluh tahun kemudian, di awal tahun 2014, saat melakukan penelitian lapangan di Kota Sorong, saya kembali menemukan “wajah baru” dari *ITU DIA!* yang dikembangkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang didirikannya di beberapa daerah di Sorong. Alasan mereka kembali mengulangi jalan pengajaran membaca yang dikembangkan misionaris adalah telah hilangnya ruh pendidikan yang dikembangkan Pemerintah Indonesia di Tanah Papua. Kedua-duanya yaitu pendidikan yang dikembangkan misionaris dan pemerintah Indonesia adalah sama-sama hal yang asing bagi rakyat Papua. Namun, *ITU DIA! Djalan Pengadjaran Mambatja untuk Nieuw Guine* yang dikembangkan para misionaris ini terbukti lebih bisa diterima dan merekognisi dunia dan imajinasi rakyat Papua tentang kebudayaan, lingkungan, dan identitasnya.

Di awal buku teks tipis yang sangat sederhana ini, I.S Kijne memulainya dengan beberapa asas dalam pengajaran membaca di Tanah Papua. Ia menuliskan:

*Anak-anak sekolah harus merasa diri didalam dunianja sendiri dan bukan didalam dunia asing. Buku-buku batjaan jang biasa dipakai membawa anak-anak itu kedalam dunia asing. Djalan pengadjaran ini mempergunakan benda dari dunia sekitar anak-anak sekolah. Tentu perkataan banjak jang harus diadjarkan kepadanja, tetapi perkataan banjak jang harus diadjarkan kepadanja, tetapi perkataan itu semuanya lazim di Nieuw Guine, sehingga dapat dipergunakannya terus. (I.S Kijne, 1951:3)*

Buku-buku bacaan khususnya bagi anak-anak sekolah dasar memang sering dikritik lepas dari konteks lokal dan keseharian masyarakatnya. Dinamika interkoneksi anak-anak Papua dengan dunia luar dalam bidang pendidikan seakan alpa menempatkan mereka menjadi subjek dari proses pendidikan tersebut. Yang terjadi malah anak-anak Papua tersingkirkan dalam proses pendidikan di tanahnya sendiri karena apa yang diajarkan adalah impor dan asing bagi mereka. Misalkan saja kalimat-kalimat yang terkenal dari buku-buku pelajaran yang diproduksi oleh Pemerintah Indonesia: “Ini Bapak Budi. Ini Ibu Budi. Bapak Budi pergi ke sawah. Ibu Budi memasak di dapur” dan yang lainnya.

Dalam usaha menandingi homogenitas (seragamisasi) pemikiran dan pelajaran inilah diperlukan langkah-langkah kreatif untuk memanfaatkan konteks lokal dalam proses pendidikan dan menjadikan cerita-cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai sumber pembelajaran yang efektif. Dengan demikian anak-anak akan menemukan dunianya dan itu juga berarti menemukan identitasnya. Anak-anak belajar tanpa kehilangan identitasnya. Oleh karena

---

<sup>3</sup> Lebih lengkap tentang perspektif pemikiran ini lihat makalah dari Prof. P.M. Laksono, M.A, “Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia” dalam Sarasehan AJASI (Asosiasi Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

itulah diperlukan usaha untuk menerbitkan bahan-bahan bacaan berbahasa ibu untuk mengisi kekosongan bahan bacaan yang berkonteks lokal Papua dan menempatkan arti penting cerita rakyat bagi peserta didik.

Dalam konteks Papua, sangatlah penting artinya proses pendidikan yang berkonteks lokal Papua yang sangat kaya terdapat dalam cerita rakyat yang bisa dituliskan kembali dalam bahasa ibu dan Bahasa Indonesia. Hal itu bisa diekspresikan misalnya dalam masyarakat dengan mengapresiasi cerita-cerita rakyat yang masih dituturkan dalam bahasa ibu masing-masing etnik. Langkah ke depan sangatlah penting untuk melaksanakan proses-proses pendidikan dengan menggunakan bahasa ibu dan menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam cerita-cerita rakyat sebagai warisan tradisi lisan masyarakat. Cerita-cerita rakyat ini sepatutnya dituliskan dan dijadikan bahan ajar di pendidikan tingkat dasar dan menengah.

### 3. Metode Penelitian

Ilmu-ilmu humaniora memiliki perkembangan yang menjanjikan dan dinamis di Papua. Konteks sosial budaya dan perubahan sosial menjadi laboratorium yang penting dalam pengembangan ilmu antropologi khususnya. Namun, situasi ironis yang terjadi adalah terkesan mandegnya perkembangan ilmu-ilmu humaniora karena penetrasi birokratisasi pendidikan dan kuasa investasi global. Namun, kondisi ironis yang terjadi adalah justru ketajaman (ilmu) antropologi sangat lemah di tempat-tempat dimana masyarakat dan kebudayaannya dikalahkan oleh kekuatan eksploitasi (modal, negara, dan jaringan sistem nilai global). Jejaring interkoneksi kuasa kapital global inilah yang mengeksploitasi sumber daya alam yang dahsyat dan mengalahkan masyarakat dan budaya tempatan (Laksono, 2010:10).

Dalam ranah praksis, kerja ilmu-ilmu humaniora, khususnya antropologi mesti dikerjakan secara berkelanjutan dengan mengapresiasi pengalaman-pengalaman dan narasi reflektif identitas yang berbeda-beda. Penting juga diajukan kerja partisipatoris bersama-sama masyarakat tempatan untuk melakukan studi etnografi bersama yang memberikan ruang dan sekaligus mengapresiasi pengalaman-pengalaman masyarakat tempatan untuk bersiasat di tengah terjangan kekuatan kapital global. Oleh karena itulah menjadi penting untuk menghargai “ruang antar budaya” untuk menumbuhkan kesadaran keberbedaan, melihat identitas diri kita pada masyarakat tempatan lain yang sebelumnya “asing” atau kita anggap “terkebelakang” dibanding identitas budaya kita.

Antropologi sangat berperan penting dalam sumbangannya dalam menafsirkan bagaimana konstruksi identitas kebudayaan kita terbangun. Bahkan, antropologi juga bisa menguraikan bagaimana pemegang kuasa menelikungnya. Antropologi dengan demikian memiliki daya dan kapasitas untuk mengawal proses konstruksi identitas kebudayaan tersebut berjalan lebih seimbang atau memihak yang sedang dilemahkan (Laksono, 2010: 10).

### 4. Pembahasan

Proses konstruksi kebudayaan diawali dari manusia dalam hidupnya berkomunitas dan mereproduksi kebudayaannya memerlukan media sebagai ruang ekspresinya. Ruang bukan hanya tempat yang nir-historis (tanpa sejarah), tetapi penuh dengan imajinasi, ingatan, dan keterikatan manusia dengan identitasnya dan dengan demikian juga dengan kebudayaannya. Di dalam ruang yang menyedjarah itulah manusia memerlukan media-media ekspresi kebudayaan untuk menegaskan identitas dirinya.

Di pusat reproduksi makna kebudayaan—ruang dan media-media ekspresi kebudayaan—itulah kebudayaan terus-menerus diperdebatkan, diperbincangkan, dan dijadikan pijakan melalui sistem nilai dan norma-norma dalam hidup berkomunitas (bermasyarakat). Oleh karena itulah sudah sepantasnya kebudayaan dipahami sebagai sebuah “gerakan sosial” yang akan terus-menerus berubah dan berada dalam wilayah ketegangan antara yang ingin berubah dan mempertahankan kebudayaan. Melokalisir kebudayaan dalam tempat tertentu tentu sangat salah kaprah, ini disebabkan karena begitu liar dan licinnya kebudayaan dipraktikkan melalui manusia-manusia yang menciptakannya.

Marilah coba merenungkan bagaimana kini kebudayaan-kebudayaan Papua terinterkoneksi (terhubung) dengan dunia luar. Implikasi dari keterhubungan ini adalah ketergoncangan yang terjadi akibat hadirnya kebudayaan baru yang sama sekali berbeda. Situasi “geger budaya” (kegagapan budaya) inilah yang menghadirkan gesekan-gesekan antara imajinasi lokal masyarakat tentang dirinya dan logika kapital global yang masuk melalui investasi-investasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Setiap jengkal tanah di Tanah Papua ini tidak bisa dilepaskan dari tangan-tangan investasi global yang ditunjukkan dengan masuknya berbagai jenis investor. Di sisi lain masyarakat lokal masih memerlukan adaptasi (penyesuaian) tentang mimpi dan imajinasi tentang diri dan kebudayaannya yang bergesekan dengan kebudayaan global.

Dalam silang-sengkarut inilah orang Papua dihadapkan pada imajinasinya tentang diri dan identitasnya yang digadang-gadang sebagai “identitas atau kebudayaan asli Papua” dan realitas kekinian dimana akulturasi dengan begitu *fluid* (cairnya) kebudayaan memunculkan kemungkinan-kemungkinan pemaknaan baru tentang identitas dan budaya Papua yang lebih lentur dan *in the making*, dalam proses pembentukan terus-menerus tanpa henti.

Berbagai fenomena “ketersingiran” secara halus namun pelan tapi pasti tengah mengiringi perjalanan kebudayaan di Tanah Papua. Berbagai ruang-ruang kebudayaan modern dipenuhi dengan materi-materi kebudayaan yang asing bagi mereka. Misalkan saja, kehadiran perkebunan kelapa sawit, pertanian, bangunan ruko (rumah toko), dan para pendatang yang membawa kebudayaan dan gairah berjuang untuk tetap *survive* (bertahan) di tanah rantau.

Di tengah situasi seperti ini, mengakui serta memperjuangkan identitas dan kebudayaan menjadi sangat problematik dan penuh dengan liku-liku. Oleh karena itulah di tengah situasi seperti ini menjadi sangat penting upaya-upaya yang apresiatif untuk merekognisi (mengakui) kebudayaan masyarakat lokal. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang-ruang kebudayaan untuk mengekspresikan identitas dan jati diri mereka.

Interkoneksi antara dunia luar dan anak-anak Papua secara jelas terlihat dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Tanah Papua, dengan bukti buku pelajaran membaca yang dirancang oleh misionaris, terlihat jelas usaha kreatif untuk menempatkan konteks lokal dalam rancangan pembelajaran membaca di sekolah dasar. Misalkan saja dengan penggunaan alat peraga berupa gambar besar yang mendeskripsikan “Rumah yang di kampung kena api. Ada orang berteriak dan lari. Ada babi yang lari. Ada pula orang yang lari mencari air dan membawa air dan memadamkan api itu sampai api mati” (I.S Kijne, 1951: 5).

Anak-anak Papua dengan demikian memerlukan media-media pembelajaran dimana anak-anak mampu belajar tanpa kehilangan identitasnya. Oleh karena itulah mereka akan dapat berpartisipasi dalam gerakan perubahan masyarakatnya, bukannya malah tersingkir dan terasingkan dengan pembelajaran yang asing bagi mereka. Agar anak-anak Papua bisa belajar tanpa kehilangan identitasnya, dibutuhkan media-media kebudayaan yang dipentaskan dalam ruang-ruang kebudayaan, termasuk salah satunya di sekolah. Media-media jelas menjadi kebutuhan yang tidak bisa dianggap sepele. Media-media kebudayaan yang dimaksudkan adalah berbagai sarana-sarana yang menjadi “alat” untuk mengeskpresikan kebudayaan berbagai macam etnik yang ada di Tanah Papua ini. Media-media budaya sebenarnya hidup di tengah masyarakat dan menjadi simbol pemaknaan kebudayaan yang terus-menerus mereka lakukan. Namun, ditengah globalisasi dan modernisasi yang membayangkan kemajuan sebagai indikatornya, apresiasi terhadap media-media budaya yang tradisional dianggap ketinggalan zaman.

Media-media kebudayaan yang dimaksud adalah diantaranya adalah kesenian (ukir, tari, musik, suara) yang begitu kaya di Tanah Papua. Masing-masing kesenian ini mempunyai ruangnya yang menyebar saling bertautan dalam penciptaan kebudayaan sebuah komunitas. Seni ukir sebuah wilayah bisa merepresentasikan sistem pengetahuan dan religi sebuah komunitas. Melalui ukiran-ukiran kayu para seniman inilah pemaknaan sebuah kebudayaan sedang dilakukan terus-menerus, diperbincangkan, dan kemudian diwariskan menjadi sistem pengetahuan yang menandakan identitas mereka.

Di Tanah Papua, kesatuan kesenian (visual, tari, musik, nyanyian/suara) sudah menjadi ruh dan kehidupan masyarakat. Berbagai ekspresi kesenian ini adalah media-media budaya yang akan terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Papua. Namun karena mimpi terhadap kemajuan dan modernitas yang diimpor dari cerita kesuksesan daerah-daerah lain, apresiasi terhadap media-media kebudayaan tradisional akhirnya tersingkir. Persoalannya bukan hanya tersingkirnya apresiasi-apresiasi tapi secara perlahan namun pasti transformasi (perubahan) sosial pun menjadi tantangan yang harus dihadapi di depan mata.

Selain kesenian, media cerita-cerita rakyat dan proses inisiasi adat adalah pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan yang paling menyentuh kehidupan seseorang. Jika dipahami lebih dalam, dalam cerita-cerita rakyat akan banyak terkandung nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Lebih jauh, proses inisiasi adat yang dilakukan oleh sebuah komunitas atau etnik tertentu adalah pendidikan kebudayaan yang paling efektif dan berpengaruh dalam menciptakan karakter seseorang.

Media-media kebudayaan ini di tengah situasi bertautannya dunia tradisional dan dunia masa depan seolah dianggap kehilangan spiritnya. Arnold Clements Ap, seorang tokoh kesenian dan kebudayaan Papua, pernah mengungkapkan pendapat tentang apa yang dikerjakannya bersama teman-temannya di Group Mambesak. "Mungkin kamu berpikir saya ini sedang melakukan hal bodoh, tapi inilah yang saya pikir dapat saya lakukan untuk rakyat, sebelum saya mati." Apa yang dilakukan Arnold Ap dan Mambesak melalui media-media kebudayaan kesenian dalam hal ini adalah sesuatu yang membanggakan sekaligus menginspirasi. Salah satu hal yang tidak dapat terbeli dalam kehidupan ini salah satunya mungkin adalah kepuasan ketika identitas diri dan kebudayaannya terekspresikan dengan merdeka tanpa tekanan.

Melakukan gerakan-gerakan apresiasi terhadap kebudayaan masyarakat adalah salah satu perspektif dalam studi kebudayaan. Mediasi kebudayaan bisa diartikan sebagai perspektif yang melihat pelibatan/pengikutsertaan perspektif kebudayaan dalam memecahkan suatu permasalahan. Perspektif kebudayaan yang dimaksudkan adalah suatu pemahaman bahwa segala macam permasalahan terkandung aspek kebudayaan. Analisis kebudayaan inilah yang menjadi sumbangan dari gerakan-gerakan mediasi kebudayaan.

Tentang apa itu kebudayaan dan bagaimana perspektif yang terdapat di dalamnya menjadi perdebatan yang tiada ujung dan akhir. Begitu banyak teori dan perspektif kebudayaan dengan metodologinya masing-masing. Jika menganggap kebudayaan itu terus bergerak dan berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu, perspektif transformatif yang emansipatoris sangatlah tepat dirujuk. Paradigma kebudayaan ini memandang bahwa pemaknaan kebudayaan lahir dari proses belajar bersama antara masyarakat dan orang lain yang ingin belajar tentang kebudayaannya. Dengan demikian, pengetahuan terlahir dari proses negosiasi dan saling belajar. Perspektif ini jauh dari pemikiran bahwa kebudayaan adalah datang jatuh dari langit dan ada begitu saja (*taken for granted*). Kebudayaan adalah proses pemaknaan berupa sistem nilai dan norma dalam sebuah komunitas yang akan terus berubah-ubah sesuai dengan konteks ruang yang menyenjang dan waktu.

Gerakan mediasi-mediasi kebudayaan bisa tercermin dari digunakannya perspektif kebudayaan yang transformatif emansipatoris dalam membaca perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Mediasi kebudayaan bisa juga terlihat dari keberpihakan dalam memfasilitasi ekspresi-ekspresi kebudayaan lokal yang tumbuh dan berkembang menjadi identitas dan martabat masyarakat Papua.

Oleh karena itulah menjadi sangat penting untuk menghadirkan cerita-cerita rakyat berbahasa ibu (Bahasa Irokes di Kabupaten Tambrau dalam buku ini) sebagai media dan mediasi pendidikan dan kebudayaan. Sastra lisan yang coba dituliskan dan diajarkan bagi anak-anak sekolah menjadi usaha kemanusiaan yang panjang untuk menjadikan anak-anak Papua tidak kehilangan identitas dan kepercayaan dirinya dalam proses pendidikan di tanahnya sendiri. Oleh sebab itulah menjadikan proses pendidikan di Tanah Papua yang percaya diri menjadi sangat penting. Salah satu misi dalam kedua buku cerita rakyat ini adalah menunjukkan kepercayaan diri tersebut.

Selama ini, ekspresi identitas kebudayaan lokal Papua telah direpresi dengan stigma separatis karena alasan stabilitas atau dianggap kuno tidak sesuai dengan kebudayaan modern.

Mengapresiasi kebudayaan lokal dengan berbagai mediana adalah bentuk gerakan sosial yang paling ampuh untuk merekognisi identitas dan martabat diri. Dengan demikian kita juga telah memediasi gerakan-gerakan kebudayaan baru untuk memunculkan kemungkinan-kemungkinan orang Papua memikirkan dunia lainnya dengan tetap berakarkan identitas kebudayaannya.

Ruang dan kesempatan dalam mengembangkan identitas-identitas baru melalui kreatifitas-kreatifitas manusia dalam mengkonstruksi kebudayaannya sebenarnya ditawarkan oleh pemekaran-pemekaran daerah. Peluang ini sebenarnya membuka interkoneksi orang Papua terhadap dunia luar dan sekaligus mengembangkan pembaharuan-pembaharuan identitasnya. Namun pertanyaannya adalah apakah pemekaran daerah ini mampu membuat orang-orang Papua berpikir melampaui etnik dan wilayahnya sendiri? Atau malah kembali memikirkan identitas Papua berbasis identitas etnik dan kembali ke "titik asali" yang terlepas dari realitas interkoneksi budaya global yang terjadi di hampir seluruh jengkal tanah di Papua ini?

Ada baiknya saya mengisahkan penelitian lapangan yang saya lakukan dan member kesan mendalam bagaimana wacana pemekaran daerah ini berlangsung. Pada sebuah kesempatan mengunjungi Kota Sorong akhir Januari 2014, saya menyaksikan dan menangkap kesan yang sangat gamblang bagaimana wacana pemekaran menjadi pembicaraan yang sangat menggairahkan. Paling tidak itu yang saya saksikan di ruang depan dua hotel yang cukup besar di Kota Sorong. Para elit-elit lokal dengan berpakaian rapi dan bersepatu kulit sejak dari sarapan hingga melewati makan siang hari begitu asyik berdiskusi menghabiskan waktu mereka ditemani rokok dan sirih pinang. Saya perhatikan dan mendengarkan beberapa bagian pembicaraanya seputar persoalan pemekaran daerah di kawasan kepala burung Papua.

Saya merasakan pergunjungan dan gosip politik yang tidak jelas ujung pangkalnya tentang pemekaran daerah menjadi candu yang menggiurkan sekaligus memabokkan, khususnya bagi para elit local dan secara pelan namun pasti hingga ke masyarakat akar rumput. Berita media-media massa pun membahas tentang pro dan kontra seputar wacana pemekaran daerah yang terus-menerus terjadi tanpa henti. Wacana pemekaran telah menjadi konsumsi publik dan menjadi penegasan bahwa perbincangan tentang politik menjadi hal yang dominan tentang Papua melebihi hal yang lain.

Beberapa bagian masyarakat dan elit lokal terus memperjuangkan pemekaran, sebagian elemen masyarakat lainnya justru menolaknya dengan berbagai alasan. Mulai dari membuka peluang migrasi para pendatang, ketersingkiran orang asli Papua di tanahnya sendiri, hingga korupsi ekonomi dan politik yang melibatkan para elit lokal Papua dan beberapa elemen masyarakat yang menjadi kolusinya. Cita-cita luhur pemekaran untuk mensejahterakan masyarakat seakan pelan namun pasti menjadi jauh dari harapan. Kesejahteraan rakyat telah dirampas oleh sebagian kelompok masyarakat dalam komunitas mereka sendiri. Intinya terjadi keterpecahan yang akut di tengah masyarakat antara yang berapi-api memperjuangkan pemekaran dan menolaknya karena akhirnya menjadi candu yang melumpuhkan.

Namun, rasionalitas pemekaran selalu mengedepankan persoalan ekonomi dan kesejahteraan selain alasan-alasan yang lainnya. Bagaimana dengan argumentasi kebudayaan ketika pemekaran diakui atau tidak menggunakan basis argumentasi etnik sebagai sebuah DOB (Daerah Operasional Baru)? Apakah pemekaran daerah paralel dengan kesamaan etnik dan wilayah-wilayah budaya di Tanah Papua ini? Apa implikasi jika fenomena ini terjadi di Tanah Papua ditengah interkoneksi global yang menuntut orang Papua selalu berkoneksi dengan dunia luar, bukan hanya komunitasnya sendiri.

Wilayah Provinsi Papua Barat dalam pembagian 7 wilayah adat di Papua termasuk dalam wilayah budaya III Domberai (Papua Barat Laut) dan wilayah budaya IV Bomberai (Papua Barat). Wilayah budaya III Domberai terdiri dari 52 suku dan terletak di Papua Barat Laut sekitar Sorong Manokwari, meliputi: Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawatan, Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo. Sementara wilayah budaya IV terletak di Papua Barat terdiri dari 19 suku terletak di wilayah Fakfak, Mimika dan sekitarnya yang meliputi: Fakfak, Kaimana, Kokonao, Mimika.

Pembagian wilayah budaya yang sering dikenal ini menurut Flassy (1995:11) merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesukaran yang ditemukan dalam kekayaan diversitas budaya yang ada di Tanah Papua. Oleh sebab itulah dicari pemecahannya dengan jalan merduksinya ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil melalui konsep “wilayah budaya”. Pengertian dari konsep ini adalah menyatukan sejumlah komunitas yang terdapat di seluruh daerah meskipun masing-masing relative masih memperlihatkan perbedaan yang bervariasi.

Reduksi budaya melalui pembagian wilayah budaya kini memantik kompleksitas persoalan seiring dengan perjalanan Papua menjadi wilayah yang terus berkembang dan mengalami transformasi social-budaya yang tak terhindarkan. Salah satu persoalan yang berada di depan mata adalah gairah pemekaran daerah yang tak terbandung di Papua yang menyeret persoalan sentimen kekerabatan (suku) dan juga etnik. Usulan DOB dikhawatirkan berimplikasi fragmentasi (keterpecahan) pada masyarakat Papua sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itulah menjadi patut dipertanyakan kembali reduksi budaya dalam 7 wilayah budaya di Tanah Papua apakah masih relevan untuk menjelaskan dinamika pemekaran daerah dan relasi-relasi sosial yang semakin kompleks ketika Tanah Papua sudah terinterkoneksi dengan dunia global.

Jika menelisik ke belakang, sejarah pemekaran di Tanah Papua berawal dari terpecahnya Provinsi Irian Jaya menjadi Irian Jaya Barat (kini bernama Provinsi Papua dan Papua Barat). Berdirinya provinsi baru yang nama sebelumnya adalah Irian Jaya Barat berawal dari dialog antara tokoh-tokoh masyarakat Irian Jaya Barat dengan pemerintah Indonesia pada 16 September 2002. Para tokoh-tokoh masyarakat Papua ini menyampaikan agar Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri segera mengaktifkan kembali Provinsi Irian Jaya Barat yang sudah ditetapkan pada 12 Oktober 1999. Provinsi Irian Jaya Barat didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 45/1999 dan dipercepat dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2003. Peresmian Kantor Gubernur Irian Jaya Barat dilakukan oleh Pejabat Gubernur Abraham Oktavianus Ataruri yang berlangsung pada 6 Februari 2003.

Terbentuknya kabupaten baru di Provinsi Papua Barat seperti Kaimana, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Maybrat, dan dua yang terbaru yaitu Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak menggambarkan begitu bergairahnya keberlangsungan pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua Barat. Di tengah diversitas budaya yang tinggi di wilayah *vogelkop* (kepala burung) ini, selalu muncul keinginan untuk memecah wilayah kembali dalam bentuk kabupaten-kabupaten baru. Demam pemekaran sangat jelas terlihat dari keinginan beberapa elemen rakyat Papua untuk memekarkan daerahnya menjadi 33 DOB, 10 DOB adalah hasil pemekaran di Provinsi Papua Barat. Hal ini sangat mencengangkan sekaligus mengundang keprihatinan akan proses dan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

## 5. Kesimpulan

Identitas adalah sebuah konsep yang “cair”, dinamis, terus bergerak, dan mencari konteks dan relasi historisnya. Oleh karena itu tidak ada identitas yang tunggal. “Identitas Papua” kini terus didefinisikan, sangat rumit, kompleks dan beragam. Bayangan tentang “Papua Baru” seharusnya membangkitkan solidaritas sosial rakyat Papua yang kini mulai terpecah-pecah karena pengaruh pembangunan, investasi, kepentingan ekonomi politik. Ingatan kekerasan dan penderitaan juga menjadi identitas yang merekatkan kegetiran pengalaman sejarah. Pengaruh dari gereja dan kekuatan iman rohani Kristiani menjadi jiwa tersendiri dalam menuju “Papua Baru”. Dalam konteks akademis, kajian-kajian ilmiah yang berusaha menggali inspirasi-inspirasi identitas “Papua Baru” dalam konteks historis dan kontemporer menjadi sangat penting dilakukan (Giay, 2000: 49-64).

Ilmu-ilmu humaniora tercermin dalam cerita-cerita rakyat dan pengetahuan-pengetahuan lokal adalah inspirasi dari identitas Papua Baru didambakan. Namun situasi yang terjadi karena pemekaran daerah yang hanya memikirkan logika ekonomi politik menyebabkan pengembangan-pengembangan budaya menjadi terabaikan. Hasilnya adalah daerah-daerah yang hanya memikirkan uang untuk menjalankan pemerintahan. Penggunaan keuangan hanya untuk pembangunan infrastruktur dan belanja pegawai-pegawai birokrasi dan melupakan kesejahteraan rakyat. Hasilnya



sudah pasti adalah masyarakat yang sangat rapuh karena solidaritas sosial hanyalah di permukaan tanpa menyentuh akar relasi-relasi sosial budaya dalam keseharian masyarakatnya. Hingga saat ini desain dan praktik tata kelola pemerintahan, yang diwujudkan dalam pemekaran-pemekaran daerah, bukannya menghasilkan integrasi social budaya dan masyarakat yang terorganisir, tetapi menciptakan budaya masyarakat yang kehilangan kemandirian dan martabatnya.

Bagi orang Papua, hingga saat ini mereka mengalami situasi liminal ketika kembali ke adat dan tradisi bukanlah jalan tengah yang baik dan menguntungkan di tengah interkoneksi global yang menjadikan Papua sebagai wilayah *frontier*, garis depan pertemuan kapitalisme global dan rakyat Papua di kampung-kampung. Berkiblat ke modernisasi juga kurang meyakinkan karena lompatan kebudayaan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan diri mengikuti logika kapitalisme yang bisa menelan kehidupan orang Papua. Justru pertemuan antara nalar dialektik dalam perspektif hirarki kebudayaan dengan modernisasi melahirkan ruang-ruang kreatif bagi orang Papua untuk menemukan kemungkinan solidaritas interkoneksi komunitas dan perubahan sosial. Orang Papua di satu sisi terikat dinamika internal yang berkaitan dengan marga, kepemilikan tanah, dan perebutan akses sumberdaya di dalamnya. Namun di sisi lain orang Papua dituntut untuk berimajinasi tentang dunia di luar kampung dan adat budayanya. Momen-momen inilah yang sangat memungkinkan orang Papua untuk melakukan penafsiran terus-menerus terhadap budaya dan identitasnya.

Salah satu momen-momen yang tersedia dalam pemekaran daerah yang menjadi titik perhatian ilmu-ilmu humaniora adalah persoalan refleksi identitas. Refleksi identitas yang dimaksud adalah ruang-ruang kebudayaan dalam arti luas yang memungkinkan orang Papua untuk mengekspresikan identitas sosial budayanya secara mandiri dan merdeka tanpa tekanan apapun. Pemekaran daerah dan studi-studi ilmu humaniora dengan demikian sepatutnya memberikan perhatian untuk pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan) di satu sisi dan di sisi lain adalah melayani (baca: memfasilitasi) ekspresi-ekspresi budaya yang begitu heterogen di Tanah Papua ini. Kondisi yang terjadi hingga kini adalah pemekaran daerah hanya melayani kebutuhan para elit bukannya martabat kebudayaan masyarakatnya. Kehidupan kultural hanya dipolitisasi untuk kepentingan para elit agar pemekaran terjadi dan dengan demikian uang dan kekuasaan pun ada di tangan. Dengan demikian, orang Papua merasa bahwa kebutuhan kulturalnya *tra* (tidak) terjamin dan diperalat hanya untuk kepentingan kekuasaan. Melayani kebutuhan martabat cultural rakyat Papua menjadi tujuan besar penataan daerah.

Studi-studi ilmu humaniora dalam konteks refleksi identitas Papua sepatutnya memperhatikan kesadaran kultural masyarakat. Ilmu-ilmu humaniora seharusnya berkomitmen kepada pengembangan diversitas budaya di Tanah Papua, namun yang terjadi dalam pemekaran daerah malah menghasilkan masyarakat yang elitis karena termanipulasi oleh para elit yang mengambil alih cita-cita integrasi social dan masyarakat yang terorganisir. Padahal, integrasi social dan masyarakat yang terorganisir adalah modal social budaya yang ampuh untuk mewujudkan transformasi social budaya di dalam masyarakat.

Realitas dalam pemekaran daerah selama ini hanya memfokuskan kepada uang dan fasilitas fisik dan alpa merekognisi ekspresi-ekspresi identitas budaya masyarakat yang sangat plural. Para elit-elit lokal yang bersemangat dalam pemekaran daerah memanipulasi uang ini sehingga pemekaran hanya melayani kepentingan elit, bukan kehidupan kultural masyarakatnya. Para elit sama sekali tidak berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang terorganisir tapi justru menimbulkan fragmentasi di tengah masyarakat. Oleh karena itulah studi-studi dalam ilmu humaniora, dan secara khusus ilmu antropologi, sangat penting untuk memberikan perhatian dan kajian-kajian kepada usaha-usaha kreatif dari masyarakat bersama dengan pemerintah daerah untuk mengapresiasi dan menggali nilai-nilai social budaya dan kesenian yang sangat heterogen di Tanah Papua. Nilai-nilai ini nantinya akan menginspirasi praktik-praktik inovatif pemekaran daerah yang merekognisi nilai-nilai social budaya dan seni yang menghidupi masyarakat setempat. Dengan demikian inisiatif-inisiatif pemekaran daerah akan mengakar kuat dalam kehidupan social budaya masyarakat, tidak elitis dan tercerabut dari akarnya seperti yang terjadi selama ini.

Kajian ilmu-ilmu humaniora dalam konteks refleksi identitas Papua juga selayaknya memberikan perhatian kepada pendidikan adat dan bahasa ibu sebagai medium penguatan identitas budaya dan martabat rakyat Papua. Selama ini desain pemekaran daerah hanya memfokuskan kepada pelayanan administratif dalam bentuk pembangunan fisik gedung-gedung pemerintahan, perebutan jabatan dan pegawai di birokrasi pemerintahan, dan ujung-ujungnya adalah pembagian uang untuk mewujudkan menjalankan pelayanan pemerintahan. Pendidikan adatlah yang melatih orang Papua untuk membina hidup dan sekaligus juga membina moral sebagai sebagai seorang manusia. Namun yang terjadi adalah isi dari pendidikan adat ini, yang bertujuan untuk membentuk manusia yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam adat dan norma-norma budaya, diambilalih oleh negara dan disederhanakan hanya dengan pendirian gedung-gedung sekolah yang justru kehilangan muatan paling mendasar dari pendidikan; membentuk manusia yang apresiatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang justru terbentuk adalah manusia yang pragmatis untuk mencerdaskan dirinya sendiri tanpa mempunyai sikap apresiatif terhadap nilai-nilai, norma, dan moral kemanusiaan. Pendidikan yang kehilangan spirit apresiasi nilai-nilai moral dan norma ini diawali dari hilangnya perhatian untuk pendidikan bahasa ibu bagi generasi muda selanjutnya. Apresiasi terhadap bahasa ibu menunjukkan orang yang mempunyai integritas, akar identitas, dan dengan demikian mempunyai harkat dan bermartabat.

Ilmu-ilmu humaniora dalam konteks refleksi identitas Papua selayaknya memberikan kritik terhadap pemekaran daerah yang hanya terhenti pada logika administratif dan uang. Logika seperti ini hanya akan menunggu waktu saja untuk melahirkan orang-orang Papua yang tidak mempunyai kemandirian dan inisiatif untuk melakukan perubahan social. Kondisi masyarakat yang frustrasi dan lumpuh tersebut tersebut akan sangat mudah melakukan tindak kekerasan. Masyarakat Papua yang hanya tergantung pada uang, proyek-proyek bantuan, dan menjual kemiskinan telah kehilangan martabatnya. Di sisi lain, sumber daya alam yang kaya di Tanah Papua jauh sebelumnya telah tereksploitasi. Dan kini, martabat sebagai manusia juga terjual ketika sangat tergantung kepada bantuan atau melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

Realitas yang terjadi di dalam masyarakat adalah masyarakat yang fragmatis dan frustrasi ketika bayangan kesejahteraan yang dijanjikan dalam otonomi khusus dan pemekaran daerah tidak kunjung dinikmati. Ilmu-ilmu humaniora dalam konteks refleksi identitas Papua akan menjadi sangat penting untuk memperhatikan ekspresi-ekspresi rakyat Papua yang kini terus-menerus melihat kampung halamannya terkuras sumber daya alamnya, sementara mereka hanya bisa menjadi penonton tanpa mampu untuk menjadi bagian dari raksasa bernama investasi global berwujud perusahaan-perusahaan yang mengeruk sumber daya alam. Situasi melumpuhkan seperti ini akan memunculkan ekspresi-ekspresi akumulasi kekecewaan, keputusan, frustrasi, dan memantik tumpukan resistensi dari masyarakat setempat.

Pemekaran daerah adalah ruang dimana terjadi friksi (persentuhan) antara kebudayaan etnik dan introduksi kebudayaan luar. Pada titik inilah ilmu-ilmu humaniora dalam perspektif refleksi identitas Papua menyediakan ruang-ruang eksplorasi bagi pembaharuan-pembaharuan identitas Papua baru. Studi dalam ilmu-ilmu humaniora, secara khusus ilmu antropologi memberikan perhatian pada wilayah friksi ini dan membaca apakah rakyat Papua mampu untuk mengembangkan pemikirannya untuk melahirkan kreatifitas-kreatifitas baru yang memungkinkan rakyat Papua memperoleh akses, ruang, dan ekspresi guna selalu memperbaharui identitas dan kebudayaannya. Tantangan pemekaran daerah dan perspektif refleksi identitas Papua adalah melawan pemikiran untuk mengembalikan identitas dan kebudayaan Papua ke titik asali tempo dulu. Ruang-ruang interkoneksi yang terjadi pada pemekaran daerah inilah yang ditangkap oleh kajian dalam ilmu-ilmu humaniora untuk memberikan perhatian kepada ekspresi-ekspresi dan pemikiran rakyat Papua untuk memikirkan identitas dan kebudayaannya yang baru, yang akan terus bergerak dinamis, menyebar. Di sanalah identitas Papua itu terus-menerus akan dipikirkan, dikonstruksi, dan diperdebatkan. Dengan demikian Papua menjadi hidup dan spirit yang akan terus menyala bagi generasi-generasi berikutnya di tanah yang diberkati ini.

## 6. Daftar Pustaka

- Aditjindro, George Junus. 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam.
- Alua, Agus A. 2002. *Mubes Papua 2000 23-26 Februari : Jalan Sejarah, Jalan Kebenaran*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Alua, Agus A. 2002a. *Dialog Nasional Papua dan Indonesia 26 Februari 1999: Kembalikan Kedaulatan Papua Barat, Pulang dan Renungkan Dulu*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Alua, Agus A. 2002b. *Kongres Papua 2000 21 Mei- 04 Juni: Marilah Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Alua, Agus A. 2006. *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan: Suatu Ikhtisar Kronologis*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2008, "Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs Kepentingan Elit", makalah Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi: "Dampak Bencana Alam dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Ekonomi Indonesia", Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, 20-21 Agustus 2008.
- Broek, Theo van Den, 2002. "Kerangka Acuan Lokakarya Membangun Budaya Damai Menuju Papua Tanah Damai", 25-30 November 2002.
- Chauvel, Richard. 2005. *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation*. Washington: East-West Center
- Fahardian, Charles E. 2007. *Kisah Hidup Tokoh-Tokoh Papua*. Jayapura: Penerbit Deiyai.
- Giay, Benny, 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- Giay, Benny, 1986. *Kargoisme di Irian Jaya*. Sentani: Region Press.
- Giay, Benny, 2008. *Mari Mengambil Alih Kendali Kehidupan: Memperjuangkan Pemulihan Negeri Ini (Kumpulan Renungan Pdt. Benny Giay)*. Jayapura: Penerbit Deiyai.
- Garnaut, Ross dan Manning, Chris. 1979. *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: PT Gramedia
- Hernawan OFM, J. Budi., 2006, "Membangun Papua Sebagai Tanah Damai: Sumbangan Gagasan untuk Sinode Keuskupan Jayapura", (makalah), Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura.
- Hommers, Paulus L. 2003. "Kontroversi dalam Kasus Pemekaran Provinsi di Papua" dalam *Jurnal Ilmu Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Vol. 1, No. 3, Desember 2003.
- ICG. 2006. "Bahaya yang Dapat Timbul Jika Menghentikan Dialog", Update Briefing, Asia Briefing No. 47. Jakarta/Brussels, 23 Maret 2006.
- ICG. 2002. "Sumberdaya dan Konflik di Papua", Update Briefing, Asia Briefing No. 39. Jakarta/Brussels, 13 September 2002.
- Kijne.I.S. 1951. *ITU DIA ! Djalan Pengadjaran Membatja untuk Nieuw Guine* J.B. Wolters-Groningen, Djakarta-1951.
- Laksono, P.M. 2009. "Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi Kapital". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 27 Oktober 2009.
- Laksono, P.M. 2010. "Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia". Makalah dalam Sarasehan AJASI (Asosiasi Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Laksono, P.M. 2010b. "Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Antropologi". Makalah dalam Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia ke-3 dan Seminar Antropologi Terapan di Cisarua 21-23 Juli 2010.

- Laksono, P.M. 2011. "Ilmu-ilmu Humaniora, Globalisasi, dan Representasi Identitas". Pidato yang disampaikan pada Peringatan Dies Natalis-65 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 3 Maret 2011.
- Rathgeber, Theodor Dr. 2006. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat: Studi Realita Sosial dan Perspektif Politis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan The Evangelical Church in the Rhineland dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
- Said, Edward. 2001. *Orientalisme*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Salftford, John., 2003, *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969*, London: Routledge Curzon .
- Santoso, Aboeprijadi, 2001, "Bintang Kejora Nasionalisme Etnik Papua Berkembang Alamiah," Radio Hilversum, 26 Januari 2001.
- Scout, James C. 2000, *Senjatanya Orang-Orang Kalah*, Jakarta: Penerbit Obor.
- Sumule, Agus. 2003. *Satu Setengah Tahun Otsus Papua: Refleksi dan Prospek*. Manokwari: Yayasan Topang.
- Suryawan, I Ngurah. 2013. "Keterpecahan yang Mematikan: Dinamika Pemekaran Daerah dan Transformasi Sosial di Provinsi Papua Barat" (artikel belum dipublikasikan dan masih dalam proses seleksi untuk Jurnal *Reviews Indonesian Studies*, ISEAS Singapore dan Fisipol UGM).
- Suryawan. I Ngurah. 2013. "Identifying the Dynamics and Complexities of Dewan Adat Papua (Papuan Customary Council): Cultural Identities and Responses" dalam *Local Civil Societies Dynamics in Indonesia*. CIDIN Radboud University Nijmegen The Netherlands dan UGM Yogyakarta.
- Suryawan, I Ngurah. 2013. "Tanah Dibutuhkan Tapi Orang Tidak: Transformasi Masyarakat Adat dalam Perspektif Etnografi dan Sejarah Sosial" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 2 Juli – Desember 2013.
- Suryawan, I Ngurah. "Politik Ruang (Pasar) dan Pemekaran Daerah: Siasat Rakyat Papua di Garis Depan Global" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 1 Februari – Juli 2012.
- Suryawan, I Ngurah. 2011. "Antropologi Gerakan Sosial: Membaca Transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari, Papua Barat" dalam *Humaniora, Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011 (290-300)
- Suryawan, I Ngurah. 2011. "Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153).
- Sutrisno, Mudji dan Hendra Putranto (ed). 2004. *Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tebay, Neles. 2009. *Dialog Jakarta-Papua Sebuah Perspektif Papua*. Jakarta: SKP Jayapura.
- Timmer, Jaap, 2007, "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua", dalam Henk Schulte Nordhold dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 595-625
- Tsing, Anna. Lowenhaupt.1998. *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tsing, Anna. Lowenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Widjojo dkk, Muridan. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past and Securing the Future*. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.

# REKAYASA PROGRAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DI INDONESIA TIMUR

Tinjauan Kasus: Program Sarjana IPB

Dr. Ibnul Qayim, Farchaini Budi Astuti, SP

Tim Beasiswa Utusan Daerah (BUD)

Institut Pertanian Bogor

E-mail: [i-qayim@ipb.ac.id](mailto:i-qayim@ipb.ac.id)

Email: [farchaini\\_budiastuti@ipb.ac.id](mailto:farchaini_budiastuti@ipb.ac.id)

## ABSTRAK

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di kawasan Indonesia timur merupakan tantangan bagi institusi pendidikan tinggi dan juga bagi pemerintah daerah. IPB sebagai salah penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia peduli terhadap kualitas sumberdaya manusia di kawasan Indonesia timur. Rendahnya capaian kompetensi di SMA, kondisi sosial dan budaya, serta variasi sarana dan prasarana pendidikan bagi mahasiswa di Indonesia, terutama Indonesia timur mendorong IPB untuk membuat metode pembelajaran khusus dan membuat rekayasa program dan teknologi pendidikan tepat guna untuk mahasiswa asal Indonesia timur. Hal ini bertujuan untuk memperkecil tingkat kegagalan dan meningkatkan angka keberhasilan mahasiswa di IPB. Rekayasa program dan teknologi tepat guna diantaranya dalam bentuk program pra universitas, tutorial, tutor sebaya, asrama, Tim Bimbingan Konseling dan layanan konsultasi dipersiapkan IPB bagi mahasiswa kawasan Indonesia timur termasuk pendekatan sosial dan budaya.

**Kata kunci:** sumberdaya manusia, kawasan Indonesia timur, pendidikan tinggi, mahasiswa IPB, rekayasa program dan teknologi pendidikan tepat guna, pra universitas.

## 1. PENDAHULUAN

IPB dengan moto "Mencari & Memberi yang Terbaik" mulai tahun 2003 membuka penerimaan mahasiswa baru jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD), yaitu suatu jalur penerimaan mahasiswa program sarjana yang bekerjasama dengan pemerintah maupun perusahaan swasta. Mahasiswa yang sudah lulus dari program ini diharapkan kembali ke daerah untuk membangun daerah dan menjadi pionir serta penggerak bagi kemajuan daerah asalnya. IPB juga bekerjasama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota di kawasan Indonesia timur untuk bersama-sama mengatasi masalah keterbatasan SDM yang unggul di kawasan Indonesia timur.

Upaya mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh diperlukan sumberdaya manusia berkualitas di daerah. Pendidikan merupakan strategi efektif dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkelanjutan. SDM berkualitas diharapkan menjadi lokomotif pembangunan termasuk pembangunan agribisnis dan sosial ekonomi yang akan berdampak nyata bagi kemajuan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pembangunan daerah termasuk bidang pendidikan, agribisnis dan sosial ekonomi. Sedangkan Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai pusat pengembangan SDM dan IPTEKS dengan kompetensi utama di bidang agribisnis, dari sejak didirikan tahun 1963 senantiasa peduli terhadap pembangunan daerah terutama

peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan. Sesuai dengan salah satu misi IPB yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif untuk menghasilkan lulusan yang berdayasaing dan berkarakter Indonesia, IPB senantiasa menjadi perguruan tinggi yang peduli terhadap kebutuhan pendidikan tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia pendidikan masih terdapat kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan Indonesia timur. Kesempatan dan fasilitas pendidikan yang tidak merata masih dirasakan oleh masyarakat di kawasan Indonesia timur. Berdasarkan data terakhir Kementerian Daerah Tertinggal, dari 183 daerah tertinggal di Indonesia, 70% berada di kawasan Indonesia timur (sumber: <http://www.kemendpt.go.id>, 2014). Faktor inilah yang mendorong IPB untuk terus berupaya melaksanakan program pendidikan yang pro Indonesia timur.

Pada tahun 2007 IPB bekerjasama dengan Direktorat Kawasan Khusus dan Kawasan Tertinggal Bappenas mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memberikan beasiswa kepada putera-puteri asli daerahnya untuk kuliah di IPB melalui program BUD. Didasari oleh semangat mencetak sumberdaya manusia unggul untuk kawasan Indonesia timur, IPB bekerjasama dengan 22 Pemerintah daerah di kawasan Indonesia timur melalui program BUD. Dalam rangka menjembatani kesenjangan antara kualitas pendidikan yang kurang dari sekolah (SMA) asal dan kualitas standar yang dibutuhkan untuk memasuki perguruan tinggi, IPB juga menyelenggarakan program pra universitas (PPU) bagi calon mahasiswa yang berasal dari kawasan Indonesia timur dan daerah lain yang membutuhkan.

IPB juga berperan aktif dalam Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dan menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan Papua. Program itu bertujuan untuk mencegah para mahasiswa afirmasi pendidikan mengalami gegar budaya ketika kuliah di perguruan tinggi negeri di Jawa. Banyak yang belum bisa beradaptasi dari sisi sosial dan budaya sehingga menjadikan mahasiswa tidak bisa maksimal dalam melaksanakan pendidikan. Program afirmasi ini juga bertujuan untuk menjalin rasa persaudaraan sebagai bangsa yang besar.

Beberapa program IPB inilah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia Timur. Sampai dengan tahun 2014 tercatat sebanyak 273 mahasiswa dari kawasan Indonesia timur yang masuk IPB baik melalui jalur BUD maupun ADIK. Sebagian diantara mereka telah menyelesaikan studinya dan kembali ke daerah asalnya untuk mengabdikan dan membangun daerah mereka. Program BUD dan ADIK di IPB dirancang dengan metode pembelajaran khusus untuk memperkecil angka kegagalan dan meningkatkan angka keberhasilan.

## **2. MODEL KEGIATAN AKADEMIK**

### **Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana**

Jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana di IPB terdiri atas lima jalur yaitu SNMPTN (jalur undangan prestasi akademik nasional: 50 – 60%), SBMPTN (jalur ujian tertulis nasional: 20 – 30%), Beasiswa Utusan Daerah (jalur kerjasama kelembagaan: 8%), Ujian Talenta Masuk IPB (jalur mandiri: 9%), Prestasi Nasional dan Internasional. Proses seleksi bagi calon mahasiswa dari kawasan Indonesia timur yang masuk ke IPB melalui jalur beasiswa Utusan Daerah dilakukan sebanyak dua tahap. Tahap pertama adalah seleksi dari instansi pemberi beasiswa, berupa seleksi administrasi, tes tertulis dan tes wawancara (d disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan instansi pemberi beasiswa). Seleksi akhir dilaksanakan oleh IPB dengan metode yang sama dengan seleksi jalur SNMPTN ((jalur undangan prestasi akademik nasional).

Dasar utama pertimbangan untuk seleksi di IPB adalah hasil akademik calon mahasiswa selama di SMA. Syarat akademik bagi pendaftar adalah nilai rapor untuk mata ajaran matematika, fisika, kimia dan biologi minimal  $\geq 7.00$  selama semester 1 -5. Selain nilai rapor, IPB juga melihat Performans Akademik Sekolah (PERAKS) dan daya tampung masing-masing mayor yang ada di IPB.

Sebagai upaya meningkatkan tingkat keberhasilan pada program sarjana, selain program reguler IPB juga menyelenggarakan program pra universitas. Program ini dilaksanakan selama dua semester pada awal perkuliahan program sarjana yaitu pada saat Tingkat Persiapan Bersama.

### **Tingkat Persiapan Bersama**

Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi IPB akan dipanggil untuk registrasi atau daftar ulang di IPB pada awal tahun akademik, berlaku baik untuk mahasiswa reguler maupun mahasiswa program pra universitas. Pada tahun pertama, seluruh mahasiswa program sarjana mengikuti Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dan tinggal di asrama mahasiswa TPB untuk mengikuti Program Pendidikan Akademik dan Multibudaya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan IPB yang memiliki standar akademik tinggi, professional, memiliki kepekaan sosial, kepedulian lingkungan dan jiwa kewirausahaan yang tinggi serta akhlak yang mulia.

Saat ini IPB sudah menerapkan kurikulum system mayor minor yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum system mayor minor lahir sejalan dengan tuntutan perubahan pasar dan kompetensi yang dibekalkan kepada lulusan IPB. Dalam kurikulum ini mahasiswa akan mendapatkan mayor (bidang keahlian utama) dan minor (bidang keahlian pelengkap/tambahan). Dari hasil kombinasi mayor-minor-*supporting courses* (mata kuliah penunjang) dapat dihasilkan lebih dari 500 kombinasi kompetensi. Dengan cara ini IPB menghasilkan populasi lulusan yang lebih beragam dan mampu menjangkau lapangan kerja yang lebih luas.

Pemilihan kompetensi utama (mayor) atau fakultas di IPB dilakukan sejak pendaftaran calon mahasiswa, dengan cara ini dari sejak awal calon mahasiswa dapat memilih minat studinya sesuai dengan cita-citanya. Namun demikian ketika sudah masuk di IPB, aktivitas belajar mengajar mahasiswa tidak langsung di departemen pengampu mayor, tetapi harus mengikuti lebih dulu TPB selama setahun (2 semester) untuk memperoleh kompetensi umum. Kompetensi umum yang diperoleh di TPB akan memberikan kemudahan lulusan IPB dalam mengadaptasi lapangan pekerjaan.

Setelah tamat TPB, kegiatan belajar mengajar pada tahun kedua, ketiga dan keempat lebih banyak dilakukan di departemen pengampu mayor. Pada tahun kedua itu, mahasiswa dapat menimbang untuk pilihan mayor kedua, atau minor atau mata kuliah penunjang (*supporting courses*) atau kombinasi dari ketiganya.

### **Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)**

Program ADIK adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerjasama dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Tujuan utama dari program ADIK ini adalah menambah kuota mahasiswa di Provinsi Papua dan Papua Barat masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Tahun 2014 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan program ADIK. Program yang dirancang sebagai upaya bentuk transformasi kultur akademis kepada masyarakat papua melalui otonomi khusus yang dimilikinya, diperuntukkan bagi putera puteri asli papua yang lolos seleksi untuk menempuh pendidikan tinggi pada 40 program studi pada 6 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Jalur ini memberikan kesempatan dan peluang lebih besar bagi siswa siswi asli papua yang berprestasi untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa jalur ADIK di IPB pada tahun 2012 berjumlah 11 orang dan seluruhnya adalah

mahasiswa asal Papua dan Papua Barat, sedangkan pada tahun 2012 IPB menerima 31 orang mahasiswa jalur ADIK yang 13 orang diantaranya berasal dari Papua dan Papua Barat. Setelah masuk IPB, mahasiswa dari jalur ini akan tinggal di asrama TPB IPB selama tahun pertama bersama dengan mahasiswa baru IPB lainnya. Hal ini untuk membantu mahasiswa dalam melakukan adaptasi sosial, budaya dan kultur akademik.

Mahasiswa program ADIK diberi kesempatan untuk mengulang pendidikan TPB apabila belum mampu lulus dari TPB. Dari data yang ada, mahasiswa jalur ADIK yang ada di IPB sebagian besar belum bisa mengikuti pola belajar mengajar di IPB sehingga banyak diantaranya yang DO dari program sarjana dan pindah ke program Diploma IPB.

#### **Pencangkakan di Sekolah (Model Bimbingan Intensif di SMA)**

Pada tahun 2009 IPB bekerjasama dengan Badan Pengelola Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua dalam pengiriman mahasiswa program sarjana jalur Beasiswa Utusan Daerah. Pada tahun yang sama BPSDM Provinsi Papua juga bekerjasama dengan suatu lembaga pendidikan untuk melakukan bimbingan intensif bagi siswa/siswi SMA terpilih yang nantinya akan diberi beasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk calon mahasiswa yang akan dikirim ke IPB.

Dalam program bimbingan ini tim pengajar dari lembaga pendidikan tersebut melakukan pendampingan intensif dari mulai siswa masih duduk di bangku kelas X SMA. Bimbingan diberikan untuk mata ajaran eksata dan dilakukan di sekolah. Setelah siswa menginjak kelas XII, mereka dibimbing secara intensif. Disini mereka setiap hari dibimbing oleh guru tutor dan mereka juga tinggal dalam satu asrama sampai dengan masa penerimaan mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi.

Model bimbingan intensif (pencangkakan di sekolah) seperti ini sangat efektif bagi siswa siswi dari kawasan Indonesia timur karena mereka akan lebih siap menghadapi metode dan pola belajar mengajar di perguruan tinggi. Dari hasil evaluasi akademik di IPB juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang sebelumnya mengikuti bimbingan intensif dari bangku SMA memiliki tingkat keberhasilan akademik di IPB lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa dari kawasan Indonesia timur lainnya yang tidak mendapatkan bimbingan intensif. Selain kesiapan akademik, mahasiswa ini juga lebih siap untuk menghadapi perbedaan sosial dan budaya karena sudah tinggal di asrama selama kurang lebih satu tahun.

### **3. REKAYASA PROGRAM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TEPAT GUNA**

Pelaksanaan program pendidikan bagi mahasiswa kawasan Indonesia timur membutuhkan penanganan yang khusus dengan mempertimbangkan karakter, kendala budaya dan bahasa agar mahasiswa dari kawasan Indonesia timur berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi di IPB. Beberapa rekayasa program dan teknologi tepat guna yang dilakukan IPB adalah sebagai berikut:

#### **3.1. PRA UNIVERSITAS**

Program Pra Universitas IPB (PPU IPB) adalah bagian dari Program Pendidikan di IPB yang didedikasikan untuk menyediakan pendidikan ilmu-ilmu dasar dalam perguruan tinggi. PPU di dalam penyelenggaraan pembelajarannya menerapkan atmosfer akademik yang kondusif di bawah bimbingan staf pengajar yang berpengalaman. PPU bekerjasama dengan Program Pendidikan Sarjana IPB, sehingga mahasiswa PPU mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di program sarjana IPB. Bahkan beberapa mata kuliahnya dapat disetarakan dengan mata kuliah di program sarjana IPB.

PPU dilaksanakan selama satu tahun dengan beban studi sebanyak 10 (sepuluh) mata kuliah yang dibagi menjadi dua semester. Beban studi tersebut berupa paket mata kuliah yang sama untuk seluruh mahasiswa. Ilmu-ilmu dasar seperti Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia



diperlukan bagi mahasiswa PPU untuk menjembatani jika ada kesenjangan capaian kompetensi antar SMA dan Tingkat Persiapan Bersama (TPB). Bahasa Indonesia terutama diperlukan sebagai alat komunikasi ilmiah dalam proses belajar mengajar. Sementara sosiologi diperlukan sebagai bagian dari program budaya dan pengenalan ilmu sosial awal untuk mahasiswa PPU.

Seluruh mahasiswa PPU tinggal di asrama selama mengikuti program ini. Mereka tinggal bersama dengan mahasiswa baru Tingkat persiapan bersama lainnya. Dengan tinggal di asrama, mahasiswa PPU dapat berbaur dengan mahasiswa dari daerah lainnya sehingga dapat menambah wawasan dan mempermudah proses adaptasi awal di IPB. Selain kegiatan akademik, dalam program PPU juga diselenggarakan *social hour*. Kegiatan ini berupa kunjungan, *outbond*, dan kegiatan bersama lainnya. Tujuan dari *social hour* adalah untuk menambah minat, ilmu serta wawasan mahasiswa PPU di bidang pertanian serta untuk lebih mengenalkan IPB. Kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan rasa persaudaraan, kekompakan dan kebersamaan diantara sesama peserta PPU.

IPB telah menyelenggarakan PPU bagi calon mahasiswa dari kawasan Indonesia timur sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2007 yang diikuti sebanyak 97 mahasiswa yang berasal dari kawasan Indonesia timur, kemudian tahun 2008 diikuti oleh 40 orang, tahun 2009 diikuti oleh 31 orang mahasiswa dan terakhir pada tahun 2012 yang diikuti oleh 24 orang mahasiswa yang berasal dari kawasan Indonesia timur. Selain mahasiswa dari kawasan Indonesia timur, PPU juga diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari Kalimantan, Sumatera Barat dan beberapa daerah lain yang membutuhkan program ini.

Seluruh kegiatan akademik yang diselenggarakan di PPU mengacu pada penyelenggaraan pendidikan di TPB sehingga memudahkan adaptasi mahasiswa terhadap pola belajar mengajar di perguruan tinggi. Penilaian keberhasilan studi semester dilakukan pada tiap akhir semester dan nilai akhir ditetapkan pada akhir tahun akademik. Apabila IPK mahasiswa  $\leq 1.50$  (batas IPK minimal TPB IPB) maka tidak dapat melanjutkan studi pada program S1 secara langsung, mahasiswa masih diberi kesempatan untuk masuk ke TPB (tingkat 1) dengan perjanjian memenuhi nilai tertentu pada semester pertama. Sedangkan apabila IPK mahasiswa  $\geq 1.50$  maka dapat melanjutkan studi ke TPB tanpa syarat. Dari hasil evaluasi akademik program PPU, menunjukkan data bahwa lebih dari 50% mahasiswa program ini masih belum dapat mengikuti pola belajar mengajar di perguruan tinggi.

### 3.2. TUTORIAL

Salah satu upaya IPB untuk memberikan layanan akademik bagi mahasiswa dari kawasan Indonesia timur adalah dengan menyelenggarakan kegiatan tutorial. Tutorial diadakan oleh Direktorat Tingkat Persiapan Bersama sebanyak empat kali pertemuan sebelum ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kegiatan ini dilaksanakan setelah waktu perkuliahan yaitu mulai pukul 19.00 – 21.00 WIB serta diajar oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah tersebut di TPB. Dalam kegiatan tutorial metode nya lebih banyak berlatih mengerjakan soal-soal sehingga diharapkan mahasiswa yang belum memahami dan mengerti materi kuliah pada saat jam kuliah dapat lebih memahami pada saat tutorial.

Dalam satu tahun akademik diselenggarakan empat kali tutorial terdiri atas dua kali tutorial pada semester ganjil (pra UTS dan pra UAS) dan dua kali tutorial juga pada semester genap. Tutorial ini diperuntukkan bagi mahasiswa jalur BUD, ADIK dan mahasiswa asing yang kelasnya dibuat terpisah sesuai dengan jalur dan mata kuliah yang didapat.

IPB juga menyediakan tutor yang merupakan mahasiswa dari Indonesia Timur. Tutorial dilaksanakan di Asrama mahasiswa Papua. Hal ini dilakukan agar mahasiswa yang berasal dari kawasan Indonesia timur merasa lebih nyaman dan terbuka terhadap tutornya.

### 3.3. TUTOR SEBAYA

Selain tutorial yang diberikan oleh dosen, IPB juga menyelenggarakan tutor sebaya. Tutorial sebaya ini pengajarnya adalah mahasiswa pada semester yang sama (sebaya) yang memiliki nilai indeks prestasi kumulatif 4.0. Diharapkan dari model tutorial ini para mahasiswa dapat lebih terbuka dan nyaman untuk melakukan diskusi dan latihan-latihan soal pada materi kuliah. Tutorial dilaksanakan di asrama TPB IPB dengan waktu yang telah disepakati bersama antara tutor dan mahasiswa.

Kegiatan tutorial ini diperuntukkan untuk mata kuliah yang dianggap sulit bagi mahasiswa TPB seperti Kalkulus, Fisika, Fisika Umum, Kimia dan Kimia Umum. Dengan memanfaatkan tutorial ini mahasiswa dapat memperbaiki tingkat pemahaman terhadap materi kuliah.

### 3.4. BADAN PENGELOLA PROGRAM AKADEMIK, MULTI BUDAYA ASRAMA TPB IPB dan TIM BIMBINGAN KONSELING

Pada tahun pertama mahasiswa diwajibkan untuk tinggal di asrama TPB IPB. Asrama mahasiswa tidak sekedar berfungsi untuk tempat tinggal tetapi memegang peranan yang lebih penting yaitu merupakan wahana program pembinaan akademik dan multibudaya. Program ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa beradaptasi dengan kehidupan kampus, dunia kemahasiswaan dan mengasah kemampuan *soft skill* seperti dalam berkomunikasi, berorganisasi dan memahami kemajemukan. Mahasiswa yang berasal dari kawasan Indonesia timur merupakan bagian penting dari gambaran kemajemukan mahasiswa IPB. Seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke bergabung menjadi satu di Asrama TPB IPB untuk memudahkan proses adaptasi dan pemantauan.

Asrama TPB IPB dilengkapi dengan organisasi pembinaan yang disebut Badan Pengelola Program Akademik, Multi Budaya dan Asrama TPB IPB. Didalamnya terdapat Kepala Asrama, Manajer Unit dan Kakak Asrama (*senior residence*). Kakak asrama adalah kakak kelas yang tinggal di Asrama TPB untuk membantu mahasiswa menghadapi masalah akademik dan non akademik. Mereka inilah yang sehari-hari membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan adaptasi budaya dan sosial. Rasa kebersamaan yang dibangun di asrama TPB IPB merupakan suatu aset emosional yang sulit dicari padanannya. Saling tolong menolong dalam suka dan duka secara tidak langsung sangat membantu dalam kelancaran studi.

Selain pendekatan sosial dan budaya di Asrama, IPB juga menyediakan Unit Bimbingan dan Konseling. Unit Bimbingan dan Konseling IPB dikelola dan diasuh oleh Tim Bimbingan dan Konseling (TBK). TBK terdiri dari beberapa dosen IPB (konselor) dan beberapa Psikolog yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah baik akademik maupun non akademik. Layanan akademik berupa konsultasi yang terkait dengan masalah akademik seperti kesulitan dalam mengikuti proses belajar di IPB. Sedangkan bantuan layanan non akademik berupa bantuan pemecahan masalah non akademik seperti penyesuaian kehidupan di kampus (terutama bagi mahasiswa TPB) maupun masalah pribadi yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan studi di IPB.

Dalam program PPU konselor terlibat intensif dalam membantu mahasiswa dari kawasan Indonesia timur menjalani proses adaptasi di IPB. TBK bekerjasama dengan panitia PPU mengadakan acara-acara kebersamaan (*outing* dan *social hour*) dengan tujuan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan sesama peserta PPU serta memberikan pengalaman dan wawasan baru terhadap tempat yang dikunjungi. Masing-masing mahasiswa juga dapat dengan mudah bertemu konselor untuk sekedar berdiskusi atau berbagi cerita mengenai kegiatan akademik maupun proses adaptasi mahasiswa selama di TPB.

### 3.5. LAYANAN KONSULTASI DAN FASILITASI OLEH TIM BUD

Mahasiswa dari kawasan Indonesia timur diberikan akses untuk mendapatkan layanan konsultasi dan fasilitasi komunikasi dengan penyandang dananya oleh Tim BUD. Mahasiswa berkesempatan untuk melakukan konsultasi baik masalah akademik maupun non akademik

kepada Tim BUD. Mereka juga diberikan akses untuk menggunakan fasilitas telp/faks dalam rangka berkomunikasi dengan sponsor (pemerintah daerahnya).

Beberapa masalah yang biasanya timbul adalah untuk akademik seperti kesulitan adaptasi dengan pola perkuliahan di IPB, perbedaan cara belajar teman satu asrama dan kesulitan mengikuti praktikum akibat tidak mengenal bahan dan alat praktikum sebelumnya. Untuk masalah non akademik berkisar antara *home sick*, keterlambatan biaya hidup dari penyandang dana maupun orang tua serta kendala adaptasi bahasa dan budaya.

Secara kontinu tim IPB juga datang ke Asrama Mahasiswa Papua untuk melakukan monitoring dan diskusi dengan mahasiswa kawasan Indonesia Timur. Dalam forum ini mahasiswa bisa menyampaikan kendala yang dihadapi selama perkuliahan. IPB juga melihat potensi yang besar dalam diri mahasiswa kawasan Indonesia timur terutama pada bidang olah raga. Mereka sangat antusias saat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan olah raga di IPB. Seringkali mahasiswa kawasan Indonesia timur mendominasi perolehan juara pada kompetisi olah raga yang diselenggarakan oleh IPB. Hal ini dimanfaatkan oleh IPB sebagai pendorong dan penumbuh motivasi bagi mahasiswa kawasan Indonesia timur untuk dapat lebih berprestasi.

Dalam bidang akademik, beberapa mahasiswa kawasan Indonesia juga menunjukkan prestasi akademik yang bagus. Beberapa diantara mereka bahkan pernah mendapatkan IPK 4.00 pada Tingkat Persiapan Bersama. Ada juga lulusan program sarjana mahasiswa kawasan Indonesia timur yang melanjutkan pendidikan ke program magister.

#### 4. HASIL EVALUASI AKADEMIK MAHASISWA ASAL INDONESIA TIMUR

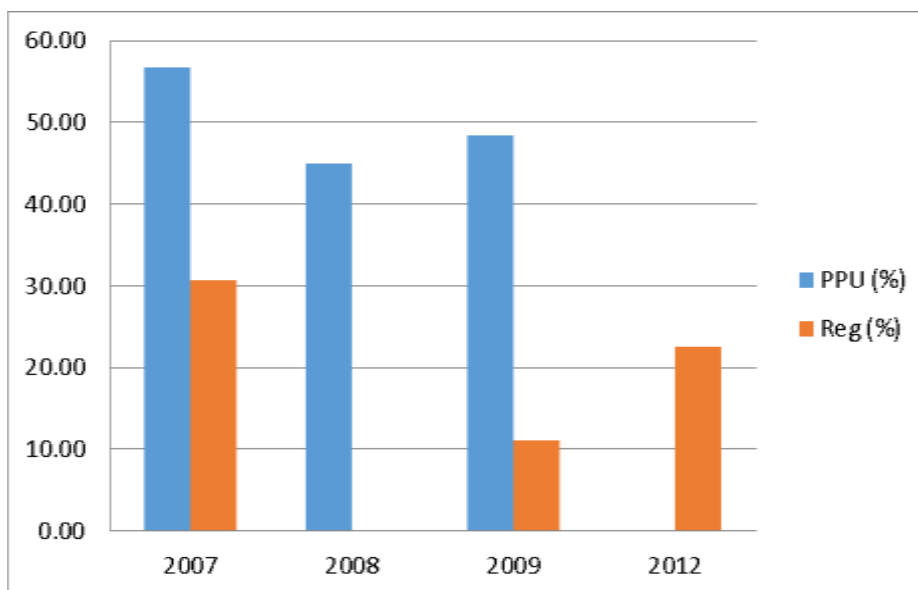
##### 4.1. PERSENTASE KAGAGALAN STUDI

Mahasiswa asal Indonesia timur yang sedang melaksanakan pendidikan di IPB terbagi menjadi dua, yaitu mahasiswa yang langsung masuk ke Tingkat Persiapan Bersama (reguler) dan mahasiswa yang harus mengikuti program pra universitas selama dua semester. Program pra universitas bagi mahasiswa dari Indonesia timur sudah diselenggarakan oleh IPB sebanyak empat kali yaitu tahun 2007, 2008, 2009 dan terakhir tahun 2012. Hasil evaluasi akademik yang ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif bagi mahasiswa reguler dan program pra universitas akan kami sajikan dalam sub bagian ini.

Angka kegagalan pada mahasiswa IPB dari Indonesia timur masih cukup tinggi. Kegagalan bisa disebabkan karena DO (dikeluarkan) dengan alasan IPK tidak memenuhi ketentuan IPK minimum di IPB, mahasiswa mengundurkan diri atau mahasiswa tidak aktif kuliah. Persentase kegagalan mahasiswa asal Indonesia timur di IPB adalah sebagai berikut:

**Tabel 1:** Persentase Kegagalan Mahasiswa IPB Asal Indonesia Timur

Tahun	2007	2008	2009	2012
PPU (%)	56,70	45,00	48,39	0,00
Reg (%)	30,77	0,00	11,11	22,58



**Gambar 1.** Grafik Persentase Kegagalan Mahasiswa IPB Asal Indonesia Timur

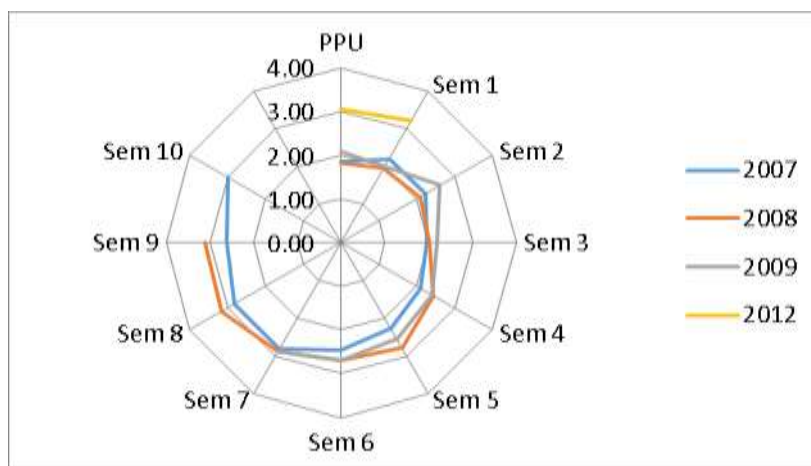
Dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase kegagalan mahasiswa pra universitas cenderung lebih tinggi dari pada mahasiswa reguler asal Indonesia timur, kecuali mahasiswa angkatan 2012. Kegagalan tertinggi terdapat pada mahasiswa program pra universitas angkatan 2007 sebesar 56,70% dan persentase terendah dicapai oleh mahasiswa reguler angkatan 2008 dan mahasiswa program pra universitas angkatan 2012. Pada angkatan tersebut tidak terdapat mahasiswa yang gagal studi (100% berhasil).

#### 4.2. PROGRAM PARA UNIVERSITAS

Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pra universitas dari tahun 2007 – 2012 sebanyak 192 orang mahasiswa. Asal mahasiswa beragam dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Rekap rata-rata IP tiap semester dari mahasiswa program pra universitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2:** Rataan IP Mahasiswa Program Pra Universitas

Jmlh Mahasiswa	97 mhs	40 mhs	31 mhs	24 mhs
Tahun	2007	2008	2009	2012
PPU	1,84	1,80	2,08	3,05
Sem 1	2,22	1,95	2,01	3,23
Sem 2	2,22	2,08	2,61	-
Sem 3	1,96	2,03	2,19	-
Sem 4	2,09	2,43	2,38	-
Sem 5	2,26	2,78	2,55	-
Sem 6	2,46	2,70	2,70	-
Sem 7	2,82	2,86	2,87	-
Sem 8	2,82	3,16	-	-
Sem 9	2,61	3,12	-	-
Sem 10	3,00	-	-	-
<b>Rataan IP per Angkatan</b>	<b>2,39</b>	<b>2,49</b>	<b>2,42</b>	<b>3,14</b>



Gambar 2. Grafik Rataan IP Mahasiswa Program Pra Universitas

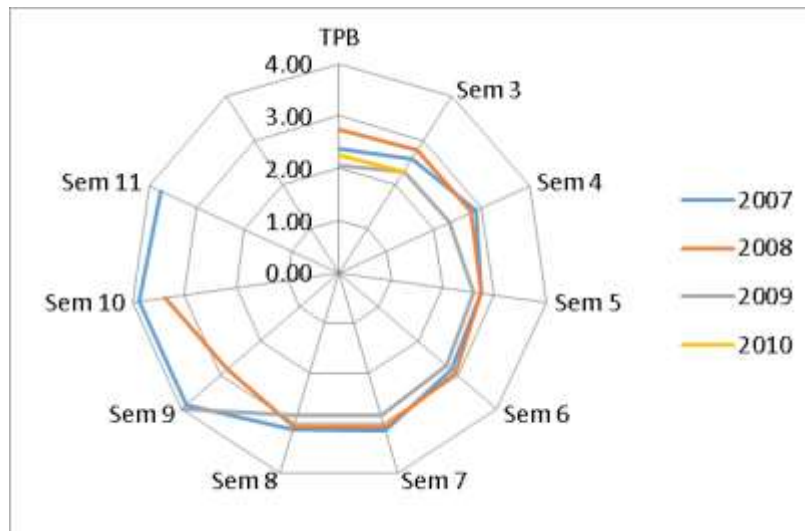
Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa seluruh angkatan mahasiswa pada program pra universitas menunjukkan rataan IP yang cenderung meningkat tiap semesternya. Hasil itu menunjukkan bahwa program pra universitas dianggap berhasil dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dari Indonesia timur. IPK terbaik untuk semester awal program pra universitas diperoleh mahasiswa angkatan 2012. Hal ini kemungkinan disebabkan karena metode seleksi pada angkatan tersebut lebih baik dibanding angkatan yang lainnya. Mahasiswa program pra universitas angkatan 2012 merupakan mahasiswa terpilih yang telah lolos seleksi di tingkat IPB maupun seleksi berjenjang di daerahnya (seleksi tingkat Kabupaten/Kota kemudian seleksi tingkat Provinsi). Sementara mahasiswa angkatan 2007, 2008 dan 2009 hanya diseleksi pada level Kabupaten/Kota saja.

#### 4.3. PROGRAM REGULER

Bagi calon mahasiswa mempunyai nilai rapor yang bagus dan berasal dari sekolah yang memiliki Performans Akademik Sekolah (PERAKS) yang bagus dapat langsung mengikuti Tingkat Persiapan Bersama pada semester 1 dan 2 tanpa mengikuti program pra universitas. Mahasiswa angkatan 2007, 2008, 2009 dan 2012 yang berasal dari Indonesia timur berjumlah 65 orang. Mereka berasal dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara barat dan Sulawesi. Rekap rataan IP tiap semester dari mahasiswa program reguler asal Indonesia timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Rataan IP Mahasiswa Program Reguler Asal Indonesia Timur

Jmlh Mahasiswa	13 mhs	12 mhs	9 mhs	31 mhs
Tahun	2007	2008	2009	2012
TPB	2,38	2,73	2,04	2,24
Sem 3	2,58	2,77	2,30	2,30
Sem 4	2,88	2,78	2,32	-
Sem 5	2,75	2,75	2,61	-
Sem 6	2,83	2,94	2,73	-
Sem 7	3,15	3,09	2,85	-
Sem 8	3,14	3,09	2,85	-
Sem 9	3,88	2,82	4,00	-
Sem 10	3,88	3,38	-	-
Sem 11	3,75	-	-	-
<b>Rataan IP per Angkatan</b>	<b>3,12</b>	<b>2,93</b>	<b>2,71</b>	<b>2,27</b>



**Gambar 3.** Grafik Rataan IP Mahasiswa Program Reguler Asal Indonesia Timur

Dari grafik tersebut terlihat bahwa mahasiswa angkatan 2007 cenderung memiliki IP semester yang lebih tinggi dibanding angkatan lainnya. Seluruh angkatan menunjukkan kecenderungan IP semester yang lebih tinggi dari mulai semester 7 ke atas.

## 5. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Tingkat kegagalan pendidikan mahasiswa dari kawasan Indonesia timur di IPB masih cukup tinggi dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor internal dari mahasiswa dan faktor eksternal.

### 5.1. FAKTOR INTERNAL MAHASISWA

Faktor internal penyebab tingginya tingkat kegagalan mahasiswa meliputi:

- Rendahnya capaian kompetensi pada saat SMA;
- *Cultural shock* (budaya, bahasa, adat istiadat, makanan dan masalah sosial lainnya);
- Kurangnya motivasi dan daya juang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik.

Beberapa hal ini sangat berperan dalam menentukan keberhasilan mahasiswa dari kawasan Indonesia timur dalam menjalani kegiatan belajar di perguruan tinggi. Meskipun program PPU sudah disusun dengan metode pemberian materi lebih intensif dibanding materi pada saat TPB, akan tetapi tanpa dukungan kompetensi awal yang baik dan tingkat motivasi yang tinggi dari mahasiswa, program ini belum dapat dilaksanakan secara efektif.

### 5.2. FAKTOR EKSTERNAL

Faktor lain adalah faktor eksternal di luar mahasiswa yang meliputi:

- Kualitas dan kuantitas guru sekolah yang masih rendah dibandingkan dengan di Pulau Jawa
- Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah asal
- Proses belajar mengajar dengan metode konvensional yang mahasiswa dapatkan di bangku sekolah.

Upaya IPB untuk memberikan dukungan dan kesempatan kepada putera puteri dari kawasan Indonesia timur mendapatkan pendidikan tinggi harus disinergikan dengan upaya memperbaiki hambatan eksternal tersebut.

## 6. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Dari beberapa masalah yang dihadapi IPB dalam melaksanakan pendidikan untuk mahasiswa dari kawasan Indonesia timur dapat dikemukakan beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:

- ❖ Untuk meningkatkan capaian kompetensi pada saat SMA dapat dilakukan bimbingan intensif mulai di tingkat SMA. Hal ini terbukti efektif untuk menyiapkan mahasiswa agar bisa melalui program TPB terutama untuk mata kuliah sains.
- ❖ Calon mahasiswa dari kawasan Indonesia timur perlu dibekali dengan pelatihan atau pendalaman bahasa Indonesia sebelum masuk perguruan tinggi atau di awal perkuliahan di perguruan tinggi untuk meminimalisasi kesenjangan bahasa pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- ❖ Selain Tim Bimbingan dan Konseling, IPB juga dapat menugaskan beberapa dosen sebagai dosen mentor khusus untuk mahasiswa dari kawasan Indonesia timur. Dosen mentor inilah yang akan mendampingi mahasiswa secara intensif untuk memantau perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa.
- ❖ Untuk mengatasi hambatan eksternal dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Indonesia timur misalnya dengan mengadakan pelatihan bagi guru-guru sekolah dan perbaikan fasilitas dan sarana prasarana sekolah.

## 7. PENUTUP

IPB akan terus berupaya untuk memberikan kesempatan bagi putra putri berprestasi dari kawasan Indonesia timur untuk menempuh pendidikan tinggi di IPB melalui berbagai cara. Salah satunya dengan penerimaan mahasiswa baru jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK). Potensi sumberdaya manusia yang cukup besar di Indonesia timur harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya sebagai modal penggerak pembangunan di daerah Indonesia timur.

Program Pra Universitas dan kegiatan pembimbingan serta pendampingan bagi mahasiswa dari kawasan Indonesia timur akan terus dilanjutkan oleh IPB. Perbaikan program senantiasa terus dilaksanakan oleh IPB demi membantu mencetak bibit-bibit unggul mahasiswa berkualitas dari kawasan Indonesia timur. Kerjasama antara IPB dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di kawasan Indonesia timur untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan terus ditingkatkan dan diperluas wilayah mitranya. Dengan hal tersebut IPB berharap dapat memberikan sumbangsih dan peran sertanya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia timur melalui sektor pendidikan tinggi.

## 8. DAFTAR PUSTAKA

1. Tim BUD IPB, 2007, 2008, 2009, 2012, *Laporan Tahunan Program Beasiswa Utusan Daerah*.
2. Tim Pra Universitas IPB, 2007, 2008, 2009, 2012, *Buku Panduan Program Pra Universitas*.
3. Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB, 2008, 2009, 2010, 2013, *TPB dalam Angka*.
4. Sekretariat Beasiswa Utusan Daerah IPB, 2011, *Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru IPB Program Sarjana, jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD)*.
5. Tim Pra Universitas IPB, 2013, *Laporan Akhir Program Pra Universitas Calon Mahasiswa BUD dari Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Akademik 2012/2013*.
6. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru IPB, 2008, 2009, 2010, 2013, *Laporan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1)*.
7. <http://www.kemeneqpd.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal>. *Daerah Tertinggal*.

## PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TERHADAP PENDIDIKAN AGRIBISNIS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KUALITAS EKONOMI PETANI

Yesi Hendriani Supartoyo<sup>1)</sup>, La Ode Muhsafaat<sup>2)</sup>  
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor<sup>1,2)</sup>  
E-mail : [yesisupartoyo77@gmail.com](mailto:yesisupartoyo77@gmail.com)<sup>1)</sup>  
E-mail : [safaat\\_corporate@yahoo.co.id](mailto:safaat_corporate@yahoo.co.id)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Peran sektor pertanian di Indonesia sangatlah penting namun dalam perjalanannya sektor pertanian dihadapkan pada sejumlah kendala sehingga mengakibatkan sektor pertanian menjadi kurang seperti yang diharapkan. Untuk mengejar ketertinggalan ini maka diperlukan upaya memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen akselerasi pembangunan pertanian khususnya dalam peranannya terhadap pendidikan agribisnis guna meningkatkan kesadaran dan kualitas ekonomi para petani. Pemanfaatan TIK dalam pola pendidikan agribisnis diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi petani mengenai agribisnis. Perubahan pola pikir dapat menimbulkan kesadaran ekonomi dengan harapan terjadi peningkatan kualitas ekonomi masyarakat petani sehingga angka kemiskinan masyarakat Indonesia pun akan menurun.

**Kata kunci:** agribisnis, kesadaran ekonomi, kualitas petani, pendidikan, pertanian, teknologi informasi dan komunikasi

### 1. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sebuah sektor yang memiliki peranan cukup penting untuk kehidupan manusia, karena merupakan sektor yang mampu menyediakan kebutuhan akan pangan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, pertanian juga merupakan salah satu sektor andalan karena mampu memberikan kontribusi bagi devisa negara serta menjadi tumpuan kehidupan masyarakat di daerah perdesaan. Menurut laporan bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik Januari 2014 yang menyatakan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sebesar 26,14 juta rumah tangga usaha pertanian (Angka Tetap Statistik 2013). Rumah tangga usaha pertanian terdiri dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, budidaya ikan, penangkapan ikan, kehutanan dan usaha jasa pertanian, dengan jumlah petani sebanyak 31,70 juta orang.

Indonesia sebagai negara berkembang hingga saat ini masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dari masyarakat tingkat berpenghasilan menengah ke bawah di Indonesia, mayoritas di dominasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Rendahnya tingkat penghasilan para petani itu diakibatkan karena tingkat perekonomian aktivitas bertani yang masih rendah. Selain faktor pola kepemilikan lahan yang masih rendah, mayoritas pendidikan para petani yang masih didominasi Sekolah Dasar (SD) terutama di daerah perdesaan juga sangat mempengaruhi kualitas dari hasil pertanian yang dihasilkan. Pembangunan sektor pertanian secara menyeluruh dan terpadu, yakni tidak hanya peningkatan produksi tetapi juga pengadaan sarana produksi, pengolahan produk, pengadaan modal usaha dan pemasaran produk secara bersama atau kerjasama dengan pengusaha. Pembangunan pertanian dengan strategi pemberdayaan agribisnis perdesaan melalui pola-pola pendidikan agribisnis secara langsung kepada petani menjadi sangat penting, untuk menghasilkan petani-petani masa depan yakni para petani yang progresif, berorientasi pasar dan jeli serta cerdas



menyiasati berbagai kendala yang ada untuk meningkatkan pendapatan usaha tani dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, pengembangan agribisnis di perdesaan merupakan pilihan tepat dan strategis untuk dapat menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat menjadi media dalam pola pendidikan agribisnis secara langsung kepada petani. Perkembangan TIK yang begitu pesat mulai dari internet, televisi, radio, *handphone* dan lain sebagainya yang telah sampai pada pelosok desa terpencil, dapat memberikan motivasi pengembangan pertanian untuk beradaptasi dalam hal pemanfaatan dan penyebaran informasi. Pola pendidikan agribisnis melalui TIK dapat mengubah pola pemikiran para petani dalam menerapkan teknologi dan teknik pertanian yang modern. Masuknya pengaruh globalisasi telah mengubah pola pendidikan sehingga lebih bersifat jejaring, terbuka dan interaktif, beragam, multi disiplin serta berorientasi pada produktivitas dan kompetitif (Wirjana 2001). Begitu pun pola pendidikan agribisnis petani sebagaimana empat pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO yaitu *learning to know, learning to do, learning to be and learning together*.

## 2. PEMBAHASAN

### Kondisi Pertanian Saat ini

Sistem pertanian yang dilakukan di Indonesia berkembang sesuai dengan pengetahuan masyarakat, mulai dari sistem pertanian berpindah-pindah, pertanian tradisional, pertanian konvensional, pertanian modern, sampai pada sistem pertanian organik yang muncul akibat kesadaran akan pangan yang sehat. Perkembangan pertanian Indonesia sebagian besar masih terpusat di Indonesia bagian barat khususnya Pulau Jawa. Sistem pertanian masyarakat Indonesia bagian timur sebagian besar masih menerapkan sistem pertanian tradisional dimana petani menggunakan prinsip hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya sekarang tanpa memikirkan kebutuhan ekonominya.

Pada sistem pertanian tradisional terdapat beberapa aspek pendekatan ekonomi antara lain:

1. Penggunaan teknologi yang belum berkembang yaitu dalam hal ini pertanian tradisional menggunakan alat atau teknologi yang masih rendah atau belum berkembang sehingga memperlambat hasil yang diproduksi dan akan membuang waktu dalam proses bercocok tanam
2. Tenaga kerja untuk pertanian tradisional biasanya lebih banyak dalam mengelola lahan pertanian untuk menghasilkan produksi, hal ini dikarenakan masih minimnya teknologi yang digunakan sehingga pelaksanaan menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Hal ini mencemrinkan bahwa pertanian tradisional masih tergantung dengan tenaga manusia.
3. Modal yang digunakan masih sedikit, karena kebutuhan yang dibuat tidak terlalu membutuhkan modal lebih serta hanya membutuhkan modal untuk pembayaran tenaga kerja dan lainnya yang rata-rata minim
4. Hasil produksi yang masih kurang terjangkau yaitu hanya sebatas untuk dikonsumsi keluarga maupun masyarakat golongan. Hal ini dikarenakan masih minimnya cara budidaya tanaman sehingga produk yang dihasilkan masih rendah.

Kemudian ciri dari pertanian tradisional yaitu masih berpaku dan berharap pada alam yang mana ketika masyarakat menanam suatu tanaman dengan pertanian tradisional maka hasilnya akan tergantung pada proses alam. Sebenarnya pertanian tradisional merupakan pertanian yang akrab lingkungan karena tidak memakai pestisida. Akan tetapi produksinya tidak mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Untuk mengimbangi kebutuhan pangan tersebut, perlu diupayakan peningkatan produksi yang kemudian berkembang sistem pertanian konvensionalnya (Pracaya 2007)

Selama periode Maret 2013 – September 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah sekitar 180 ribu orang, sementara di daerah perkotaan bertambah sekitar 300 ribu orang. Seperti kondisi Maret 2013, sebagian besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan (63,21 persen). Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sangat besar yaitu 73,43

persen. Jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebanyak 28,55 juta orang (11,47 persen) bertambah 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 28,07 juta orang (11,37 persen) (BPS 2014). Masyarakat pedesaan sebagian besar merupakan masyarakat tani. Dengan data kemiskinan yang ada memberikan gambaran bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dan kualitas hidup bagi masyarakat pedesaan, mengenai pola pertanian yang menjadi pekerjaannya, salah satunya melalui pendidikan non formal dibidang pertanian.

### **Pola Pendidikan Agribisnis Masyarakat Petani**

Agribisnis lazimnya didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan mulai proses produksi, panen, pasca panen, pemasaran dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pertanian tersebut (Soekartawi 2007). Pendidikan agribisnis bagi masyarakat petani dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal yang mereka tempuh. Semakin tinggi pengetahuan para petani pada perkembangan teknologi pertanian, dapat mendorong pada perbaikan kualitas usahatani yang dilakukan. Rogers (1988) menyatakan bahwa tingkat pendidikan petani sangat berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengadopsi inovasi dan semakin tinggi tingkat pendidikan formal petani maka akan semakin rasional dalam pola pikir dan daya abstrak dalam pengambilan keputusan usaha tani.

Strategi pembangunan pertanian menjadikan agribisnis sebagai strategi pokok khususnya di Kementerian Pertanian. Cirinya yaitu pertanian industrial dan berkelanjutan. Esensi dan karakteristik petani sendiri berkaitan erat dengan gambaran petani yang terdiri atas petani subsisten dan petani modern yang berusahatani dengan menerapkan teknologi modern serta memiliki jiwa bisnis yang sesuai dengan tuntutan agribisnis. Upaya mengubah petani dari karakter subsisten menjadi modern itulah hakekat dari pembangunan atau modernisasi (Syahyuti 2013). Pola-pola pendidikan agribisnis kepada masyarakat petani menjadi penting untuk meningkatkan pengetahuan para petani, terutama petani tradisional di daerah pedesaan. Pola pendidikan penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media elektronik merupakan salah satu solusi dalam mengubah pola pikir masyarakat petani. Kebiasaan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia Timur dalam menjalankan perubahan pola kegiatan pertanian dengan melihat contoh terlebih dahulu, menjadikan sebuah hambatan dalam mempercepat perubahan kualitas hidup masyarakat petani melalui penyuluhan secara langsung. Media Informasi seperti televisi menjadi sebuah pilihan yang tepat dalam hal penyebaran informasi mengenai pertanian-pertanian modern, dimana dengan adanya program listrik masuk desa keberadaan televisi hampir ada di setiap rumah tangga masyarakat perdesaan.

Pengembangan agribisnis perdesaan melalui pendidikan agribisnis pertanian bertujuan menjadikan petani handal atau modern yang bisa mengelola komoditas pertaniannya dari pra tanam hingga pasca panen atau pemasaran. Hampir di seluruh desa di Indonesia, para petani hanya menguasai sub-sistem produksi, sedangkan sub-sistem agribisnis lainnya seperti pengadaan sarana dan modal, pengolahan hasil, dan pemasaran masih berada diluar kendali mereka. Di dalam sub-sistem produksi pun, praktek pertanian mereka masih perlu ditingkatkan dengan penerapan teknologi pertanian yang lebih maju dan lebih produktif.

### **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Bidang Pertanian**

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. Penguasaan terhadap TIK merupakan suatu keharusan karena diyakini sebagai alat pengubah. TIK mengacu pada penggunaan pelayanan elektronik dalam proses suatu kegiatan tertentu, baik itu komputer, televisi, radio, *handphone* dan lainnya. TIK merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas baik SDM, SDA hingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nainggolan (2012) menyatakan bahwa TIK mempunyai tiga peranan pokok yaitu:

1. Instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan yaitu dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat

2. Produk dan jasa teknologi informasi merupakan komoditas yang mampu memberikan peningkatan pendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa dan produk industri telematika lainnya
3. Teknologi informasi bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengembangan sistem informasi yang mampu menghubungkan semua institusi pada area yang berbeda dan berjauhan di seluruh wilayah nusantara

Berdasarkan letaknya dalam proses penggunaan TIK, semua informasi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Sumber informasi langsung yaitu sumber informasi yang melakukan komunikasi secara langsung dengan petani menggunakan teknologi komunikasi (misalnya *Handphone*)
2. Sumber informasi tak langsung yaitu sumber informasi yang melakukan komunikasi dengan petani baik personal maupun kelompok melalui media, contohnya internet, televisi, radio dan lainnya.

Penggunaan TIK oleh masyarakat Indonesia Timur semakin meningkat dengan adanya program listrik dan jaringan komunikasi masuk desa. Ada tiga kategori penguasaan TIK oleh masyarakat petani terutama di wilayah perdesaan yaitu:

1. Petani yang dapat melakukan akses komunikasi dan informasi ke semua teknologi yang ada baik melalui internet, televisi, radio, *handphone* dan lain sebagainya.
2. Petani yang dapat melakukan akses komunikasi dan informasi pada sebagian teknologi yang ada misalnya melalui televisi, radio atau *handphone*
3. Petani yang tidak dapat melakukan akses TIK. Perbedaan kategori penguasaan TIK oleh petani disebabkan oleh tingkat pendidikan dan penghasilan masing-masing petani.

Dari ketiga kategori tersebut, sebagian besar masyarakat petani Indonesia timur melakukan akses komunikasi dan informasi pada sebagian teknologi yang ada terutama televisi, radio dan *handphone*. TIK akan semakin penting peranannya dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Secara umum bahwa masyarakat khususnya di daerah perdesaan selalu mengalami kendala dalam mendapatkan informasi yang baru dan tepat. Informasi dari media-media elektronik akan berperan sebagai pemberi informasi bagi petani menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pertaniannya, mulai dari pemeliharaan tanaman, pemberian pupuk, irigasi, ramalan cuaca dan harga pasaran. Selain memberikan informasi, teknologi informasi juga dapat membantu jalannya penyuluhan pertanian karena pada zaman sekarang tidak ada kegiatan yang tidak menggunakan teknologi walaupun teknologi hanya sekedar mencari informasi untuk diri sendiri ataupun mencari informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Sejak menggunakan teknologi sebagai media informasi bagi petani, aktivitas penyuluhan pertanian menjadi berubah. Selain dari informasi yang disampaikan menarik yang dapat menumbuhkan motivasi juga kegiatan banyak dilakukan langsung oleh petani itu sendiri sehingga menimbulkan kedisiplinan terhadap diri petani itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan program penyuluhan pertanian melalui media-media informasi yang dapat diakses masyarakat petani perdesaan baik melalui televisi, radio atau internet perlu untuk semakin ditingkatkan. Adanya *call center* mengenai penyuluhan pertanian juga dapat dijadikan media untuk tempat bertanya para petani perdesaan melalui media *handphone*. Pengambil kebijakan perlu menentukan prioritas penerapan TIK di bidang pertanian agar memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, pengambil kebijakan juga perlu membangun kemampuan untuk mengadaptasi, memelihara, melakukan penyesuaian solusi TIK yang ada agar menjawab kebutuhan di bidang pertanian.

## **Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Peningkatan Kesadaran dan Kualitas Ekonomi Petani**

Pengembangan agribisnis di perdesaan melalui pola pendidikan menggunakan TIK merupakan pilihan tepat dan strategis untuk dapat menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan. Hal ini memungkinkan karena adanya kemampuan yang tinggi dari agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja, mengingat sifat industri pertanian yang padat karya dan bersifat massal dengan berbasis pada masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian di perdesaan. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh sektor agribisnis, tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan para pelaku agribisnis terutama para petani yang kesejahteraannya masih tergolong rendah.

TIK memegang peranan penting dalam pengembangan pertanian, mulai dari pengembangan budidaya, pengembangan bisnis, kelembagaan organisasi, sampai pada percepatan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Informasi pertanian merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam produksi yang dapat mendorong ke arah pembangunan yang diharapkan. Informasi pertanian merupakan aplikasi pengetahuan yang terbaik yang akan mendorong dan menciptakan peluang untuk pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Integrasi yang efektif antara TIK dalam sektor pertanian akan menuju pada pertanian berkelanjutan melalui penyiapan informasi pertanian yang tepat waktu dan relevan, serta yang dapat memberikan informasi yang tepat kepada petani dalam proses pengambilan keputusan berusahatani untuk meningkatkan produktivitasnya. TIK dapat memperbaiki aksesibilitas petani dengan cepat terhadap informasi pasar, input produksi, tren konsumen, yang secara positif berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi mereka, sehingga dapat dicapai efisiensi produksi secara ekonomi.

Manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan aplikasi TIK (Mulyandari 2005), khususnya dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di antaranya ialah:

Mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal dan nasional.

Membuka akses petani terhadap informasi pertanian untuk: 1) Meningkatkan peluang potensi peningkatan pendapatan dan cara pencapaiannya; 2) Meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan posisi tawarnya, serta 3) Meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan diversifikasi usahatani dan merelasikan komoditas yang diusahakannya dengan input yang tersedia, jumlah produksi yang diperlukan dan kemampuan pasar menyerap output.

Mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan informasi pertanian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marjinal.

Memfasilitasi dokumentasi informasi pertanian di tingkat lokal (*indigenous knowledge*) yang dapat diakses secara lebih luas untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marjinal.

Petani perlu memanfaatkan dengan optimal teknologi-teknologi alternatif tersebut sehingga mereka tidak ketinggalan informasi dan dapat mengembangkan pertaniannya. Informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan pengembangan dalam budidaya maupun pengolahan pasca panen. Tentu saja hal yang kita harapkan ialah peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang merupakan ciri pertanian modern dapat tercapai. Pemanfaatan TIK dalam pola pendidikan agribisnis secara langsung kepada petani diharapkan dapat membangun motivasi para petani khususnya petani tradisional yang kebanyakan berada di Indonesia bagian timur, untuk mengubah pola pertanian tradisional menuju pola pertanian konvensional. Selain itu, dengan pemanfaatan media informasi juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat petani di bidang agribisnis secara keseluruhan tanpa harus melalui pendidikan formal. Perubahan pola pertanian dan peningkatan kompetensi dibidang agribisnis tersebut juga seiring dengan peningkatan kesadaran akan kehidupan ekonomi yang lebih baik dari pola pertanian sebelumnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani disertai dengan keberhasilan dalam perubahan pola pertanian dari pertanian tradisional menuju pertanian konvensional dapat berujung pada peningkatan kualitas perekonomian petani, yang akan berakibat pada penurunan angka kemiskinan masyarakat.

### 3. PENUTUP

Pemanfaatan TIK dalam pola pendidikan agribisnis melalui metode penyuluhan langsung kepada para petani dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi petani mengenai agribisnis. Peningkatan program-program siaran baik melalui siaran televisi, radio dan lain sebagainya, termasuk pengadaan *call centre* sebagai tempat komunikasi para petani khususnya masyarakat pedesaan Indonesia Timur yang masih awam akan internet, dapat dengan cepat mengubah pola pikir para petani tradisional menuju pola pikir petani konvensional atau modern. Dengan perubahan pola pikir tersebut akan timbul kesadaran ekonomi dengan harapan terjadi peningkatan kualitas ekonomi masyarakat petani, sehingga angka kemiskinan masyarakat Indonesia akan menurun.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

1. BPS., 2014, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 44 Januari*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
2. Mulyandari RSH. 2005. *Alternatif Model Diseminasi Informasi Teknologi Pertanian Mendukung Pengembangan Pertanian Lahan Marginal*. Prosiding Seminar Nasional Pemasyarakatan Inovasi Teknologi dalam Upaya Mempercepat Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan di Lahan Marginal, Mataram, 30-31 Agustus 2005.
3. Naionggolan, HL., 2012, *Kajian Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Pertanian dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Komoditi Pertanian*, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi. ISBN 978 – 602 – 19837 – 0 – 6.
4. Pracaya., 2007, *Bertanam Sayuran Organik di Kebun, Pot, dan Polybag*, Jakarta: Penebar Swadaya.
5. Rogers, EM., 1988, *Komunikasi dan Pembangunan: Memudarnya Model Dominan dalam Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial.
6. Soekartawi., 2007, *e-AGRIBISNIS: TEORI DAN APLIKASINYA*, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, Yogyakarta ISSN: 1907 – 5022.
7. Syahyuti., 2013, *Pemahaman terhadap Petani Kecil sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian*, Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 31 No. 1, Juli 2013: 15 – 29
8. Wiryana., 2001, *Source Campus Agreement: Pengenal Linux*, Jakarta: Gunadarma.

## PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN *ENTREPRENEURSHIP* LOKAL (Usulan Model Pembangunan Masyarakat Nusa Tenggara Timur)

**Edi Purwanto**

Dosen Manajemen Strategik dan Dinamika Persaingan Global  
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Bunda Mulia, Jakarta  
Email: epurwanto@bundamulia.ac.id

### ABSTRACT

Tulisan ini mengkaji bagaimana teori Weberian yang melihat hubungan budaya dan pembangunan ekonomi dapat dikembangkan untuk pembangunan ekonomi NTT. Walaupun mayoritas penduduk NTT beragama Protestan, namun etos kerja Protestan yang dilihat Max Weber sebagai pendorong pembangunan ekonomi negara-negara Protestan Barat tidak nampak bekerja dalam masyarakat NTT yang dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di provinsi tersebut. Namun dengan tetap mengacu pada teori Weberian McClelland, Bellah, Wong dan Dove, nilai-nilai agama atau budaya lokal dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di NTT. Itulah yang menjadi usulan model pembangunan bagi Nusa Tenggara Timur.

**Kata kunci:** Kemiskinan, teori modernisasi, Max Weber, weberian, pembangunan, Nusa Tenggara Timur

### 1. PENDAHULUAN

*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* adalah salah satu karya monumental Max Weber. Buku tersebut memformulasikan tesis hubungan antara nilai-nilai agama dan kultur dengan semangat kapitalisme, khususnya di kalangan masyarakat Protestan Barat. Christopher *et al* (2002:741) berkata, "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* karya Max Weber menyediakan justifikasi moral dan agama untuk akumulasi kekayaan dan kebangkitan kapitalisme." Menurut Tawney (2007:16), "Kebanyakan ilustrasi yang Weber pakai dalam tesisnya diambil dari tulisan-tulisan kaum Puritan Inggris pada paro kedua abad ke-17. Ajaran-ajaran mereka memberi Weber berbagai materi untuk mendapatkan gambaran *bourgeois* yang taat dan setia pada agamanya dan yang menjalankan bisnisnya sebagai suatu panggilan yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka yang terpilih" (Purwanto, 2013).

Tesis Max Weber tersebut didukung oleh sejumlah tokoh seperti David C. McClelland (1961), Ronald Inglehart (2006), Mariano Grondona (2006) yang menjelaskan bahwa kemajuan bangsa Protestan Barat yang lebih unggul dibandingkan khususnya dengan bangsa berbasis budaya Katolik oleh karena didukung prinsip etos kerja Protestan. Prinsip Weberian kemudian juga digunakan untuk menjelaskan etos kerja yang tidak terbatas dalam nilai-nilai Protestantism, namun etos kerja yang sama dapat ditemukan dalam agama-agama di luar Protestan seperti yang ditemukan oleh Robert N. Bellah (2008) dalam agama Tokugawa di Jepang. Slabbert *et al* (2011), Zhang *et al.* (2012), dan Leong *et al* (2013) juga menemukan bahwa nilai-nilai etos kerja yang serupa ditemukan dalam budaya *Dynamism Confucianism*. Arslan (2001), Bozkurt *et al* (2010), dan Zulfikar (2012), menemukan bahwa etos kerja yang sama ditemukan dalam Islam yang khususnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.

Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh masyarakat Kristen tidak menunjukkan adanya kemakmuran yang menjadi logika Weberian? Sebagaimana dijelaskan oleh Myers *et al* (2012), Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu dari provinsi-provinsi termiskin di Indonesia. Mayoritas penduduk NTT (80%) tinggal di daerah-daerah pedesaan dan mata pencaharian mereka sebagian besar bergantung pada pertanian. Produksi dan penyimpanan bahan makanan dan kelaparan sering terjadi di area-area pedesaan. Musim kering selama enam sampai delapan bulan pertahun, biasanya dari Mei sampai Oktober juga merupakan salah satu alasan keterbatasan utama bagi produktivitas pertanian di NTT (Myers *et al.*, 2012:135).

Kemiskinan menjadi salah satu masalah di NTT, yang mana jumlah penduduk miskin mencapai 58% pada tahun 2005 dan turun menjadi 28% pada tahun 2008 (Suwondo, 2013:84), 20,48% pada tahun 2011, 20,88% pada tahun 2012 dan 20,41% pada tahun 2013 (BPS, 2013:48).

## 2. TEORI-TEORI PEMBANGUNAN

Para ahli pendukung teori modernisasi klasik melihat perlunya modernisasi bagi negara-negara berkembang untuk dapat mencapai kemajuan seperti yang dialami oleh negara-negara maju dengan menapaki jalan yang sama yang pernah dilalui oleh negara-negara maju. Untuk mencapai tujuan tersebut ada proses yang harus dilalui oleh negara-negara berkembang, misalnya; (1) Rostow melihat modernisasi merupakan proses bertahap, kemudian (2) Levy melihat bahwa modernisasi itu juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi, (3) modernisasi terkadang mewujudkan dalam bentuk lahirnya proses *Eropanisasi* atau *Amerikanisasi* atau melalui proses dan tahapan modernisasi yang sama dengan Barat; (4) suatu proses yang bergerak maju dan merupakan perubahan progresif serta memerlukan waktu yang panjang. Dalam rangka mencapai status modern tersebut, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus digantikan dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern atau Barat (Suwarsono & So, 2006:21-23).

David McClelland berpendapat bahwa kaum wiraswastawan domestiklah dan bukan para politikus dan para penasihat ahli yang didatangkan dari negara maju yang memegang peran kritis dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kemajuan negara berkembang (Dunia Ketiga). "Kegiatan para wiraswastawan tersebut bukan hanya sekedar mencari dan mengumpulkan laba," namun "keinginan yang kuat untuk mencapai prestasi gemilang yang dikerjakannya melalui penampilan kerja yang baik, dengan selalu berpikir dan berusaha untuk menemukan cara-cara baru untuk memperbaiki kualitas kerja yang dicapainya" (Suwarsono & So, 2006:23). Dengan demikian McClelland tidak mendukung prinsip-prinsip yang diusulkan oleh para ahli teori modernisasi klasik di atas.

Robert N. Bellah yang menggunakan prinsip Weberian mencoba mengamati kaitan antara agama Tokugawa dengan pembangunan ekonomi di Jepang menemukan nilai-nilai atau etos kerja seperti kerja keras, *asceticism* dan investasi yang ada dalam agama Tokugawa baik melalui pranata politik maupun pranata keluarga yang telah membawa pembangunan ekonomi di Jepang (Suwarsono & So, 2006:36-41). Sama halnya dengan McClelland, Bellah tidak mendukung homogenisasi atau *Eropanisasi* atau *Amerikanisasi* atau *Westernisasi* ("*Protestanisasi*") seperti yang dianjurkan oleh para ahli teori modernisasi klasik di atas. Sebaliknya Bellah justru melihat nilai-nilai "lokal" atau "domestik" dan bukan "Barat" atau "Protestan" yang menyimpan etos kerja yang dapat menjadi pemacu pembangunan ekonomi Jepang.

Demikian juga halnya dengan Wong Siu-Lun yang menolak saran dari para penganut modernisasi klasik untuk membuang jauh-jauh sistem nilai yang ada pada pranata keluarga Cina jika Cina hendak mempromosikan pembangunan (Suwarsono & So, 2006:58). Max Weber pernah menulis buku yang berjudul "*Konfuzianisme und Taoisme*" (1915) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1951 dengan judul *The Religion of China: Confucianism and Taoism*. Dalam buku tersebut Weber memfokuskan pada aspek-aspek masyarakat Cina yang berbeda dari Eropa Barat dan Puritanisme, dan mengajukan pertanyaan mengapa kapitalisme tidak berkembang di Cina (Purwanto, 2013:15). Mengapa kapitalisme tidak muncul di Cina? Jawaban umum Weber adalah bahwa kendala sosial, struktural, dan religius di Cina mencegah berkembangnya kapitalisme (Ritzer *et al* 2008:164). Sebaliknya, Wong justru melihat bahwa pranata keluarga Cina yang paternalistik, patrimonialis dan mode pemilikan keluarga atas usaha membantu keberhasilan usaha etnis Tionghoa di Hong Kong. Wong tidak melihat pranata keluarga Cina sebagai faktor penghambat pembangunan, dan justru sebaliknya pranata keluarga tradisional tersebut akan mampu membentuk etos ekonomi dinamis (Suwarsono & So, 2006:58-60).

Michael R. Dove mencoba untuk melihat interaksi antara kebijakan pembangunan nasional Indonesia dengan aneka ragam budaya lokal yang ada di Indonesia. Tanpa ragu-ragu Dove menyatakan bahwa tradisional tidak harus dimaknai sebagai keterbelakangan dan budaya tradisional

sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat setempat di mana budaya tradisional tersebut melekat. Oleh sebab itu bagi Dove budaya tradisional selalu mengalami perubahan yang dinamis dan tidak mengganggu proses pembangunan (Suwarsono & So, 2006:62).

### 3. ETOS KERJA MENURUT WEBERIAN

Kembali ke fokus pembahasan, karena sebagian Kabupaten/Kota NTT mayoritas penduduk Protestan, maka masuk akal untuk membahas tentang kemungkinan nilai-nilai modernisasi Eropa dan Amerika Serikat atau Barat yang mencapai kemajuan mereka oleh karena peran etos kerja Protestan dalam perspektif Weberian. Dari perspektif para ahli teori modernisasi klasik kemajuan negara berkembang akan didukung dengan disingkirkannya nilai-nilai “tradisional” atau “lokal” atau “domestik” dengan menggantikannya dengan nilai-nilai “modern” atau “Barat” (Protestanisme). Dalam kasus NTT yang mayoritas berpenduduk Protestan tersebut, apakah itu artinya bahwa nilai-nilai modern sudah tertanam dalam masyarakat tersebut? Sebelum lebih jauh menghubungkan nilai-nilai pembangunan Barat (etos kerja Protestan) dengan pembangunan di NTT, lebih dahulu perlu untuk membahas etos kerja Protestan menurut teori Weberian.

Menurut Zang *et al.* (2012) *Protestant Work Ethic* (PWE) adalah suatu konsep multidimensional. Dengan menggunakan Skala PWE yang dikembangkan oleh Mirels dan Garrett (1971) dengan sample yang diambil dari para mahasiswa di Taiwan, Tang (1993) mengembangkan empat faktor dari PWE, yaitu: kerja keras, motif internal, asketikism, dan sikap terhadap perilaku bermalasan atau bersenang-senang (*leisure*). Dengan menggunakan skala yang sama, McHoskey (1994) merepresentasikan empat faktor, yaitu: sukses, asketikisme, kerja keras, dan *anti-leisure*. Wentworth dan Chell (1997) menemukan lima faktor yang muncul, yaitu tidak menyalakan waktu (*person's use of time*), memandang rendah perilaku santai (*disdain for leisure*), kerja keras, upah kerja, dan merendahkan kemalasan (*disdain for indolence*). Arslan (2001) menemukan lima faktor, yaitu: bekerja sebagai tujuan akhir itu sendiri, kerja keras membawa kesuksesan, menghemat uang dan waktu, *internal locus of control*, dan sikap negatif terhadap perilaku santai (*negative attitudes to leisure*) (Purwanto, 2013:18).

Analisis faktor yang dilakukan Bozkurt (2010) atas 19 skala yang dikembangkan oleh Mirels dan Garrett (1971) tersebut terbentuk dalam 5 dimensi PWE dengan faktor-faktor berikut ini:

Faktor 1: *Effort* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: orang yang gagal dalam pekerjaannya biasanya karena kurang cukup berusaha dengan keras; kebanyakan orang menghabiskan banyak waktu untuk kesenangan-kesenangan yang tidak bermanfaat; masyarakat akan memiliki banyak masalah bila orang-orangnya memiliki banyak waktu untuk bersantai; kebanyakan orang yang tidak berhasil dalam hidupnya hanya karena malas; hidup akan memiliki sangat sedikit arti bila kita tidak pernah menderita; merasa gelisah ketika ada sedikit pekerjaan untuk dilakukan.

Faktor 2: *Hard Work* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: jika seseorang cukup bekerja keras, itu akan membuat kehidupan yang baik bagi dirinya sendiri; ketidaksukaan untuk bekerja keras biasanya merefleksikan kelemahan karakter; orang yang dapat mengerjakan tugas yang tidak menyenangkan dengan antusias adalah orang yang akan menjadi yang terdepan; bekerja keras menawarkan jaminan sukses; seseorang yang mampu dan mau bekerja keras memiliki kesempatan yang baik untuk sukses; dan ada kepuasan dengan menyadari suatu pekerjaan telah dilakukan dengan usaha terbaik.

Faktor 3: *Saving* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: uang yang diperoleh dengan mudah (misalnya melalui judi atau spekulasi) biasanya dihabiskan secara tidak bijak dan menggunakan uang pinjaman bukan untuk kebutuhan investasi (misalnya kartu kredit) adalah tiket menghabiskan uang secara ceroboh



(4) Faktor 4: *Asceticism and Independence from Others* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: seseorang ingin lebih sukses maka ia harus mau mengorbankan kesenangan-kesenangan tertentu; seorang yang berusaha membuat diri sendiri kaya lebih etis dibandingkan seseorang yang dilahirkan dalam kekayaan; mata pelajaran di perguruan tinggi yang paling sulit biasanya berubah menjadi yang paling berharga.

(5) Faktor 5: *Anti-leisure* dengan indikator-indikator seperti berikut ini: hidup akan lebih bermakna jika seseorang tidak memiliki banyak waktu luang dan orang yang memiliki lebih banyak waktu luang untuk dihabiskan dalam relaksasi akan membawa hidupnya tidak bermakna atau mengalami masalah.

Jones (1997) menggambarkan model Weber tentang etos kerja tersebut bahwa (1) ada korelasi antara *personal asceticism* dengan *religious beliefs* yang mana keduanya mempengaruhi etika Protestan; (2). Etika Protestan tersebut akan menyebabkan anggotanya untuk bekerja keras (*hard work*), memanfaatkan waktu dengan baik (*use of time*), kebiasaan menabung (*saving*), meningkatkan kreativitas dan inovasi (*innovation*) dan menjunjung kejujuran (*honesty*), (3) yang mana kelima faktor tersebut akan mendatangkan berkah dari Tuhan, yaitu kekayaan (*Devine reward/wealth*) bagi yang menjalankannya.

Apakah nilai-nilai etos kerja Protestan sebagaimana dijelaskan di atas telah tertanam dengan baik dalam masyarakat NTT yang mayoritas Protestan? Kalau benar demikian bukankah mereka sudah memiliki modal menuju pembangunan sebagaimana dipikirkan oleh para ahli teori pembangunan modernisasi klasik? Lalu jika teori para ahli pembangunan modernisasi klasik tersebut sah, mengapa NTT bahkan justru masih terdaftar sebagai salah provinsi termiskin di Indonesia? Apakah teori Max Weber yang tidak sah? Atau teori para ahli modernisasi klasik yang tidak sah? Atau nilai-nilai Protestanisme belum sepenuhnya tertanam dalam masyarakat NTT? Semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan menarik untuk direnungkan!

#### 4. TESIS WEBER TIDAK BEBAS DARI TEBA RUANG DAN WAKTU

"Teba ruang dan waktu menyangkut di mana (tempat) dan kapan (waktu) sebuah teori itu berlaku" (Ihalauw, 2008:149). Menurut Ihalauw (2008) teori Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme tampaknya relevan untuk budaya-budaya Barat, namun tidak tampak di beberapa daerah di Indonesia di mana pemeluk agama Kristen Protestan relatif dominan, dan bahkan justru kemiskinan amat kentara (Ihalauw, 2008:149).

Data pada *NTT dalam Angka 2013* menunjukkan bahwa beberapa Kabupaten/Kota di NTT mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan, misalnya Sumba Barat 57,784 %, di Sumba Timur 81,354%, di Kupang 87,102%, di Timor Tengah Selatan 82,219%, di Alor 66,395%, di Rote Ndao, 92,228%, di Sumba Tengah 88,285%, dan di Kota Kupang 61,081 %. Di Timor Tengah Utara dan Belu presentase jumlah penduduk Protestan menempati peringkat kedua. Di Lembata, Flores Timur, Shika, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat dan Nagekeo penduduk Protestan adalah minoritas (BPS, 2013:171).

Presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota yang berpenduduk mayoritas Protestan, misalnya di Sumba Barat sebesar 29,61 %, di Sumba Timur 30,35%, di Kupang 20,13%, di Timor Tengah Selatan 27,53%, di Alor 20,06%, di Rote Ndao, 29,11%, di Sumba Tengah 32,1%, dan di Kota Kupang 9,41 %. Dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di mana Protestan bukanlah penduduk mayoritas, Kabupaten yang mayoritas Protestan memiliki presentase kemiskinan lebih tinggi. Misalnya di Flores Timur di mana penduduk Protestan minoritas presentase kemiskinannya hanya 9,14 % (BPS, 2013:440).

Antara jumlah mayoritas penduduk Protestan dan fakta kemiskinan di NTT memunculkan kembali pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Apakah etos kerja Protestan tidak bekerja di NTT? Atau apakah tesis Weber tidak relevan pada kasus di NTT? Mengapa bisa terjadi? Atau ada hal lain yang perlu disoroti selain hanya berfokus pada etos kerja, misalnya kondisi-kondisi yang memediasi etos kerja tersebut menuju kapitalisme atau kemakmuran?

Menelusuri lebih jauh tesis Weber tentang etos kerja Protestan dan semangat kapitalisme ada beberapa kondisi yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi etos kerja Protestan menuju pembangunan ekonomi masyarakat Barat menjadi penting di sini.

Weber melihat ideologi Puritanisme sebagai landasan pembentuk etos kerja Protestan. Buku *Christian Directory* karangan seorang pendeta Puritan yang bernama Richard Baxter dari Inggris banyak menjadi rujukan Weber dalam *The Protestant Ethic and Spirit Capitalism* khususnya dalam penekanannya tentang etos kerja yang didorong oleh ideologi Puritanisme. Jonathan Edwards, seorang pengkhotbah Puritan dan Benjamin Franklin sebagai tokoh Protestanisme disebut-sebut sebagai tokoh yang mempengaruhi etos kerja Protestan di antara masyarakat Amerika Serikat.

Seorang Puritan dari Inggris, Wooldridge meringkaskan ajaran Baxter tentang bekerja dan sikap terhadap kekayaan seperti berikut ini: Pertama, pengajaran Baxter tentang bekerja adalah bahwa pekerjaan bagi seorang Kristen adalah suatu panggilan Tuhan, dan oleh sebab itu, (a) Orang Kristen harus memiliki suatu panggilan Tuhan dalam hidupnya, (b) Orang Kristen harus dengan hati-hati memilih panggilannya, (c) Orang Kristen harus bekerja keras dalam memenuhi panggilannya, entah ia seorang tuan tanah atau hamba atau pedagang. Kedua, pengajaran Baxter tentang kekayaan adalah bahwa; (a) kekayaan adalah upah bagi mereka yang rajin bekerja, (b) namun harus diingat bahwa kekayaan juga merupakan suatu bahaya bagi keselamatan, (c) kekayaan adalah sebuah talenta yang seharusnya tidak digunakan untuk hal-hal yang salah (misalnya untuk berjudi, berfoya-foya, atau menikmati kesenangan duniawi), namun kekayaan harus digunakan untuk investasi, kekayaan harus digunakan dengan sehemat mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, dan kekayaan harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan positif (Wooldridge, 1958: 44-51).

Apakah ciri-ciri itu hanya ditemukan dalam Puritanisme? Ini pertanyaan yang menarik. Karena menurut Daniel Bell ketika masyarakat pasca-industri meninggalkan dan bahkan menentang prinsip Puritanisme, etos kerja Protestan telah digantikan oleh hedonisme (Bell, 1978). Temuan penelitian Arslan (2001), Bozkurt *et al* (2010), dan Zulfikar (2012) menunjukkan menurunnya dukungan masyarakat Protestan terhadap PWE di Inggris, Amerika Serikat dan Australia pasca-industri, sementara di sisi lain justru ditemukan meningkatnya dukungan masyarakat Muslim Turki dan Kyrgyztan terhadap etos kerja (PWE) di atas dukungan masyarakat Protestan itu sendiri. Oleh sebab itu, karakteristik Puritanisme secara khusus menjadi pendorong etos kerja Protestan.

Selanjutnya dapat dilihat apakah karakteristik Protestanisme NTT menunjukkan Puritanisme? Kalau dilihat dari sudut pandang latar belakang pendidikan teologi pendeta di gereja-gereja *arus utama* di NTT, sebagian besar berasal dari perguruan tinggi teologi pendukung teologi modern, neo-orthodoks atau bahkan liberal, yang merupakan kebalikan dari karakteristik Puritanisme. Semangat inkulturasi Protestanisme ke dalam budaya dan adat lokal juga mencolok dari tulisan-tulisan para teolog atau pemimpin agama Protestan *arus utama* di Indonesia pada umumnya maupun di NTT. Sehingga Prabowo mengatakan bahwa validitas tesis Weber pada provinsi atau kota/kabupaten di Indonesia, yang memiliki umat Kristen mayoritas atau signifikan masih sumir. Etika Protestan tampak kalah bersaing dengan faktor-faktor lain. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya upaya gereja dalam inkulturasi di masyarakat setempat membuat gereja kurang kritis terhadap nilai adat setempat (Suara Pembaharuan, 14 Maret 2009). Kuatnya peran adat dan norma-norma "agama suku" di NTT dibandingkan Protestanisme nampak dalam sejumlah hasil penelitian terdahulu (Sayogyo, 1994, Sitorus & Weka, 1994, Iskandar & Djoeroemana, 1994, Soetarto, 1994, Soemardjo, 1994).

Namun demikian dengan mendasarkan pada pemikiran Weberian, Palekahelu menemukan adanya hubungan antara agama suku *Marapu* dalam mendorong para pengikutnya untuk bekerjasama dan bekerja keras untuk mempertahankan kehidupan dalam masyarakat NTT. Palekahelu menjelaskan "jika kerja keras dan hidup hemat kelompok Calvinist terkait dengan nilai panggilan atau *calling*, maka dalam agama suku *Marapu*, nilai-nilai positif ini lebih terkait dengan nilai solidaritas dan saling menolong. Mereka harus bekerja keras agar dapat menolong dirinya sendiri dan sesamanya. Agama menjadi pengikat atau sumber identitas yang menguatkan mereka dalam bertindak bersama (Polletta and Jasper, 2001, Palekahelu, 2010: 251-252). Jika "agama lokal"

*Marapu* dapat menjadi pendorong etos kerja dari perspektif Weberian, dan jika pengaruh *Marapu* lebih kuat dari Protestanisme, maka dengan mengacu pada penelitian ala Weberian oleh Robert N. Bellah bahwa agama Tokugawa menjadi pendorong etos kerja masyarakat Jepang, dan penelitian Slabbert *et al* (2011), Zhang *et al.* (2012), dan Leong *et al* (2013) yang menemukan bahwa nilai-nilai etos kerja ditemukan dalam budaya *Dynamism Confucianism* atau Arslan (2001), Bozkurt *et al* (2010), dan Zulfikar (2012) yang menemukan bahwa etos kerja ditemukan dalam masyarakat Islam, maka *Marapu* juga dapat digali dan dijadikan pendorong etos kerja masyarakat NTT untuk bangkit dari kemiskinan menuju kemakmuran.

Masyarakat di mana etos kerja Protestan dan semangat kapitalisme bertumbuh adalah masyarakat industri dan komersil. Weber (1968) menjelaskan bahwa di Baden, Bavaria, Hungaria sementara orang-orang lebih cenderung tetap bekerja dalam dunia kerajinan mereka (menjadi *craftman master*), orang-orang Protestan lebih tertarik bekerja di pabrik-pabrik untuk mengisi posisi-posisi administratif. Di Jerman keterlibatan orang Katolik sangat kecil dalam kehidupan bisnis yang merupakan kebalikan Protestanisme (Weber, 2007:44-45). Menurut Weber “keterlibatan yang lebih besar dari orang-orang Protestan pada posisi-posisi kepemilikan dan manajemen dalam kehidupan ekonomi modern bisa dipahami secara sederhana sebagai suatu akibat dari kekayaan material yang lebih besar yang telah mereka warisi” (Weber, 2007:44). Menurut Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Weber, orang-orang Protestan Inggris telah berkembang pesat daripada bangsa-bangsa lain di dunia dalam tiga hal, yaitu: spiritualitas, perdagangan dan kebebasan (Weber, 2007:44).

Perbedaan lain antara masyarakat Katolik dan Protestan pada zaman itu menurut Weber adalah bahwa jika orang-orang Katolik ingin “tidur enak”, sebaliknya orang-orang Protestan ingin “makan enak” (Weber, 2007:47). Yang pertama didorong oleh keinginan *leisure*, sementara yang kedua memotivasi untuk kerja keras. Bekerja di bidang industri dan perdagangan membutuhkan ungkapan ingin “makan enak.” Sementara ungkapan “tidur enak” tidak dapat mendukung pekerjaan di bidang tersebut.

Modal sosial menjadi penting dalam kebangkitan kapitalisme Protestan di Amerika Serikat. Dalam pengamatan Weber (1946) jaringan yang dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan dalam satu denominasi gereja, misalnya gereja-gereja Baptis di Amerika Serikat, menjadi jaminan kerja dan akses kepada modal. Berada di luar jaringan berarti terputus dari akses kepada pekerjaan atau modal yang didominasi oleh denominasi tersebut (Weber, 2009:362-366).

Dari beberapa penjelasan Weber di atas dapat dilihat gambaran struktur sosial yang mengkondisikan etos kerja Protestan memimpin kepada pembangunan dan kemakmuran masyarakat Protestan. Beberapa hal yang dapat dilihat sebagaimana terimplikasi dalam penjelasan Weber tersebut adalah: (1) Masyarakat Protestan pada umumnya menekuni pekerjaan di bidang industri dan bisnis dan perdagangan; (2) jenis pekerjaan tersebut menuntut kerja keras, memanfaatkan waktu dengan baik dan investasi; (3) jenis pekerjaan tersebut membutuhkan akses kepada modal untuk investasi (misalnya warisan atau pinjaman); (4) dalam jenis pekerjaan tersebut modal dapat terakumulasi secara cepat yang terus diinvestasikan kembali secara terus menerus, (5) jaminan kebebasan menjadi sangat diperlukan untuk dapat memperlancar pekerjaan tersebut. Itulah prinsip kapitalisme.

Apakah struktur sosial semacam itu ditemukan dalam masyarakat Protestan di NTT? Secara keseluruhan orientasi ekonomi beberapa desa masih sangat bersifat subsisten, yaitu hanya untuk kepentingan konsumsi rumah tangga. Menurut Sitorus dan Weka (1994), sifat subsisten ekonomi itu dengan sendirinya adalah indikator kemiskinan karena merupakan fungsi dari produktivitas kegiatan usaha tani dan non-usaha tani yang rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan rendah. Kemiskinan dalam perspektif masyarakat desa (kasus di Kabupaten Ende) senantiasa dikaitkan dengan pertanian, kesehatan, kepemilikan dan kekuasaan. Miskin dalam perspektif masyarakat desa digambarkan dengan ungkapan *kuru tuu fau samba* (tanah kering dan tandus) atau *lolo tolo tobo pare dere mera* (tanaman terserang hama dan penyakit). Sementara konsep kemakmuran digambarkan dengan ungkapan *tedo tembu wesa wela* atau *gaga boo kewi ae* (tanah subur), *jawa dup aria pare wole bewa* (tanaman berhasil), *peni nge wesi nuwa* (ternak berkembang

biak), *tebo mae ro lo mae leko* (sehat walafiat), *sao ria tenda bewa* (rumah besar), *wiwi ria lema bewa* (berkuasa), dan *poke nge wela dero* (kemampuan ekspansi tanah) (Sitorus dan Weka, 1994:43). Perekonomian desa yang masih bersifat agraris dan subsisten dengan sistem ladang berpindah-pindah yang bersifat eksploitatif dan tidak taat pada azas konservasi mengarah pada pemiskinan tanah yang pada gilirannya juga mengarah pada pemiskinan penduduk yang menggantungkan ekonomi mereka pada tanah itu (Sitorus dan Weka, 1994:54).

Kemiskinan dalam perspektif masyarakat di Kabupaten Sumba Barat juga berkaitan pertanian dan peternakan. Miskin dalam istilah masyarakat Sumba Barat adalah *mila* atau *mila-jana* dan orang miskin disebut *tau mila* atau *ata mila*. Rumah tangga yang tidak memelihara kuda atau kerbau, ayam dan atau babi, serta tidak mengusahakan tanah akan dikatakan sebagai rumah tangga miskin. Rumah tangga yang sama sekali tidak mempunyai ternak dan tidak menggarap tanah tergolong rumah tangga yang teramat miskin (*mila-jara*) (Iskandar & Djoeroemana, 1994:66-67).

Menurut Sayogyo (1994) kehidupan penduduk di empat kabupaten (Kupang, Timor Tengah Selatan, Ende dan Sumba Barat) masih bertumpu pada sektor agraris, dengan produktivitas tanah pertanian yang tergolong rendah. Selain itu mereka tidak memiliki motivasi dan inisiatif untuk berusaha dan kurang mampu menangkap peluang ekonomi yang tersedia. Bahkan di Kupang, penduduk yang mencari nafkah di luar pertanian dengan merantau dinilai oleh masyarakat sebagai orang miskin karena kepergian mereka disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan ladang yang tersedia (Sayogyo, 1994:127).

Kurangnya penguasaan teknologi bagi para petani untuk mengembangkan pertanian. Pengembangan tanaman perdagangan tidak memberikan hasil yang optimum untuk peningkatan pendapatan petani, khususnya pada studi kasus di Wonda oleh Sitorus dan Weka (1994) karena (1) petani belum menguasai teknologi budidaya dan teknologi paska panen secara memadai, (2) petani belum memiliki sikap bisnis yang memadai, (3) petani mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian mereka karena kurang memiliki informasi harga dan masalah transportasi yang tidak mendukung.

Lembaga Riset SMERU menjelaskan bahwa pembangunan di provinsi NTT belum mengikuti pola umum perkembangan perekonomian, di mana peranan sektor pertanian mulai digantikan oleh sektor industri dan jasa. Sektor industri di NTT tidak mengalami perkembangan berarti sehingga sektor ini tidak berperan dalam mengurangi kemiskinan di sektor pertanian. Perkembangan sektor jasa juga masih terlalu kecil dan cenderung rapuh karena tidak didukung oleh sektor industri yang menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian (SMERU, 2006:9).

Sekalipun etos kerja dimiliki masyarakat Atoni Pah Meto di NTT seperti dijelaskan oleh Elias dalam disertasinya tentang etos kerja masyarakat NTT, namun mereka tetap bergantung pada ekonomi subsisten. Jadi masyarakat NTT masih lebih menggantungkan hidup mereka pada pertanian dan peternakan dan ekonomi subsisten. Musim kemarau yang panjang (8 bulan) menyebabkan pertanian juga tidak produktif. Pekerjaan-pekerjaan mereka bersifat subsisten atau hanya untuk menyambung hidup. Jenis pekerjaan tersebut tidak menuntut kerja keras sepanjang waktu sebagaimana dalam bidang bisnis, industri dan perdagangan, karena selama musim kemarau tidak banyak yang dapat dilakukan selain memelihara ternak mereka. Untuk pekerjaan jenis ini waktu banyak terbuang dengan sia-sia, sehingga akumulasi modal tidak terjadi, karena hasil pertanian hanya cukup untuk sekedar menyambung hidup. Selain karena kurang mampu untuk berbisnis atau berdagang atau membuka industri, akses kepada modal juga merupakan kesulitan lain bagi mereka. Mereka juga membutuhkan modal sosial yang dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan (misalnya dalam denominasi gereja mereka) dan tentu juga perlunya modal finansial tersedia di dalam jaringan tersebut.

Perbandingan di atas menunjukkan adanya perbedaan kondisi struktur sosial antara keduanya. Ada struktur sosial yang memfasilitasi keberhasilan kapitalisme dalam masyarakat Protestan di Eropa maupun Amerika Serikat yang tidak dimiliki oleh masyarakat NTT. Itulah sebabnya etos kerja Protestan Weberian tidak nampak bekerja dalam masyarakat NTT yang mayoritas Protestan sekalipun.

## 5. USULAN MODEL PEMBANGUNAN DI NTT

Mengacu pada pemikiran McClelland, membangkitkan motivasi wiraswastawan lokal NTT menjadi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya menggantungkan pada pertanian dan peternakan. Mereka harus mulai mengembangkan masyarakat untuk menyadari masih ada hal lain atau peluang lain yang dapat mereka kerjakan yang akan mendatangkan kemakmuran selain hanya melalui pertanian atau peternakan, yaitu industri yang dalam kasus NTT semakin merosot daripada maju, dan juga perdagangan. Karena luas wilayah terbesar NTT bukan daratan, namun lautan, Suwondo (2013) juga pernah mengusulkan agar pembangunan NTT tidak terlalu ditekankan hanya pada pengembangan bidang pertanian atau paradigma daratan, namun juga kelautan. Posisi strategis wilayah laut yang berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste dan Papua New Guinea, NTT dapat mengembangkan diri dan berkomunikasi secara regional, karena menurut Ghani dan Lockhart (2008) kemajuan negara di era globalisasi belakangan ini akan terjadi bila negara tersebut mampu membangun relasi positif dengan negara lain dalam konteks regional. Sehingga menurut Suwondo (2013) posisi strategis tersebut tidak mengharuskan NTT sangat bergantung pada Pusat (Jakarta) dalam membangun komunikasi regional dalam perdagangan dan industri yang menjanjikan kemajuan bagi NTT (Suwondo, 2013:82).

Sebagai Provinsi dengan 81% wilayah laut dan hanya 19% wilayah daratan, dengan memiliki 674 pulau dan 242 pulau yang “belum bernama,” sebagai wilayah kepulauan “dilihat dari segi pariwisata maka banyaknya pulau-pulau tersebut dapat menjadi zona turisme yang eksklusif dan menjanjikan” (Suwondo, 2013:82). Suwondo juga mengatakan bahwa “adanya laut yang cukup luas memungkinkan pengembangan produksi kelautan yang juga bermacam-macam” (Suwondo, 2013:82).

Misi ketiga dari delapan misi Provinsi NTT 2014-2018 adalah “memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal” (<http://nttprov.go.id/new/index.php/2014-03-13-05-53-28/2014-03-13-23-33-53/visi-misi>). Bila misi ini dapat berjalan dengan baik sepanjang periode perencanaan tersebut maka diharapkan peningkatan kualitas angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, revitalisasi institusi ekonomi dan peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat dapat terwujud menuju pembangunan NTT.

Pengalaman Atlantic Canada dalam pengembangan *entrepreneurship* dapat menjadi contoh yang mungkin dapat diterapkan dalam pembangunan *entrepreneurship* di NTT. Pada tahun 1988, Canada adalah negara berkembang pertama yang menerapkan kebijakan nasional untuk masalah *Entrepreneurship*. Mempertimbangkan peran krusial yang dimainkan oleh *entrepreneurship* dan pendirian perusahaan-perusahaan baru dalam pembangunan regional, ekonomi dan sosial Canada, maka pemerintahan federal menggariskan kebijakan untuk mempromosikan semangat budaya *entrepreneurial* dan meningkatkan efektivitas dari dukungan pemerintah untuk *entrepreneurship* (OECD, 1996).

Atlantic Canada berpenduduk 2.4 juta jiwa; 45% penduduk tinggal di area pedesaan. Angka pengangguran adalah yang paling tinggi di Canada dan wilayah ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah, bantuan dari pemerintah pusat (*federal transfer payments*) dan *resource-based industries*. Pada bulan Juni 1987, Pemerintah Federal/Pusat mendirikan *Atlantic Canada Opportunities Agency* (ACOA) untuk menggantikan kebijakan pembangunan regional sebelumnya dan melaksanakan mandat pembangunan ekonomi dari Pemerintah Pusat untuk diterapkan di Atlantic Canada. Canada memiliki penduduk 29.8 million, 62% penduduk tinggal di provinsi Canada pusat, misalnya di Ontario (11 juta) and Quebec (7.4 juta). Empat provinsi di Atlantic Canada seluas 195,000 mil persegi, kira-kira seluas wilayah Francis atau 5% dari area Canada. Pada 1 Januari 1996, 2.4 juta orang hidup di wilayah ini, atau 8.1% dari total penduduk Canada. Kebanyakan penduduknya hidup di area pedesaan atau kota kecil di Atlantic Canada (45%), ketika 25% penduduk Canada hidup di area pedesaan. Pertumbuhan penduduk di Atlantic Canadian lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan penduduk secara nasional. Ketika tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional 49.7% sepanjang periode 30 tahun antara 1961 sampai 1991, peningkatan populasi Atlantic Canada

meningkat hanya 22.4%. Faktor-faktor yang mendukung ini termasuk di dalamnya tendensi penduduk Atlantic Canada yang bermigrasi ke wilayah Canada lainnya yang lebih makmur dan imigrasi ke provinsi-provinsi Canada yang lebih besar (OECD, 1996).

Program pendidikan dan pengembangan *entrepreneurship* lokal di Atlantic Canada sukses membawa pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Pendidikan *entrepreneurship* ditanamkan mulai dari pendidikan dasar dan menengah dengan pengembangan kurikulum. Pendidikan juga disiarkan melalui media-media, seperti radio dan majalah. Hasilnya adalah bahwa 95% bisnis di Atlantic Canada adalah *SMEs* yang memiliki karyawan kurang dari 100 karyawan dan hampir 75% dari bisnis-bisnis ini memiliki karyawan kurang dari lima karyawan. Total jumlah bisnis terus bertumbuh dengan cepat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di tingkat nasional. Sepanjang periode tahun 1989 -1993, jumlah perusahaan-perusahaan kecil di wilayah ini meningkat sekitar 4.5% dibandingkan peningkatannya secara nasional, yaitu hanya 0.1%. Pertumbuhan yang paling kuat adalah kategori yang paling kecil (yang memiliki karyawan kurang dari 20 karyawan). Lebih dari 80% lapangan kerja baru secara konsisten dilahirkan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan kira-kira 60% lapangan kerja baru di Atlantic Canada dilahirkan oleh bisnis-bisnis baru yang baru dimulai dalam periode tahun 1980-1989. Dari tahun 1980-89, hampir 75% jaringan *new jobs* di sektor pasar (tidak termasuk sektor publik) diciptakan dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki kurang dari 5 karyawan, dan kebanyakan dari bisnis ini masih baru dan masih sangat muda dan perusahaan-perusahaan besar (dengan lebih dari 500 karyawan) mulai kehilangan "*jobs*". Total jumlah bisnis di Atlantic Canada pada periode tahun 1980-1989 bertambah 55% dari 55, 919 menjadi 86,314. Riset terbaru di sejumlah negara-negara OECD menunjukkan bukti yang kuat bahwa ada korelasi positif antara formasi-formasi bisnis baru dan pertumbuhan ekonomi (OECD, 1996).

Melihat pengalaman pembangunan *entrepreneurship* yang sukses di Atlantic Canada dapat menjadi pelajaran menarik untuk melihat kemungkinan pembangunan NTT melalui pendidikan dan pengembangan *entrepreneurship* lokal.

Mengacu pada pemikiran Bellah, jika nilai-nilai etos kerja Protestanisme memang kurang nampak dalam masyarakat NTT untuk mendorong pembangunan, maka nilai-nilai etos kerja lokal yang ditemukan dalam *Marapu* oleh Palekahelu (2010) atau etos kerja yang ditemukan Eliasar dalam masyarakat Atoni Pah Meto dapat dikembangkan menjadi pendorong atau pemberi motivasi kerja dan pembangunan sebagaimana agama Tokugawa telah mempengaruhi pembangunan ekonomi di Jepang. Apakah nilai-nilai tersebut bersifat umum di seluruh wilayah NTT? Jika demikian dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pembangunan masyarakat NTT secara luas. Atau apakah nilai-nilai tersebut hanya ada di beberapa wilayah NTT? Jika demikian nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pendorong pembangunan masyarakat setempat dan mencari kemungkinan nilai-nilai serupa dalam masyarakat lainnya sebagai pendorong demi terwujudnya pembangunan NTT.

Mengacu pada pemikiran Bellah dan Wong tentang bagaimana agama Tokugawa telah membangun pranata politik dan keluarga untuk selanjutnya menjadi pendorong pembangunan Jepang (Bellah) dan bagaimana pranata keluarga Cina di Hong Kong telah mempengaruhi pembangunan ekonomi di Hong Kong (Wong), maka pranata-pranata keluarga yang mungkin ada dalam masyarakat NTT dapat dikembangkan untuk memfasilitasi pembangunan NTT.

Menurut Sayogyo (1994) ada pranata sosial yaitu persekutuan hukum adat di NTT yang didasarkan pada prinsip hubungan kekerabatan (persekutuan hukum genealogis) dengan istilah yang berbeda antara satu dengan lainnya (*wewah* di Ende; *kabisu* di Sumba Barat; *kanaf* di Kupang dan Timor Tengah Selatan). Ikatan kekerabatan tersebut menjadi basis yang kuat dari suatu mekanisme tolong-menolong antarsaudara dalam rangka mewujudkan cita-cita yang sama. Di sana juga terdapat tolong menolong antarkerabat untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan tinggi dan keberhasilan si anak kelak menjadi keberhasilan seluruh keluarga (Sayogyo, 1994:155-156). Sehingga "tidak dapat dipungkiri bahwa dari daerah yang "miskin" telah lahir sejumlah putra-putri terbaik yang berkecimpung di berbagai bidang, seperti di pemerintahan, ekonomi, dunia akademik dan

berbagai bidang professional lainnya. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator akan adanya potensi daerah yang memberikan harapan masa depan NTT” (Kameo, 2003:31).

## 6. KESIMPULAN

Walaupun nilai Protestanisme telah lama tertanam di NTT, namun nilai-nilai etos kerja Protestan yang menurut Max Weber dan Weberian telah menjadi faktor yang mempengaruhi negara-negara Barat (Protestan) tidak nampak bekerja dalam pembangunan masyarakat NTT. Sehingga mengacu pada teori modernisasi pembangunan McClelland, Bellah, Wong dan Dove, pembangunan NTT yang berbasis pada nilai-nilai lokal untuk memacu kebangkitan para *entrepreneur* lokal dapat diusulkan. Nilai-nilai etos kerja dalam *Marapu* atau budaya lokal lainnya di NTT dapat dikembangkan untuk mendorong semangat kerja, investasi dan akumulasi modal dalam bisnis dan industri demi kemakmuran NTT, sebagaimana dijelaskan oleh Bellah bahwa nilai-nilai lokal dalam agama Tokugawa yang mampu mempengaruhi pembangunan ekonomi Jepang. Pranata sosial persekutuan kekerabatan saling tolong menolong dapat dikembangkan untuk menjadi jaringan untuk membangun masyarakat NTT sebagaimana dijelaskan oleh Wong nilai-nilai kekerabatan dalam pranata keluarga Cina mendorong jaringan dan keberhasilan bisnis keluarga-keluarga di Hong Kong. Kekhasan budaya di NTT mungkin berbeda dengan budaya di wilayah-wilayah lain di Indonesia, namun mengacu pada teori Dove kekhususan budaya lokal NTT dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan NTT.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ (2006). “Tantangan Pembangunan di Nusa Tenggara Timur” *The SMERU Research Institute*. No. 20: Oct-Dec/2006
- Arslan, M. (2001)., “The Work Ethic Values of Protestant British, Catholic Irish and Muslim Turkish Managers” in *Journal of Business Ethics*, 31, 321-339.
- Badan Pusat Statistik, 2013. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2013. *Nusa Tenggara Timur dalam Angka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bellah, Robert N (2008). *Tokugawa Religion: The Cultural Roots of Modern Japan*. Free Press; 2 edition.
- Bell, Daniel (1978). *The Culture Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books.
- Bozkurt, Veysel, and Nuran Bayram, and Adrian Furnham, and Glenn Dawes (2010). “The Protestant Work Ethic and Hedonism Among Kyrgyz, Turkish and Australian College Students” in *Drust. Istraz. Zagreb God.* 19, 749-769.
- Christopher, Andrew N. and Jones, Jason R (2002), “How is the Protestant Work Ethic Related to the Need for Cognition? A Factor Analytic Answer” in *Social Behavior and Personality*; 30, 8.
- Grondona, Mariano (2006). “Tipologi Budaya dari Pembangunan Ekonomi” dalam *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, editor: Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington. Jakarta: LP3ES.
- Ihalauw, John JOI (2008). *Konstruksi Teori: Komponen dan Proses*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Inglehart, Ronald (2006). "Budaya dan Demokrasi" dalam *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, editor: Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington. Jakarta: LP3ES.
- Iskandar, Margaharta and Siliwoloe Djoeroemana (1994). "Kemiskinan dan Pembangunan: Kasus Kabupaten Sumba Barat" dalam *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, editor, Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kameo, Daniel Daud (2003). *Rekonstruksi Model Pembangunan Wilayah Berdasarkan Pendekatan Empirik: Pengalaman Daerah Nusa Tenggara Timur*. Salatiga: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Leong, Frederick T. L., and Jason L. Huang, and Stanton Mak (2013). "Protestant Work Ethic, Confucian Values, and Work-Related Attitudes in Singapore" in *Journal of Career Assessment*.
- McClelland, David C. (1961). *The Achieving Society*. New York: The Free Press.
- Myers, Bronwyn, Penny Wurn, Dharma Palekahelu, Gomer Liufeto, Jubhar Mangimbulude, Marthen Kapa, Rohan Fisher. 2012. "Aspects of Food Production and Access to Water Resources: A Case Study at a Village in West Timor." *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Kritis*. Vol. XXI, No. 2, Mei-Agustus 2012, p. 134-154.
- Mirels, H. L., & Garrett, J. B. (1971). "The Protestant Ethic As a Personality Variable" in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 36, 40-44.
- OECD, (1996). *The Implementation of an Entrepreneurship Development Strategy in Canada: The Case of the Atlantic Canada*. Canada: Organization for Economic Cooperation and Development in cooperation with Atlantic Canada Opportunity Agency.
- Palekahelu, Dharmaputra T., (2010). Marapu : Kekuatan di Balik Kekeringan Potret Masyarakat Wunga Kabupaten Sumba Timur Propinsi NTT.
- Prabowo, Ronny (2009). "Antara Kupang, Weber, dan Huntington" *Suara Pembaharuan*, 14 Maret 2009.
- Purwanto, Edi (2013). "Korelasi Antara Protestant Work Ethic (PWE) dengan Chinese Work Ethic (CWE) di Kalangan Kaum Muda Tionghoa Protestan" *Jurnal Manajemen*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Vol. 10 No. 1, p. 11-44.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman (2008). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sayogyo (1994). *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sitorus, M. T. Felix dan Alexander Weka (1994). "Kemiskinan dan Pembangunan: Kasus Kabupaten Ende" dalam *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, editor, Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetarto, Endriatmo (1994). "Kemiskinan dan Pembangunan: Kasus Kabupaten Kupang" dalam *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, editor, Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



- Soenardjo (1994). "Kemiskinan dan Pembangunan: Kasus Kabupaten Timor Tengah Selatan" dalam *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, editor, Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suwondo, Kutut (2013). "Dinamika Pemerintahan Lokal di Nusa Tenggara Timur dalam Mewujudkan Paradigma "Anggur Merah", *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Kristis*, Vol. XXII, No. 1, Januari-Juni 2013.
- Swarsono, dan Alvin Y. So (2006). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Weber, Max (2007). *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Yogyakarta: Penerbit Jejak.
- Weber, Max (2009). *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wooldridge, D. R., 1958. "Richard Baxter's Social and Economic Teaching" in *A Goodly Heritage*. The Puritan Conference, Tyndale Fellowship for Biblical Research at Westminster Chapel.
- Zhang, Suchuan, and Weiqi Liu, and Xiaolang Liu (2012). "Investigating the Relationship Between Protestant Work Ethic and Confucian Dynamism: An Empirical Test in Mainland China" in *Journal of Business Ethics*, 106:243–252
- Zulfikar, Yavuz Fahir (2012). "Do Muslims Believe More in Protestant Work Ethic than Christians? Comparison of People with Different Religious Background Living in the US" in *Journal of Business Ethics*, 105:489–502.

## ALTERNATIF MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK INDONESIA TIMUR

**Margo Purnomo**

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Padjadjaran  
E-mail : [nurpurnomo@yahoo.com](mailto:nurpurnomo@yahoo.com)

### ABSTRAK

*Pendidikan kewirausahaan (PK) tidak menjanjikan dapat menghasilkan wirausaha sukses, namun PK dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi wirausaha sukses. Ini berarti PK berpotensi untuk menghasilkan wirausaha baru yang berkontribusi pada pemberdayaan personal maupun sosial. Berdasarkan Systematic Literature Review (SLR), ada tiga fokus tema sekaligus dimensi alternatif model PK, yaitu kebijakan untuk pelaksanaan PK, konteks PK, dan konten pengajaran kewirausahaan. Berdasarkan hasil SLR tersebut selanjutnya dibuat usulan model PK untuk Indonesia Timur. Ada tiga tantangan yang dipertimbangkan. Pertama, PK di Indonesia Timur tidak bisa berdiri sendiri. Efektivitasnya melibatkan banyak stakeholder serta kebijakan yang mendukung dan selaras dengan sistem pendidikan secara keseluruhan sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kedua, konsep kewirausahaan saat ini sudah berkembang dalam berbagai konteks. Karena itu harus memperhatikan pertanyaan “untuk apa”, “siapa”, “kapan”, “dimana”, dan “sampai mana” PK diselenggarakan?. Jawaban atas kelima pertanyaan tersebut akan mengarahkan pada tantangan ketiga, yaitu “apa saja”, “bagaimana”, dan “siapa sebaiknya” yang memberikan pengajaran kewirausahaan. Jawaban atas tantangan ketiga menuntut pendidik kewirausahaan untuk lebih entrepreneurial. Dalam hal ini pengajar dituntut menggunakan pendekatan yang inovatif, contingency, lintas bidang studi, berbasis pengalaman, berorientasi aksi, serta lebih memperhatikan tantangan, peluang, dan potensi sumber daya yang tersedia ketika mengajar kewirausahaan. Usulan selanjutnya berkenaan dengan konteks PK di Indonesia Timur. Di sini Penulis sangat memperhatikan potensi pemuda, wanita, sumber daya alam, dan putera daerah. Potensi tersebut merupakan sumber daya untuk mempromosikan program PK dalam konteks rural entrepreneurship. Karena itu, usulan ini juga sebaiknya memperhatikan dasar-dasar kerangka kerja rural entrepreneurship yang sesuai dengan tipologi pedesaan di Indonesia.*

**Kata kunci:** kewirausahaan, model pendidikan kewirausahaan, tinjauan sistematis

### 1. PENDAHULUAN

Globalisasi, krisis ekonomi yang berulang-ulang, perubahan demografi, munculnya nilai-nilai baru, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran akan pentingnya berwirausaha. Kewirausahaan diyakini sebagai konsep yang memberikan solusi untuk menciptakan kesuksesan bagi seseorang, bahkan kesejahteraan dan pertumbuhan bagi sebuah masyarakat atau negara. Karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia berusaha meningkatkan jumlah wirausahawan dengan cara memberikan perhatian pada PK. Karena meningkatnya jumlah wirausaha berpotensi untuk menarik investor, mengurangi pengangguran, pemberdayaan, daya saing serta meningkatkan nilai sumber daya lokal.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa PK berkontribusi pada pemberdayaan pemuda (Adegun & Komolafe, 2013), pembangunan wilayah *rural* (Khan, et al, 2012; Paull & Scharma, 2013), pembangunan regional dan pertumbuhan ekonomi (Chanhming, 2008; Harrington, 2008; dan pemberdayaan wanita (Kalyani & Kumar, 2011). Karena itu, hampir setiap lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia saat ini melibatkan kewirausahaan dalam kurikulumnya. Bukan hanya ditingkat perguruan tinggi namun dari jenjang TK, pendidikan dasar, serta menengah, kewirausahaan sudah mulai dikenalkan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman dan keterampilan untuk berwirausaha. Para lulusan *entrepreneurial* ini diharapkan dapat lebih kompetitif dan *survive* dalam lingkungan saat ini yang sangat kompetitif dan turbulen.

Dorongan terhadap pentingnya PK di Indonesia menyebabkan munculnya aneka inovasi dalam PK. Walaupun perhatiannya meningkat, namun sementara ini PK di Indonesia masih dinilai kurang efektif (Priyanto, 2012). Hal ini terindikasi dari adanya kesenjangan antara maraknya PK dengan jumlah wirausaha yang ada, yaitu baru 0.18% dari total penduduk. Berdasarkan pengamatan Penulis, ada beberapa fenomena di lapangan yang masih menjadi kendala efektivitas PK, yaitu:

1. Penelitian terhadap efektivitas PK masih relatif sedikit. Akibatnya, para pendidik yang nyaman dengan pendekatan pengajaran yang dipergunakan dalam PK cenderung kurang mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pendekatannya efektif atau gagal, dan mengapa pendekatannya tersebut efektif atau gagal.
2. Model PK yang sedang berlangsung umumnya belum memperhatikan karakteristik sumber daya lokal, demografis, dan geografis. Akibatnya, lulusan sekolah atau universitas tidak 'mengimani' peluang dan potensi sumber daya di daerahnya. Ini menyebabkan urbanisasi dan meningkatnya angka kemiskinan khususnya di daerah pedesaan. Rendahnya entrepreneur di pedesaan menyebabkan rendahnya produktivitas, pendapatan, upah, serta sedikitnya tabungan dan investasi di daerah.
3. Manajemen PK belum memiliki *action plan* yang disepakati bersama. Hal ini menyebabkan PK cenderung tidak strategis dan dukungan *stakeholder* yang rendah.

PK memang memerlukan pendekatan keilmuan multi disiplin seperti heterogennya kewirausahaan dan para wirausahawan. Secara teoritis memahami kewirausahaan berarti melibatkan berbagai latar belakang keilmuan karena makna kewirausahaan saat ini semakin meluas dan kompleks. Munculnya konsep baru dalam kewirausahaan seperti *intrapreneurship*, *social entrepreneurship*, *technopreneurship*, *rural entrepreneurship*, *feminist entrepreneurship*, dan *minority entrepreneurship*, menunjukkan bahwa kewirausahaan saat ini menuntut tidak sekedar diartikan sebagai berbisnis, berdagang, membuka perusahaan, atau dari sudut pandang ekonomi saja. Walaupun makna kewirausahaan meluas namun kenyataannya PK sering dipraktikkan sebagai berbisnis atau berdagang. Hal ini nampak dari materi, praktik atau penugasan yang diberikan kepada siswa/mahasiswa dalam bidang studi kewirausahaan. Contoh lainnya adalah ketika mengundang tokoh entrepreneur sukses, biasanya yang diundang adalah entrepreneur sukses dibidang bisnis. Keadaan tersebut menjadi dasar pemikiran Penulis untuk berusaha memberikan usulan tentang model PK dalam perspektif baru. Karena itu perlu dilakukan penelusuran sistematis tentang model PK terbaru agar diperoleh pandangan tentang aspek apa saja yang sebaiknya terlibat dalam model PK yang cocok untuk saat ini. Temuan ini dapat menjadi alternatif rujukan bagi para penyelenggaraPK, khususnya untuk memberikan usulan tentang alternatif model PK di Indonesia Timur.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Pendidikan Kewirausahaan

PK pertama kali diselenggarakan di program MBA, Universitas Harvard, Amerika, pada Februari 1947, dengan peserta sebanyak 188 mahasiswa (Lorz, 2011). Lalu berkembang ke Eropa (Pittaway & Cope, 2006; Dodescu & Badulescu, 2010; Zhou & Xu, 2012). Para ahli menemukan bahwa menyelenggarakan PK akan berpengaruh signifikan pada *entrepreneurial intention* (Hamidi et al., 2008; Kalyani & Kumar, 2011). PK tidak menjanjikan dapat menghasilkan wirausaha sukses, namun PK dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi wirausaha sukses. Ini berarti PK berpotensi untuk menghasilkan wirausaha baru yang berkontribusi pada pemberdayaan personal maupun sosial.

Fayolle et al (2006) menjelaskan bahwa PK adalah "*any pedagogical programme or process of education for entrepreneurial attitudes and skills, which involves developing certain personal qualities*". Berdasarkan pengertian ini, PK tidak diartikan sempit sebagai pendidikan dalam konteks menciptakan perusahaan baru, atau berbisnis. Selanjutnya, berdasarkan tujuan penyelenggaraannya, Linan (2004) membagi PK dalam empat kategori. Pertama, *Entrepreneurial Awareness Education*. Pada kategori ini PK bertujuan untuk meningkatkan niat berwirausaha dengan cara memperbanyak pengetahuan tentang kewirausahaan dan mempengaruhi perilaku peserta.

Kedua, *Education for Start-Up*. PK di sini ditujukan untuk peserta yang sudah siap dengan ide berwirausaha dan siap menjadi wirausahawan. Ketiga, *Education for Entrepreneurial Dynamism*. Yaitu pendidikan untuk para wirausahawan yang ingin meningkatkan kewirausahaannya. Dan keempat, *Continuing Education for Entrepreneurs*. PK di sini mengajak peserta belajar sepanjang hayat dan mempelajari pengalaman-pengalaman entrepreneurialnya.

## 2.2 Model Pengajaran Kewirausahaan

Neck & Green (2011) memandang bahwa saat ini perlu ada pendekatan baru dalam pengajaran kewirausahaan. Untuk itu Neck & Green (2011) membuat ringkasan tentang model-model pengajaran kewirausahaan yang dapat diselenggarakan. Dalam PK biasanya melibatkan salah satu atau beberapa model pengajaran kewirausahaan berikut:

- a. *The Entrepreneur World*. Model pengajaran ini lebih menitikberatkan pada kepribadian wirausahawan sebagai *super hero*. Peserta diajak untuk mengidentifikasi profil karakter yang dimiliki oleh wirausahawan sukses. Pengajar lalu mendeskripsikan tentang kepribadian wirausahawan seperti pengendalian diri, toleransi terhadap ketidakpastian, kecenderungan untuk mengambil resiko, dan hasrat untuk berprestasi.
- b. *The Process World*. Model pengajaran menitikberatkan pada penciptaan perusahaan baru. Peserta diajak untuk membuat perencanaan dan memprediksi atas ide entrepreneurial yang dimiliki. Pengajar memberikan arahan tentang pembuatan rencana bisnis, analisis kasus, dan model bisnis.
- c. *The Cognition World*. Model pengajaran ini menitikberatkan pada bagaimana mengidentifikasi peluang entrepreneurial dan mengelola pengetahuan sebagai sumber daya berwirausaha. Pengajar memberikan metode-metode pengambilan keputusan dalam aktivitas entrepreneurial.
- d. *The Method World*. Metode ini menitikberatkan pada praktik berwirausaha. Praktik disesuaikan dengan konteks kewirausahaan yang akan dialami. Pengajar bertugas mengajak peserta untuk merefleksikan praktik dan eksperimen yang telah dilakukan.

Saat ini belum ada kesepakatan tentang metode terbaik mengajarkan kewirausahaan (Pittaway & Cope, 2006). Tetapi jika melihat model di atas maka pendekatan pengajaran kewirausahaan yang baik akan tergantung pada tujuannya. Lourenco & Jones (2006) menjelaskan bahwa permasalahannya bukan tentang metode apa yang terbaik tetapi pengajar harus mampu mengenali fungsi dan keunggulan setiap metode pengajaran. Dengan demikian pengajar dapat mengkolaborasikan metode yang cocok dengan kebutuhan di lapangan. Berikut adalah beberapa metode yang direkomendasikan: *experiential learning* (Daly, 2001), *mentoring* (Stewart & Knowles, 2003), *technology based simulations* (Hindle, 2002), dan *skills based courses* (Uljin et al., 2004).

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian disini adalah studi kualitatif dengan SLR. Dalam penelitian kewirausahaan, SLR penting guna mengurangi fragmentasi dengan cara memberikan perbedaan atau hubungan antara satu literatur dengan literatur lainnya, memberikan gambaran tentang kerangka tematis tertentu secara holistik, serta dapat memberikan arahan atau gagasan baru untuk ditindaklanjuti secara empiris (Pittaway et al., 2008). Prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam SLR adalah transparan, jelas, fokus dan seragam (Thorpe et al., 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut, secara praktis SLR selaras dengan harapan SENANTI 2014 yaitu tidak sekedar berfikir tetapi juga dapat memberikan wawasan kedepan dan menghasilkan gagasan yang ditawarkan terkait pendidikan sehingga dapat memberikan masukan dalam rangka mengembangkan kualitas pendidikan terutama di kawasan Indonesia Timur. Untuk itu, berikut adalah penjelasan tentang tahapan SLR yang dilakukan.

*Tahap Pertama*, memilih tema. Sub tema yang dipilih dalam SENANTI 2014 adalah Meningkatkan Pendidikan Kesadaran Ekonomi, dengan topik yang dipilih yaitu Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan. *Tahap Kedua*, mengembangkan alternatif dan menentukan ide kajian tematis. Targetnya adalah menemukan tema yang dapat merangsang wawasan kedepan guna mengembangkan kualitas

pendidikan kewirausahaan. Kajian tematis SLR yang diputuskan adalah '**model pendidikan kewirausahaan**'. Tahap Ketiga, Pencarian dan pemilahan literatur. Pencarian dilakukan dengan menggunakan Google. Memanfaatkan Google dalam SLR sebelumnya dilakukan juga oleh Idrees et al. (2013). *Keywords* yang digunakan dalam pencarian dengan Google adalah '**entrepreneurship education models**'. Hasil pencarian pada tanggal 18 April 2014 menampilkan 387 literatur paling relevan dengan *keywords* versi Google. Ditelusuri dari 'o' ke 1 sampai 'o' ke 39 atau halaman layar ke 1 sampai 39. Selanjutnya dipilah literatur yang relevan dan cocok dengan kajian tematis yang diputuskan. Berdasarkan pada Idrees, et al. (2013) hasil tahap ketiga ditampilkan dalam Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Tahap Pencarian dan Pemilahan Literatur\***

	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3
Deskripsi	Pencarian literatur yang relevan	Pemilahan literatur yang relevan **	Pemilihan literatur karya ilmiah yang cocok dengan tema
Jumlah temuan	387	164	56

\*Tabel di adaptasi dari Idrees, et al. (2013)

\*\*Pemilahan dibatasi dari tahun 2003-2014

Tahap Keempat, Pengelompokan. Pada tahap ini, literatur karya ilmiah yang cocok dibuat gambaran umumnya dan dikelompokkan berdasarkan persamaan fokus kajian (*thematic focus*). Tahap Kelima, pembahasan. Tahap ini merupakan penjelasan terhadap hasil temuan SLR.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil

Tabel 2 di bawah ini adalah deskripsi umum literatur yang cocok menjadi referensi model PK. Berdasarkan Tabel 2 nampak adanya tren yang meningkat pada PK selama 10 tahun terakhir. Sebanyak 81,82% atau 44 literatur merupakan publikasi karya ilmiah berupa jurnal, makalah seminar, dan disertasi. Sisanya sebanyak 11 literatur atau 18,18% merupakan laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Dari 55 publikasi terpilih, penulis berasal dari 29 negara. Perhatian tertinggi dilakukan oleh pemerhati PK dari negara-negara di Eropa, sedangkan publikasi terbanyak dilakukan oleh pemerhati dari Amerika Serikat, yaitu 9 publikasi. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa pendekatan penelitian yang dilakukan dalam 28 penelitian PK relatif sebanding, yaitu 13 penelitian kuantitatif (46,43%) dan 10 penelitian kualitatif (35,71%). Jika dihubungkan dengan adanya peningkatan tren perhatian dalam satu dekade terakhir, maka ini mengindikasikan bahwa PK merupakan bidang penelitian baru yang sedang berkembang.

Berdasarkan temuan diatas, selanjutnya Penulis membagi fokus tema model PK. Penulis mengelompokkan dalam tiga fokus tema, yaitu kebijakan untuk pelaksanaan PK, konteks PK, dan konten pengajaran kewirausahaan. Tabel 3 merupakan pembagian fokus tema terhadap 55 literatur yang digunakan dalam tinjauan sistematis ini.

**Tabel 2. Gambaran Umum Literatur Model Pendidikan Kewirausahaan**

No	Kategori	Sub-Kategori	Jumlah	Persentase
1	Jenis Literatur	Jurnal	32	58.18%
		Makalah/Prosiding Seminar	10	20.00%
		Laporan Lembaga Pemerintah/Swasta	11	18.18%
		Disertasi	2	3.64%
2	Tahun	2003-2005	6	10.91%
		2006-2008	13	23.64%
		2009-2011	16	29.09%
		2012-2014	20	36.36%

3	Asal Negara Peneliti/ Penulis	Asia	11	20.00%
		Amerika	11	20.00%
		Afrika	10	18.18%
		Eropa	22	40.00%
		Tidak Dijelaskan	1	1.82%
4	Bentuk Laporan	Penelitian	28	50.91%
		Non-Penelitian	27	49.09%
5	Jenis Penelitian	Kuantitatif	13	46.43%
		Kualitatif :	10	35.71%
		Kualitatif-Kuantitatif (2Tahap)	5	17.86%

**Tabel 3. Pembagian Fokus Tema Literatur Model Pendidikan Kewirausahaan**

Fokus Tema	Sub Fokus Tema	Jumlah	Rujukan
Kebijakan Untuk Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan	Kebijakan Strategis	12	Awasthi, 2012; Ogundele & Abiola, 2006; Zhou & Xu, 2012; Fan et al., 2013; ACE Initiative Development Committee, 2009; Cooney & Murray, 2008; Pittaway & Cope, 2006; Ramanigopal, et al., 2012; Aspen Youth Entrepreneurship Strategy Group, 2008; Kaijage & Wheeler, 2013; Edelman, et al., 2008; Lefebvre & Collot, 2012.
	Kebijakan Teknis	8	Dragusin & Balalia, 2010; Babwah, 2012; Klerk & Dippenaar, 2003; Todorov & Papazov, 2009; Streeter & Jaquette, 2004; Kailer, 2006; Kefalas, et al., 2012; Williamson, et al, 2013;
Konteks Pendidikan Kewirausahaan	Pendidikan Kewirausahaan Dalam Konteks <i>Business Entrepreneurship</i>	6	Ras & Pretorius, 2007; Fitriati, 2012; Soare, 2008; Larsen & Nagel, 2013; Weber et al., 2009; Charney & Libecap, 2005.
	Pendidikan Kewirausahaan Dalam Konteks <i>Non-Business Entrepreneurship</i>	8	Calvert, 2011; Frazier et al., 2011; EACA, 2012; Cranwell et al., 2005; Dodescu & Badulescu, 2010; Marques & Albuquerque, 2012; Huber et al., 2012; Koivumaa, 2012.
Konten Pengajaran Kewirausahaan	Pendekatan Pengajaran Kewirausahaan	10	Neck & Green, 2011; Otuya et al., 2013; Wee, 2004; Priyanto, 2012; Painter, 2007; Honig, 2004; Rasmussen & Sørheim, 2006; Mansor & Othman, 2011; Arasti, et al., 2012; White, et al., 2011;
	Penilaian Kebutuhan	4	Hamidi et al., 2008; Muofhe & Toit, 2011; Kalyani & Kumar, 2011; Lorz, 2012.
	Penyusunan Kurikulum	1	Onojetah & Amiaya, 2013;

	Media Pengajaran	2	Gelderen & Verduyn, 2003; Allegra et al, 2013
	Evaluasi Pengajaran	4	Antonciq et al, 2007; Graevenitz et al, 2010; Borchner & Park, 2011; Leino et al., 2009

#### 4.2 Pembahasan

Eropa dan Amerika menjadi kiblat kewirausahaan sebagai bidang studi dan apa saja yang ditekankan dalam PK (Zhou & Xu, 2012). Ini karena PK pertama kali dipromosikan di Amerika, lalu ke berkembang ke Eropa. Di Amerika umumnya kewirausahaan dipandang sebagai *growth-oriented ventures*. Karena itu PK kiblat Amerika menekankan pada keterampilan membangun, membiayai, dan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Sedangkan di Eropa, kewirausahaan sering disandingkan dengan usaha kecil dan menengah, karena itu PK kiblat Eropa lebih menekankan pada keterampilan manajemen usaha kecil dan menengah. Selain itu, tujuan utama PK di Eropa adalah mengembangkan kapasitas dan pemikiran untuk berwirausaha guna mendukung aktivitas sehari-hari di rumah dan di masyarakat baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas komersial. Sementara di Asia dan Afrika, PK cenderung dipengaruhi oleh pemikiran tentang kewirausahaan dan model PK di Amerika dan Eropa. Walaupun begitu, kewirausahaan umumnya dipandang sebagai menciptakan atau membangun perusahaan. Selanjutnya Penulis membahas tentang temuan fokus tema.

##### a. Kebijakan untuk pelaksanaan pendidikan kewirausahaan

Kebijakan disini terdiri dari 2 sub fokus tema, yaitu kebijakan strategis dan kebijakan teknis. **Pertama**, kebijakan strategis. Ini berkenaan dengan kerangka kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dan *stakeholder* untuk membangun kondisi yang mendukung terhadap PK guna menumbuhkan wirausaha baru di suatu negara atau wilayah. Secara umum diketahui bahwa tidak efektifnya PK disebabkan oleh kurangnya evaluasi terhadap PK, rendahnya dukungan infrastruktur, dan PK masih sebagai *“isolated island”*. Tabel 4 berikut ini adalah pendapat-pendapat strategis yang penting dipertimbangkan para pengambil kebijakan untuk mengembangkan PK.

**Tabel 4. Pendapat Strategis Terhadap Pendidikan Kewirausahaan**

<b>A</b>	<b>Pendapat Strategis Umum</b>
1	Membuat sistem pendidikan kewirausahaan sejak pendidikan dasar sampai universitas
2	Memberikan dukungan finansial dan infrastruktur yang memadai
3	Membangun kolaborasi antara sekolah/universitas, institusi bisnis, masyarakat, dan pemerintah
4	Meningkatkan penelitian dan perbaikan yang berkelanjutan
5	Mengurangi hambatan latar belakang budaya, pendidikan, gender, dan usia
6	Mempromosikan kewirausahaan sebagai pilihan karir
7	Melakukan evaluasi pendidikan kewirausahaan secara berkala
8	Membangun lingkungan sosial, politik, dan budaya yang mendukung perilaku berwirausaha
9	Meningkatkan <i>technology literacy</i> dalam berwirausaha
<b>B</b>	<b>Pendapat Strategis Khusus</b>
1	Membangun Fakultas Kewirausahaan (Cooney & Murray, 2008; Fan et al, 2013)
2	<i>Entrepreneurial teacher for entrepreneurship education</i> (Fan et al, 2013)
3	Membangun legitimasi politis (Lefebvre & Collot, 2012)
4	Restorasi moral wirausahawan (Ogundele & Abiola, 2006)
5	Meningkatkan peran wanita dan daerah <i>rural</i> (Ogundele & Abiola, 2006)
6	Ketidakcocokan antara praktik berwirausaha dengan materi kewirausahaan pada buku-buku <i>textbook</i> (Edelman, et al., 2008)

Sub fokus tema **kedua** adalah kebijakan teknis, yaitu berkenaan dengan manajemen penyelenggaraan PK. Manajemen yang dapat dijalankan diantaranya adalah *Objectives-Curriculum-Evaluation* (Babwah, 2012; Kailer, 2006); program kolaborasi sekolah/universitas-perusahaan-masyarakat/*market* (Dragusin & Balalia, 2010; Klerk & Dippenaar, 2003; Williamson, 2013; Todorov & Papazov, 2009); *Magnet Vs Radiant Program* (Streeter & Jaquette, 2004); dan *Flying-Faculty Model* (Kefalas et al., 2012).

**b. Konteks pendidikan kewirausahaan**

Fokus tema kedua ini ada dua sub fokus, yaitu PK dalam konteks *business entrepreneurship* dan PK dalam konteks *non-business entrepreneurship*. Pada sub fokus tema kedua, ditemukan ada enam konteks PK, yaitu *social entrepreneurship education* (Calvert, 2011), *rural entrepreneurship education* (Frazier et al., 2011), *food entrepreneurship education* (Cranwell et al., 2005), *woman entrepreneurship education* (Dodescu & Badulescu, 2010), *early & youth entrepreneurship education* (Marquez & Albuquerque, 2012; Huber et al., 2012; EACA, 2012), dan *engineering entrepreneurship education* (Koivumaa, 2012). Temuan ini menjadi indikasi bahwa kewirausahaan saat ini berkembang ke berbagai sektor dengan karakteristiknya yang khusus. Hal ini berdampak pada berkembangnya model PK dengan gaya yang lebih spesifik, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, ahli dari Irlandia bernama Thomas Cooney dan Trudie Murray memperkenalkan diri dari institusi yang khusus memberikan perhatian pada *minority entrepreneurship*.

**c. Konten pengajaran kewirausahaan**

Fokus tema ini berkaitan dengan proses belajar dan mengajar kewirausahaan. Ada lima sub fokus tema, **pertama**, pendekatan pengajaran kewirausahaan. Pada sub tema ini umumnya para ahli mengkritisi proses belajar dan mengajar konvensional yang bersifat satu arah, atau *top-down instructive* (Lourenco & Jones, 2006). Mereka merekomendasikan agar peserta di ajak langsung ke lapangan dan merasakan langsung berwirausaha. Karena itu pendekatan pengajaran kewirausahaan yang disarankan diantaranya adalah: *experiential learning* (Otuya et al., 2013), *non-formal setting* (Priyanto, 2012), *problem-based learning* (Wee, 2004), *strategic business plan* (Painter, 2007; White, et al., 2011; Arasti, et al., 2012), *action-based* (Rasmussen & Sorheim, 2006; Neck & Green, 2011), *contingency-based business planning* (Honig, 2004), dan *consulting-based* (Manshor & Othman, 2011). Pendekatan-pendekatan tersebut memosisikan peserta sebagai subyek, dan pengajar sebagai fasilitator atau menurut Lourenco & Jones (2006) bersifat *bottom-up constructive*. Sub fokus **kedua**, penilaian kebutuhan. Ini adalah tahap persiapan sebelum melakukan pengajaran. Aspek yang diperhatikan dalam penilaian kebutuhan diantaranya adalah tingkat kreativitas peserta (Hamidi, et al., 2008), *entrepreneurial intention* dan *role model* peserta (Muofhe & Toit, 2011; Lorz, 2012), serta faktor-faktor yang memotivasi peserta untuk berwirausaha seperti ambisi, kebutuhan ekonomi, keinginan untuk mandiri, bantuan pemerintah, pengalaman, potensi pasar, potensi laba dalam berbisnis, dan kualifikasi pribadi (Kalyani & Kumar, 2011). Sub fokus **ketiga**, penyusunan kurikulum. Di sini Onojetah & Amiaya (2013) memberikan pendekatan baru dalam menyusun kurikulum PK. Pendekatan tersebut bernama *The Multiple Contexts of Entrepreneurship Education/Studies Curriculum and Instruction*. Pendekatan ini dipandang sesuai dengan perkembangan PK yang makin kontekstual. Ini karena pendekatan tersebut lebih holistik, mendalam, terintegrasi, dan dapat menyesuaikan diri dengan konteks PK yang akan dilakukan. Sub fokus **keempat**, media pengajaran. Media berperan menjembatani transfer pengetahuan dan keterampilan. Media inovatif yang disarankan diantaranya adalah film (Gelderen & Verduyn, 2003) dan *serious game simulation* (Allegra, et al., 2013). Kelebihan film adalah dapat mentransfer emosi, dilema moral, dan hubungan interpersonal sehingga efektif memotivasi peserta. Media kedua yaitu *serious game simulation*. Media ini mampu memberikan pengalaman *learning by doing* dan *learning by failing* bagi peserta dalam situasi yang kompleks. Sub fokus **kelima**, evaluasi pengajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengajaran. Ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kepuasan peserta (Antonciq, et al., 2007). mengevaluasi model mental peserta (Borcher & Park,



2011), *student's self-assessed entrepreneurial skill* (Graevenitz et al., 2010), dan *teacher self-reflection* (Leino et al., 2009).

## 5. USULAN PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA TIMUR

Penulis berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, memandang ada tiga tantangan dalam mengembangkan usulan model PK di Indonesia Timur. Pertama, PK di Indonesia Timur tidak bisa berdiri sendiri. Efektivitas PK di Indonesia Timur melibatkan banyak *stakeholder* serta kebijakan yang mendukung dan selaras dengan sistem pendidikan secara keseluruhan. Umumnya PK diberikan di jenjang sekolah tinggi atau universitas. Padahal guna meningkatkan efektivitasnya, PK sebaiknya sudah diberikan sejak pendidikan dasar. Kedua, Konsep kewirausahaan saat ini sudah berkembang dalam bermacam-macam konteks. Karena itu tantangan penyelenggara PK saat ini harus memperhatikan pertanyaan “untuk apa”, “siapa”, “kapan”, “dimana”, dan “sampai mana” PK diselenggarakan?. Jawaban atas kelima pertanyaan tersebut akan memberikan arahan pada tantangan ketiga, yaitu “apa saja”, “bagaimana”, dan “siapa sebaiknya” yang memberikan pengajaran kewirausahaan. Jawaban atas tantangan ketiga ini dapat mengarahkan pendidik bidang studi kewirausahaan lebih *entrepreneurial*. Pengajar kewirausahaan akan dituntut untuk menggunakan pendekatan yang inovatif, *contingency*, lintas bidang studi, berbasis pengalaman, berorientasi aksi, serta lebih memperhatikan tantangan, peluang, dan potensi sumber daya yang tersedia.

Usulan selanjutnya berkenaan dengan konteks PK di Indonesia Timur. Dalam hal ini, Penulis sangat memperhatikan potensi pemuda, wanita, sumber daya alam, dan putera daerah yang sudah sukses di kota atau di Indonesia Barat. Potensi tersebut merupakan sumber daya untuk mempromosikan program PK dalam konteks *rural entrepreneurship* (RE). Untuk itu, setidaknya ada empat tujuan yang dapat dicapai, yaitu menghambat perpindahan penduduk, memaksimalkan potensi lokal, menyesuaikan diri dengan budaya lokal, dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan khususnya pemuda dan wanita. Pada pelaksanaannya, pengajaran kewirausahaan dalam konteks RE sebaiknya memperhatikan dasar-dasar kerangka kerja RE yang sesuai dengan tipologi pedesaan di Indonesia. Sebagai gambaran awal, berikut ini adalah dasar kerangka kerja RE berdasarkan penelitian Penulis (Purnomo, 2013) pada *rural entrepreneur* di Indonesia:

1. RE adalah proses untuk membawa hal baru ke pasar dan masyarakat desa. Merupakan kombinasi dari inovasi pedesaan, identifikasi peluang di desa, membangun jaringan sosial, dan pertumbuhan bersama.
2. RE direpresentasikan oleh lima aspek berikut:  
“Aktivitas entrepreneurial yang dilakukan secara lokal oleh warga local (1); untuk menanggulangi permasalahan strategis di desa (2); yang dilakukan dengan cara mengembangkan keahlian pada bidang kompetensi dan sumber daya alam yang dimiliki (3); dalam rangka pemberdayaan baik secara individual maupun kolektif (4); sehingga mengungkit kemajuan desa dengan mengolah pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya alam menjadi produk, jasa, atau market baru (5)”
3. Manajemen RE nampak dalam bentuk inovasi endogen sampai inovasi eksogen
4. Pemeliharaan RE dilakukan dengan cara belajar sepanjang hayat, dengan sumber pembelajaran dari percobaan mandiri, jejaring sosial, dan sumber formal.

Keberhasilan program PK dalam konteks RE dapat diraih dengan cara membangun kolaborasi antara pemerintah, universitas setempat, serta perkumpulan swadaya masyarakat yang mengikat para praktisi dan wirausahawan local, serta dipandang pantas menjadi teladan dan peduli pada PK.

## 6. KESIMPULAN

Tantangan meningkatkan kualitas PK di Indonesia bukan sekedar mengembangkan metode pengajaran yang berkualitas. Tetapi seperti yang disarankan Levebre & Collot (2012) bahwa PK akan efektif jika didukung oleh legitimasi politik. PK juga bukan sekedar transfer pengetahuan dan membangun keterampilan berbisnis. Lebih dari itu PK merupakan pendidikan untuk membangun

keterampilan hidup untuk jadi berdaya sekaligus investasi bagi negara. Dalam tulisan ini Penulis menyusun alternatif model PK untuk Indonesia Timur berdasarkan SLR. Ada tiga dimensi yang terlibat dalam mengembangkan alternatif model PK yaitu kebijakan untuk pelaksanaan PK, konteks PK, dan konten pengajaran kewirausahaan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

1. ACE Initiative Development Committee, 2009, *“Entrepreneurship Education in Ireland: Towards Creating the Entrepreneurial Graduate”*, National Council for Graduate Entrepreneurship, Ireland.
2. Allegra, M., Guardia, D. L., Ottaviano, S., Grande, V. D., & Gentile, M., 2013, *“A serious game to promote and facilitate entrepreneurship education for young students”*, Proceedings of the 2013 International Conference on Education and Educational Technologies.
3. Antoncic, B., Erzetic, B. H., Zorn, O., & Hisrich, R. D., 2007, *“Entrepreneurship Education: Non-Linearity in the Satisfaction–Continuation Relationship”*, Management, Vol. 2, No. 2, pp: 101–119
4. Arasti, Z., Falavarjani, M. K., & Imanipour, N., 2012, *“A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduate Students”*, Higher Education Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 2-10
5. Aspen Youth Entrepreneurship Strategy Group, 2008, *“Youth Entrepreneurship Education In America: A Policymaker’s Action Guide”*, The Aspen Institute, One Dupont Circle, NW, Washington, DC.
6. Awasthi, D., 2011, *“Approaches to Entrepreneurship Development: The Indian Experience”*, Journal of Global Entrepreneurship Research, Winter & Spring, 2011, Vol.1, No.1, pp.107-124.
7. Babwah, N. R., 2012, *“An Entrepreneurship Education Model For Trinidad and Tobago”*, Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS) Vol. 3, No. 3, pp: 307-311.
8. Borchert, A. & Park, S. H. S., 2011, *“Assessing The Effectiveness Of Entrepreneurial Education Programs From A Multi-Level Multi-Dimensionalperspective With Mental Models”*, American Society for Engineering Education.
9. Botha, M., 2006, *“Measuring the effectiveness of the women entrepreneurship programme, as a training intervention, on potential, start-up and established women entrepreneurs in South Africa”*, Pretoria, chapter 3
10. Calvert, V., 2011, *“Service Learning to Social Entrepreneurship: A Continuum of Action Learning”*, Journal of Higher Education Theory and Practice vol. 11, No. 2, pp. 118-129.
11. Charney, A. & Libecap, G. D., 2005, *“Impact of Entrepreneurship Education”*, Insights, A Kauffman Research Series.
12. Cooney, T. & Murray, T., 2008, *“Entrepreneurship education in the third-level sector in Ireland”*, Institute for Minority Entrepreneurship & The National Council for Graduate Entrepreneurship, United Kingdom.
13. Cranwell, M. R., Kolodinsky, J. M., Donnelly, C. W., Downing, D. L., & Zakour, O. I. P., 2005, *“A Model Food Entrepreneur Assistance and Education Program: The Northeast Center for Food Entrepreneurship”*, Journal Of Food Science Education, Vol. 4, pp. 56-65.
14. Daly, S., 2001, *“Student-operated Internet businesses: true experiential learning in entrepreneurship and retail management”*, Journal of Marketing Education, Vol. 23, No. 3, pp: 204.
15. Dodescu, A., & Badulescu, A., 2010, *“Entrepreneurship Education and Training. Study-case: the AntrES programme on Women Entrepreneurship in Western Romania”*, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume II).
16. Dragusin, M. & Balalia, A. E., 2010, *“Cooperation Between Smes And Higher Education Institutions - Effective Tool For Entrepreneurial Education”*, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Negotia, No. LV, Vol. 1.

17. Edelman, L. F., Manolova, T. S., & Brush, C. G., 2008, *“Entrepreneurship Education: Correspondence Between Practices of Nascent Entrepreneurs and Textbook Prescriptions for Success”*, Academy of Management Learning & Education, Vol. 7, No. 1, pp. 56-70.
18. Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, 2012, *“Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes”*, Published by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels.
19. Fan, Y., Zhang, X. & Qiu, Y, 2013, *“The State of Entrepreneurship Education in Universities in Shanghai, China: A Survey from Students’ Perspective”*, Creative Education, Vol.4, No.2, pp. 92-97.
20. Fayolle, A., Gailly, B. T., & Lassas-Clerc, N., 2006. *“Assessing the impact of entrepreneurship education programmes: a new methodology”*, Journal of European Industrial Training, Vol 30, Vol. 8, pp: 701-720.
21. Fitriati, R., 2012, *“Entrepreneurship Education: Towards Models in Several Indonesia’s University”*, Proceeding of The 4<sup>th</sup> International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity, and Future.
22. Frazier, B. J., Niehm, L. S. & Stoel, I., 2011, *“Connecting college learners with rural entrepreneurship opportunities: The rural entrepreneurship teaching unit”*, Journal of Case Studies in Education.
23. Garavan, T. and O’Cinneide, B., *“Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation”* - Part 1. Literature review of problems associated with entrepreneurship education and training programmes, Journal of European Industrial Training.
24. Geldern, M. & Verduyn, K., 2003, *“Entrepreneurship in the cinema: Feature film as case material in entrepreneurship education”*, International Journal in Entrepreneurship Education, Vol. 1, No. 4, pp. 539-566.
25. Gibb, A.A., 1996, *“Entrepreneurship and Small Business Management: Can We Afford to Neglect Them in the Twenty-First Business School?”*, British Journal of Management, Vol. 7, No.4, pp 309-321.
26. Graevenitz, G., Harhoff, D., Weber, R., 2010, *“The Effects of Entrepreneurship Education”*, Journal of Economic Behavior and Organization, doi:10.1016/j.jebo.2010.02.015
27. Hamidi, D. Y., Wennberg, K. & Berglund, H., 2008, *“Creativity in Entrepreneurship Education”*, Journal of Small Business and Enterprise Development Vol. 15, No. 2, pp. 304-320.
28. Hindle, K., 2002, *“A grounded theory for teaching entrepreneurship using simulation games”*, Simulation & Gaming, Vol. 33, No. 2, pp : 236.
29. Honig, B., 2004, *“Entrepreneurship Education: Toward a Model of Contingency-Based Business Planning”*, Academy of Management Learning and Education, 2004, Vol. 3, No. 3, pp. 258-273.
30. Huber, L. R., Sloof, R. & Praag, M. V., 2012, *“The Effect of Early Entrepreneurship Education: Evidence from a Randomized Field Experiment”*, IZA Discussion Paper No. 6512, April 2012, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Bonn, Germany.
31. Idrees, R. N., Abbasi, A. S. & Waqas, M., 2013, *“Systematic Review of Literature on Workforce Diversity in Pakistan”*, Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 17, No. 6, pp. 780-790.
32. Kailer, N., 2006, *“Evaluation of Entrepreneurship Education at Universities”*, University of Linz, Institute for Entrepreneurship & Organizational Development, Freistaedter Strasse, Linz.
33. Kalyani, B. P. R. & Kumar, D. M., 2011, *“Motivational factors, entrepreneurship & education: Study with reference to women in SMEs”*, Far East Journal of Psychology and Business, Vol. 3, No. 3, pp. 14-35.
34. Kefalas, P., Ketikidis, P. H., & Ververidis, I. F., 2012, *“An entrepreneurial educational model for knowledge-based regional development through innovative learning practices”*, Proceedings of International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development.

35. Kennedy, E., 2013, *"The Roles of Entrepreneurship Education in Ensuring Economic Empowerment and Development"*, Journal of Business Administration and Education, Vol. 4, No. 1, pp. 35-46.
36. Klerk, J. K. S., & Dippenaar, A., 2003, *"Developing the next generation of potential entrepreneurs: co-operation between schools and businesses?"*, South African Journal of Education, Vol 23, No. 4, pp. 319-322.
37. Koivumaa, S. M., 2012, *"Effectuation In Embedded & Enquiry-Based Entrepreneurship Education: Essays for renewing engineering education at Kemi-Tornio University of Applied Sciences"*, Academic Dessertation, University of Oulu Graduate School, Department of Management & International Business, University of Oulu, Oulu Business School, Finland.
38. Larsen, K. A. & Nagel, T., 2013, *"Entrepreneurship Education In Namibia: An Evaluation of the Implementation of Entrepreneurship Education and the role of NAMAS"*, The Namibia Association of Norway (NAMAS), Namibia.
39. Levebre, M. R. & Collot, R. R., 2012, *"Achieving Legitimacy in Entrepreneurship Education: a case study"*, Journal of Enterprising Culture Vol. 20, No. 4, pp. 481-500.
40. Leino, J. S., Ruskovaara, E., Ikävalko, M., Mattila, J. & Rytkölä, T., 2009, *"Teachers' Reflections About Entrepreneurship Education"*, Lappeenranta University of Technology, Finland.
41. Linan, F., 2004, *"Intention-based models of entrepreneurship education"*, University of Seville
42. Lorz, M., 2012, *"The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention"*, Dissertation of the University of St. Gallen, School of Management, Economics, Law, Social Sciences & International Affairs, Bamberg.
43. Lourenco, F. & Jones, O., 2006, *"Developing Entrepreneurship Education: Comparing Traditional and Alternative Teaching Approaches"*, International Journal of Entrepreneurship Education Vol. 4, pp: 111-140.
44. Mansor, M. & Othman, N., 2011, *"Consulting-Based Entrepreneurship Education in Malaysian Higher Education Institutions"*, International Conference on Social Science & Humanity, Singapore.
45. Marques, L. A. & Albuquerque, C., 2012, *"Entrepreneurship Education And The Development Of Young People Life Competencies And Skills"*, ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, Vol. 1, Issue 2, pp. 55-68.
46. Muofhe, N.J., & Du Toit, W.F., 2011, *"Entrepreneurial education's and entrepreneurial role models' influence on career choice"*, SA Journal of Human Resource Management, Vol 9, No. 1.
47. Neck, H. M. & Greene, P.G., 2011, *"Entrepreneurship Education: Known Worlds and New frontiers"*, Journal of Small Business Management, Vol. 49, No. 1, pp. 55-70.
48. Ogundele, O.J.K. & Abiola, J. O., 2006, *"Entrepreneurship And National Development : A Proposal For Evangelistic Agenda"*, European Scientific Journal, Vol. 8, No.6, pp. 134-148.
49. Onojetah, S. O., & Amiaya, A. O., 2013, *"Towards Implementing A Model Of Multiple Contexts Of Entrepreneurship Education/Studies Curriculum & Instruction In Nigeria's Tertiary Institutions"*, International Journal of Education & Research, Vol. 1, No. 9.
50. Otuya, R., Kibas, P., & Otuya, J., 2013, *"A Proposed Approach for Teaching Entrepreneurship Education in Kenya"*, Journal of Education & Practice, Vol. 4, No.8, pp. 204-209
51. Painter, M., 2007, *"A Model For Entrepreneurship Training & Management Skills Development For Sustainable Economic Growth"*, Education & Training, IFMA, pp. 291-299.
52. Pittaway, L., & Cope, J., 2006, *"Entrepreneurship Education: A Systematic Review of the Evidence"*, National Council for Graduate Entrepreneurship Working Paper 002/2006.
53. Pittaway, L., Holt, R. & Broad, J., 2008, *"Handbook of Research in Small Business and Entrepreneurship: Synthesising Knowledge in Entrepreneurship Research: The Role of Systematic Literature Reviews"*, Center for Entrepreneurial Learning & Leadership: Working Paper Series, Georgia Southern University.

54. Priyanto, S. H., 2012, *"Entrepreneurial and vocational learning in entrepreneurship education: Indonesian Non formal education perspective"*, Basic Research Journal of Business Management and Accounts Vol. 1, No. 2, pp. 30-36.
55. Purnomo, M., 2013, *"Pemanfaatan Inovasi Untuk Pengembangan Masyarakat: Rural Entrepreneurship, mata rantai yang penting diperhatikan dalam pemanfaatan inovasi untuk pengembangan masyarakat di Pedesaan"*, Seminar Nasional & Workshop Peningkatan Pemanfaatan Inovasi dalam Menanggulangi Kemiskinan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bandung, 30 September – 1 Oktober 2013.
56. Ramanigopal, C. S., Palaniappan, G. & Hemalatha, N., 2012, *"Need For Entrepreneurship Education In School Students"*, International Journal of Physical and Social Sciences, Vol. 2, Issue 3, pp. 243-259.
57. Ras, P. & Pretorius, M., 2007, *"An Entrepreneurial Education Model For The Namibian Higher Education System"*, Acta Commercii, pp. 327-336.
58. Rasmussena, E. A., & Sørheim, R., *"Action-based entrepreneurship education"*, Technovation, Vol. 26, pp. 185-194.
59. Soare, E., 2008, *"Entrepreneurship Education-Innovative Way Of Curricular Restructuring"*, Lucrări Științifice – vol. 51, seria Agronomie, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași.
60. Stewart, J. & Knowles, V., 2003, *"Mentoring in undergraduate business management programmes, Journal of European Industrial Training"*, Vol. 27, No. 2/4, pp: 147.
61. Streeter, D. H. & Jaquette, J. P., 2004, *"University-wide Entrepreneurship Education: Alternative Models & Current Trends"*, Southern Rural Sociology. Vol. 20, No. 2, pp. 44-71.
62. Todorov, K. & Papazov, E., 2009, *"A Successful Model of Entrepreneurship Education & Training in Transition Countries: the Example of Bulgaria"*, the European Council for Small Business and Entrepreneurship Business Faculty, University of National and World Economy (UNWE), Sofia, Bulgaria.
63. Ulijn, J. M., Duill, M. O. & Robertson, S. A., 2004, *"Teaching Business Plan Negotiation:Fostering Entrepreneurship Among Business and Engineering Students"*, Business Communication Quarterly, Vol. 67, No. 1, pp: 41-57.
64. Weber, R., von Graevenitz, G. & Harhoff, D., 2009, *"The Effects of Entrepreneurship Education"*, Discussion Paper No. 269, Governance & The Efficiency System (GESY)
65. Wee, K. N. L., 2004, *"Problem-based learning approach in Entrepreneurship Education: promoting authentic entrepreneurial learning"*, International Journal Technology Management, Vol. 28, No. 7/8.
66. White, R., Hertz, G., & D'Souza, R., 2011, *"Teaching a Craft-Enhancing Entrepreneurship Pedagogy"*, Small Business Institute Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 1-14
67. Williamson, N., Beadle, S. & Charalambous, S., 2013, *"Enterprise Education Impact In Higher Education And Further Education"*, Department for Business, Innovation and Skills, Victoria Street London.
68. Zhou, M. & Xu, H., 2012, *"A Review of Entrepreneurship Education for College Students in China"*, Administrative Sciences, No. 2, pp. 82-98

# KOMPLEKSITAS KEKERASAN KEPADA ANAK PEREMPUAN KASTA ATA DI SUMBA TIMUR

## Resistensi Guru Terhadap Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak

Indra Yohanes Kiling<sup>1)</sup>, Beatriks Novianti Bunga<sup>2)</sup>

Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Kedokteran<sup>1)</sup>

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PG PAUD<sup>2)</sup>

Universitas Nusa Cendana

E-mail: [iykiling@gmail.com](mailto:iykiling@gmail.com)<sup>1)</sup>

E-mail: [boenga.eve@gmail.com](mailto:boenga.eve@gmail.com)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Nusa Tenggara Timur memiliki jargon parenting yang kontroversial pada era modern. “Di ujung rotan ada emas”. Kalimat ini mencerminkan kebudayaan membesarkan anak dengan menggunakan kekerasan fisik sebagai hukuman. Masyarakat Sumba Timur sampai saat ini masih menerapkan sistem kasta dalam kehidupan sosial mereka. Kasta Ata merupakan hamba bagi tuannya yang berdarah bangsawan yaitu kasta Maramba. Anak-anak kasta Ata sangat rentan mengalami kekerasan di dalam keluarga, sekolah maupun bermasyarakat. Budaya Patriarki yang hidup di masyarakat semakin memperbesar kemungkinan anak-anak perempuan kasta Ata untuk memperoleh perlakuan kekerasan. Makalah ini membahas mengenai upaya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 yang mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Resistensi yang terjadi menuntut pihak pemerintah serta pemerhati anak lainnya untuk mempertimbangkan opsi lain dalam mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi di Sumba Timur. Pembahasan berujung pada kesimpulan pentingnya pendekatan sosialisasi serta sistem pendidikan yang berfokus pada perilaku positif dan pemberian hadiah dibanding pendekatan lama yang menekankan pada perilaku negatif serta pemberian hukuman.

**Kata kunci:** kekerasan, kasta Ata, anak perempuan, pendekatan positif

### 1. PENDAHULUAN

India merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat dengan penggolongan kasta. Kasta identik dengan perbedaan ekonomi, status, serta perilaku. Meskipun beberapa ahli berpendapat bahwa kasta di India telah mati, dimana masyarakat memilih untuk berinteraksi sosial sebagaimana umumnya<sup>1)</sup>, sebuah penelitian di India menemukan seorang suami yang berasal dari kasta bawah (*Vaishya* dan *Shudra*) memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya dan kepada anak-anaknya<sup>2)</sup>. Sebagai negara yang mendapat banyak pengaruh dari India, Indonesia memiliki kelompok masyarakat di Kabupaten Sumba Timur yang masih menganut penggolongan kasta sampai saat ini. Penulis pernah berinteraksi selama 18 bulan dengan masyarakat Sumba Timur, yang memperkaya catatan observasi dan pengalaman penulis yang akan digunakan dalam beberapa bagian makalah ini.

Klasifikasi kasta yang terdapat di Sumba Timur dibagi menjadi tiga golongan. Kelompok bangsawan dan raja disebut *Maramba*, kelompok hamba disebut *Ata*, dan kelompok terakhir disebut *Kabihu* atau orang biasa. Kelompok *Kabihu* oleh masyarakat Sumba sering tidak dianggap masuk kasta karena tidak ada keterikatan seperti yang terdapat pada ikatan *Maramba* dengan *Ata*<sup>3)</sup>. Kasta diwariskan melalui keturunan di Sumba Timur. Orang tua *Maramba* akan melahirkan anak yang tergolong dalam kasta *Maramba*, sedangkan orang tua *Ata* akan mewariskan status hambanya ke anak mereka. Layaknya di India, golongan kasta di Sumba Timur akan membedakan dari segi status sosial, ekonomi dan tendensi perilaku. Satu orang *Maramba* memiliki setidaknya satu orang hamba, ada beberapa orang *Maramba* yang bisa memiliki belasan sampai puluhan hamba. Orang *Maramba* bisa memiliki puluhan sampai ratusan hewan ternak seperti kuda, sapi dan kerbau, sedangkan orang *Ata* hanya bisa menggembalakan hewan ternak kepunyaan tuannya. Seorang anak *Ata* perempuan

umumnya memiliki aktivitas sehari-hari untuk mengambil air untuk mandi pagi, memasak air dan menyeduh kopi, bersekolah, pulang sekolah langsung menyiapkan makan siang untuk tuannya, bermain, mengambil air untuk mandi sore, mencari kayu bakar lalu menyiapkan makan malam.

Orang *Maramba* diharuskan memiliki status yang lebih tinggi dari hambanya, termasuk dalam pendidikan. Penulis pernah menemukan kasus di desa Tawui di daerah selatan Sumba Timur pada tahun 2012, dimana seorang anak perempuan *Ata* tidak diijinkan untuk naik kelas karena tuannya seorang anak *Maramba* tidak naik kelas, hal ini akan menyebabkan kedua anak tersebut berada di tingkat pendidikan yang sama sehingga orang tua *Maramba* melarangnya. Anak perempuan ini masih beruntung, penulis menemukan banyak anak *Ata* yang disuruh berhenti sekolah setelah bisa membaca agar bisa membantu tuannya dengan bekerja di rumah. Kejadian ini dengan jelas memperlihatkan ketidak-adilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Sumba Timur.

Contoh ketimpangan selanjutnya diobservasi penulis pada tahun 2013 pada sebuah sekolah dasar di desa Ramuk, Sumba Timur. Seorang anak perempuan *Ata* dihina dan dipukuli oleh beberapa anak laki-laki *Maramba*. Ketika dileraikan guru dan ditanyakan penyebabnya, anak-anak tersebut mengatakan bahwa anak perempuan *Ata* tersebut telah bersifat kurang sopan dan mereka memukulinya karena dia adalah seorang *Ata*. Kedua kasus tersebut menunjukkan secara eksplisit bentuk diskriminasi dan kekerasan kepada anak perempuan *Ata*. Sebuah kondisi yang terjadi di negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan.

## 2. PENOLAKAN GURU AKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN

Perilaku negatif kepada anak seperti kekerasan fisik dan diskriminasi secara sosial seperti pada dua contoh kasus di atas merupakan sebuah pelanggaran hukum. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) No.23 tahun 2002<sup>4</sup>. Pelanggaran akan hukum ini akan berujung ke pidana. Sosialisasi mengenai UU PA di Sumba Timur telah dilakukan gencar-gencaran oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumba Timur bekerjasama dengan beberapa institusi pemerintahan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, baliho, spanduk, koran, radio, seminar serta beberapa kegiatan lainnya. Target dari sosialisasi ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak serta pentingnya untuk melindungi anak dari berbagai macam perilaku negatif.

Hasil yang muncul dari sosialisasi UU PA ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Sebuah seminar di Waingapu (ibukota Kabupaten Sumba Timur) yang bertema “Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002” dengan pembicara Ketua Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2012 memunculkan fenomena menarik. Seorang guru sekolah menengah atas memberikan argumen bahwa anak-anak didik mereka mendapatkan kesuksesan karir melalui pendisiplinan fisik yang dulu diberikan, argumen ini disambung dengan persetujuan dari guru-guru lain<sup>5</sup>. Guru tersebut kemudian mengutarakan jargon “di ujung rotan ada emas” yang telah lama berlaku di Sumba Timur. Ketua Komisi Perlindungan Anak membalas dengan mengeluarkan jargon baru yang berlaku saat ini yaitu “di ujung rotan ada rutan”. Fenomena di atas mencerminkan salah satu mekanisme pertahanan diri manusia yang diungkap Sigmund Freud yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi terjadi saat seseorang memberikan penjelasan berbeda dari persepiannya ketika orang tersebut menghadapi realita yang mulai berubah<sup>6</sup>. Perubahan realita disini adalah perubahan dimana mendisiplinkan murid dengan fisik sudah tidak boleh lagi dilakukan karena anak sudah dilindungi hukum. Guru yang menyadari bahwa apapun yang dilarang hukum adalah perbuatan yang salah, berusaha menjelaskan perilaku pendisiplinan memiliki keuntungan sehingga bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang benar.

Hal yang hampir serupa terjadi dalam sebuah seminar dengan tema “Perlindungan Anak” pada tahun 2013 yang mendatangkan kepala-kepala sekolah menengah atas di Waingapu. Seminar ini mendatangkan pembicara seorang profesor pendidikan dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Resistensi kali ini muncul dengan lebih keras, seorang kepala sekolah berargumen dalam sebuah sesi tanya-jawab bahwa orang tua yang lebih sering melakukan kekerasan terhadap anak namun guru yang lebih banyak dikasuskan di Sumba Timur. Hal ini sempat membuat riuh peserta seminar yang setuju dengan pendapat kepala sekolah tersebut. Reaksi dari

para kepala sekolah di Waingapu memperlihatkan kurangnya efektivitas upaya perlindungan anak dengan pendekatan sosialisasi UU PA. Pendekatan yang menitik-beratkan pada pemberian hukuman kepada pelanggaran menimbulkan kecenderungan bagi individu untuk berontak melawan pemberian hukuman tersebut. Upaya pendekatan baru harus dipertimbangkan demi melindungi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seperti anak perempuan kasta *Ata*.

### 3. PENDEKATAN PERILAKU POSITIF

Banyak ragam upaya prevensi dan intervensi yang dikembangkan untuk menangani permasalahan kekerasan kepada anak. Salah satu upaya yang disorot penulis pada makalah ini adalah *Positive Behavior Support* (PBS) yang diciptakan pada tahun 1980. PBS telah diterapkan sebagai bentuk upaya intervensi maupun prevensi, telah diaplikasikan dalam ruang lingkup pendidikan, perkembangan, klinis bahkan pada individu dengan kebutuhan khusus. PBS telah dikembangkan sedemikian rupa, telah memiliki jurnal khusus yaitu *Journal of Positive Behavior Interventions* dan merupakan bentuk intervensi dan prevensi yang populer di negara-negara maju seperti Amerika Serikat<sup>7</sup>.

Desain PBS yang ideal untuk sebuah sekolah memiliki tujuan primer untuk menargetkan seluruh populasi murid dari sekolah tersebut sehingga perubahan perilaku bisa terjadi secara menyeluruh dan lebih berkelanjutan. Hasil penelitian di New Hampshire, Amerika Serikat pada 15 sekolah menengah atas membuktikan bahwa PBS berfungsi dengan baik untuk meningkatkan perilaku positif murid dan mengurangi perilaku negatif seperti kekerasan dan *bullying*<sup>8</sup>. Hal ini didukung pula oleh penelitian pada 666 murid sekolah dasar di Midwest, Amerika Serikat<sup>9</sup>. Komponen-komponen penting dalam prosedur pelaksanaan PBS<sup>9</sup> adalah:

1. Melakukan konsensus untuk mengetahui perilaku seperti apa yang diharapkan sebagai hasil.
2. Mengajarkan kemampuan interpersonal yang dibutuhkan.
3. Menyediakan *reinforcement* positif untuk perilaku yang memenuhi harapan.
4. Mengawasi dan memonitori keefektifan intervensi secara berkesinambungan melalui pengumpulan data dan analisis data.
5. Melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait seperti guru, pelaksana program dan orang tua murid.
6. Meningkatkan langkah strategis selanjutnya yang berorientasi pada peningkatan *skill*, prevensi dan proaktif.

Penulis mencoba mendesain dan menyusun prosedur penerapan PBS di sekolah untuk mengintervensi perilaku kekerasan antara anak *Maramba* ke anak *Ata* terlebih khusus anak perempuan:

#### Pra-intervensi

Dalam fase pra intervensi, buku pegangan mengenai peraturan-peraturan yang ada di dalam sekolah diberikan kepada murid pada awal mula murid memasuki sekolah, sambil diberikan penjelasan untuk tiap-tiap itemnya.

#### Intervensi

Intervensi dimulai terlebih dahulu dengan proses konsultasi terlebih dahulu dari psikolog pendidikan untuk merancang layout intervensi secara garis besar dan psikolog pendidikan bisa memberikan pelatihan kepada para guru untuk memahami detail-detail operasional intervensi, dan mengorganisir tiap-tiap guru untuk implementasi intervensi secara spesifik. Secara rutin psikolog juga dijadwalkan untuk datang di sekolah setiap bulan dan terus berkomunikasi via telepon.

Langkah-langkah dalam intervensi nantinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala sekolah, para guru dan staf sekolah lainnya, pimpinan adat, pimpinan desa/kelurahan dan juga orang tua membentuk tim pendukung intervensi (dalam intervensi ini perilaku untuk menghargai teman tanpa memandang perbedaan kasta), dimana tanggung jawab utamanya adalah mengawasi pengimplementasian program, dan selalu melakukan rapat



setiap kali kunjungan konsultan. Setiap rapat anggota tim mendiskusikan progres, meninjau kembali hasil intervensi selama ini, dan merencanakan modifikasi jika dibutuhkan.

2. Guru mengawasi dengan ketat perilaku murid ketika sedang berinteraksi dengan temannya baik yang sesama kasta maupun berbeda kasta sehingga dapat memahami dengan baik perilaku murid, dalam hal ini atribusi (penyebab perilaku) dibalik perilaku kekerasan fisik kepada anak *Ata* terutama perempuan, bagi para murid yang masih melakukan. Guru juga mendeteksi penyebab perubahan bagi murid yang sudah tidak melakukan perilaku kekerasan lagi.
3. Buku pegangan direvisi dengan menambahkan perilaku-perilaku positif yang diharapkan dari murid. Harapan-harapan ini lebih menekankan kepada apa yang harusnya dilakukan murid, bukannya apa yang tidak boleh dilakukan. Harapan ini diberitahukan kepada para murid, mengawasi perilaku murid ketika berinteraksi di sekolah, dan juga menempelkan harapan-harapan tersebut di sekitar area sekolah, baik menggunakan poster bergambar maupun papan tulisan.
4. Mengenalkan sistem '*token reinforcement*'. Guru dan pelaksana intervensi mengidentifikasi perilaku murid yang sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan kupon penghargaan bertuliskan kata-kata positif seperti 'anak rajin', 'anak baik', 'anak pintar'. Kupon kemudian diserahkan murid ke guru yang diserahkan tugas sebagai administrator kupon, yang kemudian bertugas untuk memberi pujian, menghargai, dan mendorong anak tersebut untuk terus melakukan perilaku yang diharapkan. Kupon kemudian dipajang di salah satu papan di daerah pusat sekolah, dengan tulisan nama dan kelas dan bentuk perilaku positif yang dilakukan.
5. Setiap seminggu sekali kupon-kupon yang terkumpul akan diundi untuk kemudian pemenangnya berhak mendapatkan hadiah misalnya seragam baru, buku baru, kupon makan siang di rumah kepala sekolah, atau hal-hal lain yang membuat murid senang dan termotivasi untuk mengulang perilaku mereka tersebut dan membuat murid lain yang kurang beruntung untuk mencoba lebih baik untuk minggu berikutnya.

Untuk follow-up pada semester berikutnya ketika intervensi dinilai mulai memberi hasil positif, maka kegiatan tetap dilanjutkan namun kunjungan psikolog mulai dikurangi sehingga para guru dan orang tua mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dan belajar untuk mengembangkan alternatif intervensi lainnya dengan berbekal modal pengalaman yang sudah mereka miliki. Jika dinilai masih banyak kendala maka psikolog akan mengadakan training tambahan kali ini lebih spesifik kepada permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan intervensi dan langkah-langkah strategis yang bisa dikembangkan untuk menyiasati hal tersebut selanjutnya.

Kendala kultural yang mungkin akan dihadapi dalam program intervensi ini adalah interaksi anak di luar sekolah, dan juga kekerasan dari orang tua kepada anak *Ata*. Hal ini bisa diantisipasi dengan psikolog memberikan penjelasan kepada orang tua sebagai anggota tim intervensi secara lebih mendalam. Orang tua diharapkan dapat menerapkan PBS dengan prinsip serupa di rumah masing-masing. Hal lain yang bisa dilakukan juga adalah dengan memberikan hadiah undian 'double' untuk anak dan untuk orang tua, hadiah pujian dan penghargaan lebih diutamakan untuk orang tua sehingga orang tua juga merasakan keuntungan dari perilaku anak yang menghargai temannya yang lain di sekolah.

Penggunaan PBS hanya salah satu opsi yang bisa diterapkan untuk membantu mereduksi tingkat kekerasan pada anak perempuan *Ata*. Upaya lain yang mendorong perilaku positif perlu dilakukan secara simultan dalam level desa, kecamatan bahkan kabupaten oleh semua pemangku kepentingan terkait agar perubahan yang berkelanjutan bisa tercapai. Merubah sebuah budaya merupakan hal yang sulit dan membutuhkan waktu yang panjang, namun merubah perilaku dari anak-anak bisa menjadi pijakan awal untuk mengawali perubahan yang signifikan di masa depan.

**4. DAFTAR PUSTAKA**

1. Reddy, D. S. The Ethnicity of Caste. *Anthropological Quarterly*. 78,3:543-584
2. Khrisnan, S. 2005. Gender, Caste and Economic Inequalities and Marital Violence in Rural South India. *Health Care for Women International*. 26:87-99
3. Forshee, J. 2001. *Between The Folds: Stories of Cloth, Lives, and Travels from Sumba*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
4. KPAI. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diakses 8 Mei 2014 pada <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>
5. Kiling, I. Y. 2013. Pendidikan Anak Usia Dini atau Perusakan Anak Usia Dini? *Opini*. Koran Lentera Sumba Timur. Edisi Juni 2013.
6. Grohol, J. 2007. 15 Common Defense Mechanisms. *Psych Central*. Diakses 8 Mei 2014 pada <http://psychcentral.com/lib/15-common-defense-mechanisms/0001251>
7. Tincani, M. 2007. Moving Forward: Positive Behavior Support and Applied Behavior Analysis. *The Behavior Analyst Today*. 8,4:492-499.
8. Muscott, H. S., Mann, E., Benjamin, T. B., & Gately, S. 2004. Positive Behavioral Interventions and Supports in New Hampshire: Preliminary Results of a Statewide System for Implementing Schoolwide Discipline Practices. *Education and Treatment of Children*, 27,4:453-475.
9. Luiselli, J. K., Putnam, R. F., Handler, M. W., & Feinberg, A. B. 2005. Whole-School Positive Behaviour Support: Effects on Student Discipline Problems and Academic Performance. *Educational Psychology*. 25,3:183-198.

# PERENCANAAN PENINGKATAN INDEKS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAWASAN TIMUR INDONESIA

Taufik Hidayat\*, Dewi Saraswati\*\*

\*Perencana Pertama pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengolahan Mineral Lampung-  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

\*\*Pranata Humas Muda pada Pusat Penelitian Informatika - Lembaga Ilmu Pengetahuan  
Indonesia

E-mail : [tauf008@lipi.go.id](mailto:tauf008@lipi.go.id) dan [taufikumsu@yahoo.com](mailto:taufikumsu@yahoo.com)\*

E-mail : [dewi.saraswati@lipi.go.id](mailto:dewi.saraswati@lipi.go.id) dan [saras\\_00800@yahoo.co.id](mailto:saras_00800@yahoo.co.id)\*\*

## Abstrak

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angka ISDM, di mana semakin tinggi angka ISDM suatu wilayah, semakin baik kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia belum merata antar berbagai kawasan Hal ini terjadi pula di Indonesia Bagian Timur (sering juga dikatakan Kawasan Timur Indonesia-KTI). Hingga tahun 2014 ini masih ada 113 kabupaten di Indonesia yang belum terlepas dari ketertinggalan, sekitar 70 persen diantaranya berada di KTI. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif dilakukan dengan cara studi dokumen. Setelah dilakukan penelitian didapat kesimpulan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan gratis yang harus dilakukan melalui perencanaan sistemik dan teknis. Selain pendidikan gratis, Negara pula harus menjamin pendidikan yang diberikan adalah pendidikan yang berkualitas yang ditopang oleh 1). Kurikulum yang berkelanjutan. 2). Kualitas guru yang memadai. 3). Prasarana dan sarana terbangun terjaga dan berkembang terus 4). Manajemen pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan pencitraan publik yang positif.

**Kata Kunci** : Pendidikan Gratis dan Berkualitas, Indeks Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Kesejahteraan, Kawasan Indonesia Timur

## 1. PENDAHULUAN

Pada pengukuran Forum Ekonomi Dunia, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2013 di Jenewa, Swiss, Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM) bangsa Indonesia saat ini berada di urutan ke-53 dari 122 negara di dunia. ([rri.co.id](http://rri.co.id))

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam era globalisasi saat ini, dimana hanya SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi saja yang mampu ikut *nimbrung* dalam persaingan global. Fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitiveness Report menempati urutan ke-42, jauh dibawah Malaysia yang memiliki peringkat ke-28. (<http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014>)

Pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia yang didasarkan pada tiga parameter yaitu pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, belum merata antar berbagai kawasan karena pembangunannya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial budaya setempat. Hal ini terjadi pula di Indonesia Bagian Timur (sering juga dikatakan Kawasan Timur Indonesia-KTI). Hingga tahun 2014 ini masih ada 113 kabupaten di Indonesia yang belum terlepas dari ketertinggalan, sekitar 70 persen diantaranya berada di KTI. (<http://indonesia.ucanews.com/2014/02/21/70-daerah-tertinggal-di-indonesia-bagian-timur/>). Data kemudian menunjukkan, rata-rata ISDM di KTI adalah 65,8. Sedang laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 adalah -0,54 persen, sedang secara nasional pertumbuhan ekonomi adalah 1,09 persen. BPS, 2000

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angka ISDM, di mana semakin tinggi angka ISDM suatu wilayah, semakin baik kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat KTI, dengan memanfaatkan sumberdaya alam

setempat, diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai upaya peningkatan salah satunya di bidang pendidikan agar masyarakat KTI mampu mengolah sumberdaya alamnya secara optimal.

Salah satu pilar dalam meningkatkan ISDM agar mempunyai daya saing tinggi adalah Pendidikan yang merujuk pada hubungan aspek-aspek pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif dari pendidikan tingkat dasar, menengah hingga tinggi, dan berisi informasi baik ketersediaan tenaga kerja saat ini dan juga di masa depan. Demikian pula pada KTI, perlu dilakukan perencanaan yang baik dibidang pendidikan untuk peningkatan ISDM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia KTI.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan dalam menetapkan hal-hal yang akan dikerjakan dalam waktu yang akan datang berdasarkan fakta-fakta dan pemikiran yang matang dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, agar kegiatan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan didefinisikan oleh Sondang P. Siagian, sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. (Siagian, 1994)

Berdasarkan pendapat tersebut, Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam rangka memenuhi tujuan yang telah disepakati bersama, serta merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Salah satu tujuan bersama dalam membangun suatu negara adalah *Welfare State* yaitu konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip [kesetaraan kesempatan](#), [distribusi kekayaan](#) yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. (Britannica Online Encyclopedia)

*Welfare State* memerlukan pendanaan dari negara (pemerintah) ke jasa-jasa yang disediakan terutama layanan kesehatan dan pendidikan. Dana tersebut dapat berasal dari sistem [pajak](#). (Phillip Anthony O'Hara, 1999). Perpajakan semacam itu biasanya meliputi [pajak pendapatan](#) yang lebih besar bagi orang-orang berpendapatan tinggi, yaitu [pajak progresif](#). Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin. (Pickett and Wilkinson, 2011)

Dalam konteks pembangunan daerah ISDM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah. Hal ini menandakan bahwa ISDM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi ISDM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. Peran ISDM sebagai alat ukur pembangunan akan lebih terlihat bila dilengkapi dengan data basis dan hitungan yang benar sampai ke wilayah terkecil tanpa membedakan daerah miskin atau tidak sehingga diharapkan perencanaan pembangunan akan benar-benar memihak masyarakat tanpa terkecuali. (Kurnia Lismawatie, 2007)

ISDM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai ISDM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai ISDM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk mencari informasi tertulis tentang ISDM, pembangunan, dan kesejahteraan. Studi dokumen dilakukan pada institusi yang terkait dengan hitungan ISDM, program-program pembangunan, dan masalah pendidikan. Setelah diperoleh data akan dianalisis secara deskriptif eksploratif.

### **4. PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAWASAN TIMUR INDONESIA**

#### **(a) Kewajiban Negara**

Ketika kita memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka yang bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Bagi Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya terdapat kewajiban yang harus dilakukan pemerintah termasuk masalah biaya. Kewajiban pemerintah yang menyediakan biaya pendidikan dasar tertuang dalam amanat UUD 1945 pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", Pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 berbunyi "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun", Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 berbunyi "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya". Berdasarkan undang-undang tersebut seharusnya negara mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakannya. Karena selain tuntutan dari undang-undang, pendidikan juga dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

Dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Hanya saja, dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, membayar pajak, di sisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pendidikan.

Salah satu cara agar pendidikan di negara kita merata adalah dengan mengadakan pendidikan gratis untuk setiap jenjang pendidikan dan beasiswa. Kewajiban membayar iuran sekolah diambil alih oleh pemerintah. Bahkan, murid juga memperoleh pinjaman buku dari perpustakaan sekolah. Ketika sekolah tidak membebani masyarakat secara finansial, tentunya para orang tua tidak memiliki lagi alasan kuat untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga, angka partisipasi sekolah pun akan meningkat.

Menurut undang-undang sumber pembiayaan pendidikan gratis dapat berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat.

Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.

Pendidikan yang biayanya diambil alih oleh pemerintah sebetulnya dapat dijadikan payung hukum dari program wajib belajar. Sampai saat ini Indonesia yang konon kabarnya telah

menjalankan program wajib belajar 9 tahun namun belum mempunyai aturan-aturan yang jelas dan mengikat tentang wajib belajar itu sendiri. Ketentuan wajib belajar sebenarnya telah ada sejak tahun 1984 tetapi karena tidak diikuti oleh aturan yang jelas maka hasilnya pun belum maksimal.

Wajib belajar ala Indonesia tidak identik dengan wajib belajar (*compulsory education*) seperti yang dipersepsi oleh negara-negara maju, yang secara ekonomis telah lebih makmur. Dalam pengertian negara maju, *compulsory education* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tiadanya orangtua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah; dan (4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Adapun ciri-ciri wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia ialah: (1) tidak bersifat paksaan, melainkan himbauan; (2) tidak ada sanksi hukum, dan yang lebih menonjol adalah aspek moral, yakni orangtua dan peserta didik merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan dasar karena berbagai kemudahan telah disediakan; (3) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri; dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi dalam pendidikan.

Menyadari bahwa wajib belajar hanya imbauan, adalah fakta bahwa pemerintah atau pejabat memang tidak serius dengan pendidikan. Mereka kurang peduli pada rakyat miskin. Menggratiskan SPP dan buku pinjaman dapat menjadi pertanda kesungguhan pemerintah dan langkah simpatik dalam mewujudkan amanat dalam undang-undang.

Dengan adanya pendidikan gratis, semua masalah pun dapat teratasi. Selain itu, pendidikan gratis juga tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah karena pemerintah daerahlah yang mengaplikasikannya. Selain itu juga jika ada aturan yang jelas tentang program wajib belajar, maka tidak ada satupun orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah, serta pemerintah dapat memberi sanksi terhadap orang tua yang tidak menyekolahkan anak pada usia wajib belajar.

Pendidikan sangatlah penting demi mewujudkan generasi bangsa yang lebih berkualitas sehingga dapat memajukan Negara Indonesia kelak. Kendala yang negara kita hadapi adalah tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi. Ini menyebabkan banyak anak-anak bangsa yang kurang beruntung tidak dapat bersekolah karena tidak sanggupnya orang tua membiayai sekolah. Apabila ini terus dibiarkan tanpa mengambil tindak lanjut yang nyata, negara kita akan selalu tertinggal terutama di bidang pendidikan.

Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk berperan aktif. Sebenarnya perihal tentang pendidikan telah dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 tentang kewajiban belajar yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Kewajiban belajar yang dimaksud adalah pendidikan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara tanpa dipungut biaya. Program ini mutlak harus menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus mempunyai aturan yang jelas mengenai biaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga masyarakat memahami aturan-aturan dalam pendidikan gratis.

Tindakan yang mungkin dilakukan pemerintah adalah memberikan beasiswa dan pendidikan gratis, mulai dari iuran bulanan, seragam, alat tulis, dan buku sekolah. Sehingga, tidak ada alasan lagi, orang tua tidak mengizinkan mereka untuk bersekolah. Pendidikan dasar gratis ini sebenarnya dapat dijadikan momen bagi pemerintah dalam menjalankan program wajib belajar. Pemerintah harus membuat aturan yang jelas tentang program wajib belajar. Aturan ini dapat dijadikan payung hukum, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, sehingga makna dari wajib belajar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mengejar ketertinggalan KTI, sebaiknya pendidikan gratis sesegera mungkin diterapkan untuk KTI. Pendidikan gratis dimaksud ialah pendidikan dari tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi.

**(b) Perencanaan**

Perencanaan merupakan persiapan yang disusun dengan menggunakan segenap kemampuan penalaran bagi suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan proses yang esensial dalam manajemen lembaga pendidikan. Perencanaan mencakup hal yang luas, kompleks, serta memerlukan banyak waktu. Inti dari perencanaan berupa perumusan tujuan dan pengkoordinasian cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan memiliki dua arti penting. Pertama dan yang utama adalah sebagai pijakan (titik awal) dari keseluruhan proses manajemen. Kedua, berfungsi mengarahkan segenap aktivitas dalam organisasi. Pendidikan di Indonesia seakan mengalami kemunduran. Perubahan kurikulum yang terjadi seakan membuat arah pendidikan Indonesia yang tak menentu. Peraturan yang mewajibkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN, tidak mampu memperbaiki atau bahkan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan yang terlalu sering mengganti baju pun belum mampu mengatasi permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan di Indonesia seakan sulit terlaksana, masih banyak masyarakat di daerah-daerah pelosok sulit untuk mendapatkan pendidikan, apalagi pendidikan yang layak dan berkualitas. Sistem pendidikan yang telah diimplementasikan pun tak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Sistem Pendidikan yang dilaksanakan tentunya harus direncanakan sedemikian rupa berdasarkan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia. Untuk membuat perencanaan pendidikan yang baik dapat dilakukan dengan cara :1. Sistemik, adanya perombakan dalam sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Sistem pendidikan sangat berkaitan dengan ekonomi, dengan sistem ekonomi sekarang menyebabkan adanya stratifikasi dalam pendidikan. Maka haruslah menciptakan sistem yang menghilangkan adanya stratifikasi dalam pendidikan. Tidak ada lagi kesenjangan fasilitas pendidikan untuk masyarakat ekonomi kuat dan lemah. 2. Teknis, solusi secara teknis adalah adanya perubahan dalam aspek kualitas sarana prasarana, kualitas guru dan kualitas siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

Sebuah perencanaan pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan jika ditopang oleh beberapa faktor yaitu :1). Kurikulum yang berkelanjutan. 2). Kualitas guru yang memadai. 3). Prasarana dan sarana terbangun terjaga dan berkembang terus 4). Manajemen pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan pencitraan publik yang positif.

Kondisi pendidikan di KTI perlu mendapat perhatian khusus, salah satu strategi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan bidang pendidikan di KTI adalah dengan peningkatan partisipasi sekolah terutama sekolah dasar, sekolah menengah dan pendidikan sejenis yang setara, pendirian sekolah-sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi sumberdaya setempat, peningkatan mutu perguruan tinggi dan peningkatan akses untuk mengikuti Pendidikan Tinggi (di dalam negeri dan di luar negeri) harus dibahas dalam setiap perencanaan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) bidang pendidikan harus menitik beratkan pada KTI.

**(c) Jaminan Kualitas Pendidikan Gratis**

Sebagaimana tersebut dalam bagian terdahulu, sebuah perencanaan pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan jika ditopang oleh beberapa faktor yaitu :1). Kurikulum yang berkelanjutan. 2). Kualitas guru yang memadai. 3). Prasarana dan sarana terbangun terjaga dan berkembang terus 4). Manajemen pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan pencitraan publik yang positif.

### c.1. Kurikulum yang Berkelanjutan

Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana kurikulum akan dapat dilaksanakan. (Bondi dan Wiles,1989) berpendapat pengembangan kurikulum yang terbaik adalah proses yang meliputi banyak hal, yakni 1) kemudahan suatu analisis tujuan, 2) rancangan suatu program, 3) penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan 4) peralatan dalam evaluasi proses.

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan Kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Oleh karena itu strategi pembelajaran pada pendidikan sekolah harus diberi fondasi terlebih dahulu dengan internalisasi sosiologi kritis, inovasi, kreativitas, dan mentalitas. Hal ini tidak berhenti pada fondasi saja, tetapi juga diupayakan merasuki kurikulum yang ada pendidikan sekolah. Selain itu, juga mengubah strategi pembelajaran yang selama ini berdasarkan pada konsep *reproductive view of learning* menjadi *constructive view of learning*. Konsep ini pada dasarnya membangun tanpa merusak fondasi yang sudah baik pada proses belajar mengajar selama ini.

Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.

Inovasi dan pengembangan kurikulum dilakukan karena melaksanakan pengembangan kurikulum bersifat dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar (peserta didik). Masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situasi (*situation analysis*) yang dihadapi masyarakat, termasuk situasi lingkungan belajar dalam arti menyeluruh, situasi peserta didik, dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan.

Inovasi dan pengembangan kurikulum dalam pendidikan merupakan kebutuhan yang terus harus diperhatikan. Diperlukan riset lapangan dan refleksi pengalaman untuk mengembangkannya. Strategi yang lebih baik lagi dalam pengembangan ini ialah kebersamaan para guru dan siswa untuk mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran yang sudah ditempuh, kemudian bersama-sama berunding mengusulkan pendapat bagaimana melakukan pembaruan.

### c.2. Kualitas Guru Yang Memadai

Tidak dipungkiri bahwa sektor pendidikan merupakan sektor vital dalam pembangunan Indonesia. Fungsi dan tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan generasi – generasi penerus, anak-anak bangsa Indonesia, untuk menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Seperti tertuang dalam **UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3** yang berbunyi : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Sebagian besar dari anak Indonesia tinggal di daerah-daerah terpencil, dimana akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas masih sangat minim. Beberapa kendala pelaksanaan pendidikan di daerah terpencil adalah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang tidak memadai, sebagai contoh gedung sekolah, meja dan kursi belajar, papan tulis, gedung perpustakaan dan koleksi buku yang terbatas, akses informasi yang tidak memadai, **kualitas tenaga pengajar yang**



kurang kompeten, distribusi tenaga pengajar yang tidak seimbang dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, serta kesejahteraan tenaga pendidik yang masih rendah. Berbicara tenaga pengajar, guru memegang peranan penting dalam pencapaian visi pendidikan di Indonesia. Dalam **Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 1, Ayat 1** disebutkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah pendidikan”. Dalam pernyataan tersebut tertulis jelas bahwa guru adalah pendidik profesional, hal ini berarti bahwa seorang guru profesional harus memiliki **kompetensi dan karakteristik** tersendiri. Beberapa karakteristik tersebut yaitu **kematangan diri yang stabil**, memahami diri sendiri, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, kematangan sosial yang stabil, memiliki pengetahuan yang cukup tentang masyarakat, dan mempunyai kecakapan membina kerjasama dengan orang lain; **kematangan profesional (kemampuan mendidik)**, yaitu menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya, memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik. Lalu bagaimana kondisi pengajar yang ada di daerah terpencil? Apakah mereka sudah mempunyai kompetensi yang diharapkan untuk menjadi guru profesional? Para guru di daerah terpencil tidak terlalu mampu dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan terkadang mereka meminta untuk disediakan fasilitas lain, seperti komputer, padahal di daerah ini tidak ada listrik. Beberapa hal lain yang pada umumnya terjadi pada guru di daerah terpencil yaitu, **sebagian besar guru belum mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya, belum menyadari pentingnya menjadi guru yang profesional, rendahnya kesadaran untuk selalu mau belajar dan mengembangkan wawasan serta mengutamakan mutu untuk pengembangan diri**. Rendahnya kualitas guru ini akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.

Lantas upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru di daerah terpencil? Salah satunya adalah **pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pembentukan karakter untuk menciptakan guru yang berkualitas**. Selayaknya seluruh guru di daerah terpencil baik guru swasta, negeri maupun honorer dapat menikmati pendidikan dan pelatihan ini, yang dapat dilakukan dengan adanya kerja sama antara pemerintah, swasta dan organisasi terkait.

Dengan pelatihan kepemimpinan ini diharapkan bahwa setiap guru memiliki kemampuan untuk memimpin murid-muridnya sehingga murid dapat mencapai hasil maksimal untuk apa yang mereka cita-citakan. Selain itu, guru akan menjadi lebih terampil di dalam memimpin, memiliki pemahaman mengenai beberapa hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang pemimpin, mengetahui bagaimana cara memberikan semangat, baik untuk murid-muridnya maupun diri sendiri dan lingkungan sekitarnya sehingga terbentuk karakter yang kuat untuk menjadi guru yang profesional, menumbuhkan kejujuran, kecerdasan dan integritas sebagai pemimpin. Karena peran utama guru adalah sebagai pemimpin yang mampu memberikan motivasi muridnya untuk belajar, mengarahkan tujuan belajar, melatih keterampilan dan mengevaluasi hasil belajar muridnya. **Guru yang berkualitas dan kompeten di bidangnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.** (Crhisterra Ellen Kusumaningrum, 2014)

### c.3. Prasarana dan Sarana Terbangun Terjaga dan Berkembang Terus

**Sarana dan prasarana** sangat penting dalam [dunia pendidikan](#) karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. **Prasarana dan sarana pendidikan** adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih.

### c.4. Manajemen Pengelolaan yang Baik

Untuk menuju perubahan pendidikan secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan hasil

yang diinginkan. Walaupun masih terdapat institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Manajemen yang digunakan masih konvensional, sehingga kurang bisa menjawab tantangan zaman dan terkesan tertinggal dari modernitas.

Jika manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik dan membumi, niscaya tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana-prasarana tidak memadai, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan. Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan empat fungsi dasar: *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dalam penggunaan sumberdaya organisasi.

## 5. KESIMPULAN

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KTI adalah dengan peningkatan Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM), semakin tinggi ISDM suatu daerah akan berkorelasi dengan semakin tingginya kesejahteraan daerah tersebut, demikian sebaliknya. Salah satu pilar dalam rangka peningkatan ISDM adalah sektor pendidikan.

Salah satu cara agar pendidikan di negara kita merata adalah dengan mengadakan pendidikan gratis untuk setiap jenjang pendidikan dan beasiswa. Kewajiban membayar iuran sekolah diambil alih oleh pemerintah. Bahkan, murid juga memperoleh pinjaman buku dari perpustakaan sekolah. Ketika sekolah tidak membebani masyarakat secara finansial, tentunya para orang tua tidak memiliki lagi alasan kuat untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga, angka partisipasi sekolah pun akan meningkat. Negara dalam hal ini Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban untuk mneyelenggarakan pendidikan gratis tersebut.

Dalam perencanaan pendidikan yang baik dapat dilakukan dengan cara : pertama, Sistemik, adanya perombakan dalam sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Sistem pendidikan dangat berkaitan dengan ekonomi, dengan sistem ekonomi sekarang menyebabkan adanya stratifikasi dalam pendidikan. Maka haruslah menciptakan sistem yang menghilangkan adanya stratifikasi dalam pendidikan. Tidak ada lagi kesenjangan fasilitas pendidikan untuk masyarakat ekonomi kuat dan lemah. Kedua, Teknis, solusi secara teknis adalah adanya perubahan dalam aspek kualitas saran prasarana, kualitas guru dan kualitas siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

Selain pendidikan gratis, Negara harus menjamin pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan jika ditopang oleh beberapa faktor yaitu : 1). Kurikulum yang berkelanjutan. 2). Kualitas guru yang memadai. 3). Prasarana dan sarana terbangun terjaga dan berkembang terus 4). Manajemen pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan pencitraan publik yang positif.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

1. Bondi, J., dan Wiles, J. 1989. *Curriculum Development: A Guide to Practice*. Columbus: Merrill Publishing Company, A Bell & Howel Information Company.
2. Phillip Anthony O'Hara (editor), 1999. *Encyclopedia of Political Economy*, Routledge.
3. Siagian, Sondang P. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
4. Pickett and Wilkinson, 2011, [\*The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better\*](#).
5. Kurnia Lismawatie, 2007, *Korelasi Hitungan Indeks Pembangunan Manusia Dan Kondisi Kemiskinan Di Pematangsiantar*, Central Library Institute Technology Bandung, Tesis.

6. Britannica Online Encyclopedia.
7. Phillip Anthony O'Hara (editor), 1999. *Encyclopedia of Political Economy*, Routledge.
8. BPS, 2000. *Statistik Indonesia 1999*. Jakarta.
9. Crhisterra Ellen Kusumaningrum, 2014, Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar di Daerah Terpencil, bisnis Indonesia.
10. <http://indonesia.ucanews.com/2014/02/21/70-daerah-tertinggal-di-indonesia-bagian-timur/>.
11. <http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014>  
[rri.co.id](http://rri.co.id)

# TANTANGAN DAN PELUANG PERBAIKAN POLA PENDIDIKAN MAHASISWA INDONESIA TIMUR

Studi Kasus: Hasil Belajar di Program Studi X di Yogyakarta

Josef Hernawan Nudu<sup>1,2)</sup>  
Program Studi Teknik Industri <sup>1)</sup>  
Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur <sup>2)</sup>  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta<sup>1,2)</sup>  
E-mail : josef\_nudu@yahoo.com

## ABSTRAK

Pendidikan, yang dipercaya dapat meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kondisi daerah Indonesia Timur, membawa lulusan sekolah menengah asal Indonesia Timur belajar di Program Studi X di Yogyakarta. Sistem belajar-mengajar di universitas tempat Program Studi X bernaung telah terbukti mampu membawa universitas tersebut bersaing diantara Perguruan Tinggi lain. Data hasil belajar mahasiswa Indonesia Timur di Program Studi X di Yogyakarta digunakan sebagai studi kasus dan dianalisis untuk mengetahui kemampuan mahasiswa Indonesia Timur belajar di Program Studi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem belajar-mengajar di Program Studi X, yang dirancang dengan mengandaikan kemampuan minimal tertentu dari mahasiswa baru, memberikan kesempatan mengejar harapan perbaikan hidup karena kualitas pendidikannya disamakan dengan Universitas Negeri (terakreditasi A) dan sekaligus memberikan tantangan karena perlu berbagai upaya serius untuk memperoleh hasil belajar yang baik.

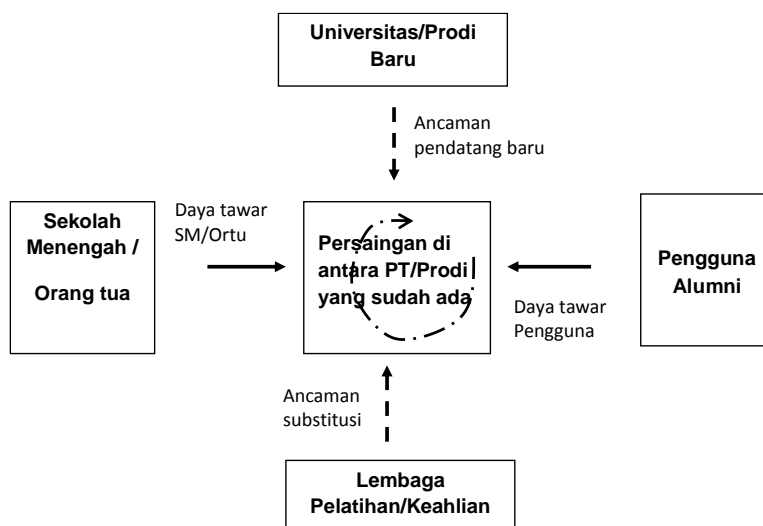
**Kata kunci:** Indonesia Timur, pendidikan, Yogyakarta, peluang, tantangan

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan diyakini sebagai sarana memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Sebagai Kota Pendidikan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima banyak mahasiswa dari luar daerah, termasuk mahasiswa dari kawasan timur Indonesia. Kawasan timur Indonesia yang memiliki 'kemiripan' dalam bahasa ibu, misal: kitorang, dorang, pigi, mama, dalam makalah ini disebut sebagai kawasan Indonesia Timur (INTIM) yang meliputi Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya, Kepulauan Maluku, wilayah Papua, serta NTT.

*Program Studi X* adalah sebuah program studi setingkat S-1 di sebuah unieversitas terkemuka di DIY. Salah satu kebijakan universitas tersebut adalah memberi perhatian lebih kepada mereka yang lemah (*option for the poor*). Sampai dengan tahun akademik 2013/2014, *Program Studi X* rutin menerima mahasiswa baru dari kawasan Indonesia Timur, sekitar 10% mahasiswa baru setiap angkatan berasal dari INTIM.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan swasta, *Program Studi X* harus mampu berinovasi dan mengelola sistem pendidikannya sehingga menjadi program studi yang diminati masyarakat dan mampu membiayai operasionalnya. Kurikulum, proses belajar mengajar, budaya belajar, teknologi pembelajaran harus diperbarui mengikuti kebutuhan industri/pengguna. Modifikasi model Porter dapat menggambarkan persaingan dalam sistem pendidikan perguruan tinggi seperti disajikan pada Gambar 1. Universitas dan *Program Studi X* harus mampu memenuhi keinginan pengguna, harapan orang tua, bersaing dengan perguruan yang sudah ada, perguruan baru, dan lembaga yang menawarkan alternatif pendidikan/keahlian.



**Gambar 1.** Modifikasi model Porter untuk persaingan Perguruan Tinggi (Nudu, 2000).

Kompetisi menjadi institusi pendidikan terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif membawa dampak penggunaan teknologi dan kurikulum berbasis kompetensi yang menggandakan kemampuan belajar mandiri. Mahasiswa INTIM, yang notabene memiliki banyak kendala, memerlukan perhatian khusus sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui proses pendidikan di *Program Studi X* dapat tercapai

Permasalahan yang ingin diulas dalam makalah ini adalah apakah sistem belajar di *Program Studi X* telah sesuai dan mampu membuat mahasiswa INTIM dapat belajar dengan baik. Dalam makalah ini hasil belajar ditandai dengan besaran indeks prestasi kumulatif (IPK) yang merupakan tolok ukur nasional/internasional bagi keberhasilan studi mahasiswa.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Pendidikan dipercaya sebagai sarana untuk meningkatkan harkat hidup dan kehidupan. Karena itu pendidikan mendapat sorotan penuh dalam upaya mensejahterakan suatu daerah, sebagai mana terjadi untuk daerah Indonesia Timur. Pendapat bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dikemukakan oleh Schultz, seorang penerima hadiah nobel bidang ekonomi. Secara komprehensif Schultz menguraikan pentingnya pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan *'human capital'* dan kemajuan suatu sistem (Schultz, 1972). Pendapat ini dikuatkan oleh hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa konsep *human capital* sesuai untuk diterapkan pada tataran ekonomi makro, ekonomi mikro, maupun personal [(Mincer, 1975), (Asghar *et al.*, 2012), (Magoutas *et al.*, 2012), (Brunello *et al.*, 2012)].

Mincer (1975) dalam salah satu bab buku *Education, Income, and Human Behavior*, menyajikan hasil penelitian bahwa mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi memperoleh penghasilan yang lebih baik. Sementara itu Asghar *et al.* (2012) menyatakan bahwa perbaikan *'human capital'* dalam aspek pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi pakistan. Pengaruh ini tetap signifikan meskipun dana yang dialokasikan pada pendidikan tidak besar. Konsep *'human capital'* juga sesuai diterapkan pada skala mikro (perusahaan) dimana keunggulan kompetitif dalam bentuk modal intelektual memberikan efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan di Yunani (Magoutas *et al.*, 2012). Dalam skala individual, pendidikan dan buku yang memadai pada usia kanak-kanak memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh hidup layak pada masa dewasa (Brunello *et al.*, 2012).

Penelitian-penelitian lain juga menunjukkan fungsi pendidikan yang memberikan sejumlah efek positif dalam banyak aspek kehidupan seperti kesetiakawanan sosial, kesehatan, dan pola asuh [(Muller *et al.*, 2013) , (Tuncalp *et al.*, 2014), (Gracia, 2014)]. Hasil penelitian Muller *et al.* (2013) menunjukkan bahwa pendidikan dan penggunaan teknologi meningkatkan kebersamaan dan pengembangan di daerah tertinggal/pedesaan di daerah pelosok Alpen dan Senegal. Penggunaan teknologi baru atau konsep baru membuat masyarakat merasa menjadi satu komunitas yang lebih padu. Penelitian lainnya oleh Tuncalp *et al.* (2014) di 29 negara di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah menunjukkan bahwa resiko persalinan yang berbahaya (*near miss, near death*) lebih tinggi pada populasi ibu-ibu yang berpendidikan rendah dibandingkan dengan resiko persalinan yang berbahaya pada ibu-ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi. Penelitian Gracia (2014) menyatakan bahwa ayah lebih terlibat dalam membesarkan anak pada keluarga dengan ibu-bekerja dipegaruhi oleh tingkat pendidikan ayah. Ayah yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi mengambil peran lebih banyak dalam mengasuh anak.

Pendidikan formal memerlukan pola pengelolaan supaya lembaga pendidikan yang melaksanakan proses pendidikan dapat bertahan, berkembang, dan menghasilkan lulusan yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan kondisi global membawa konsekuensi perubahan kebijakan pendidikan. Perubahan kebijakan ini membawa implikasi pada perubahan aturan, kurikulum, dan cara mengajar (Tien, 2014).

Pemakaian teknologi menjadi vital dan tak terhindarkan dalam pendidikan, misalnya *e-learning* dan penggunaan iPad sebagai alat bantu ajar. Aplikasi *e-learning* sudah menjadi kebutuhan bahkan di negara yang sedang berkembang. Aplikasi *e-learning* bisa diterapkan dengan baik apabila mempertimbangkan kemampuan *stakeholder*, utamanya mahasiswa. Penerapan *e-learning* harus secara bertahap dan dievaluasi dalam setiap tahapannya (Kituyi dan Tusubira, 2013). Dalam hal penggunaan teknologi terbaru, penelitian Mavri *et al.* (2014) menunjukkan bahwa penggunaan iPad semata tidak mempengaruhi hasil belajar secara signifikan.

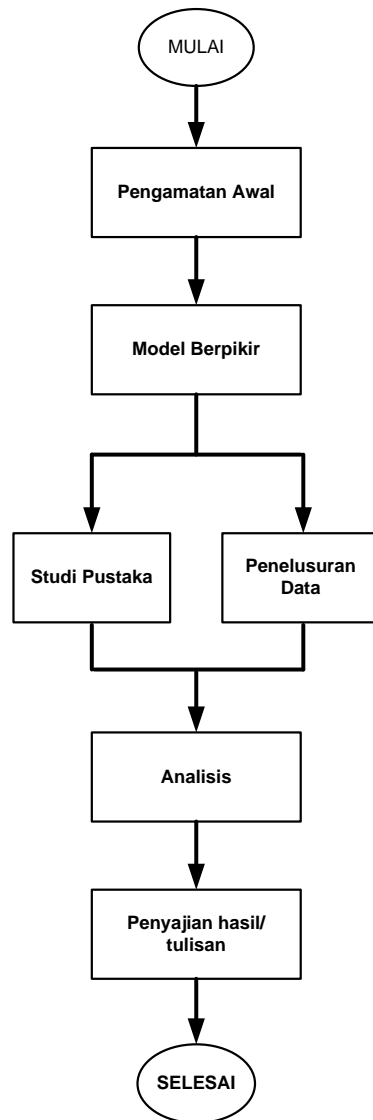
Tujuan pengajaran dan pola belajar-mengajar harus disesuaikan dengan kondisi aktual [(Amali, 2012), (Jadhav *et al.*, 2014)]. Penelitian Amali (2012) menunjukkan bahwa meskipun pendidikan memiliki nilai yang sangat penting, namun proses belajar mengurangi ketersediaan tenaga kerja (termasuk tenaga anak) di daerah pertanian. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan mengelola pendidikan di daerah terpencil berbasis pertanian mengingat bahwa pengurangan tenaga manusia akibat bersekolah tidak sebanding dengan efek perbaikan yang diperoleh setelah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi lain seperti tingkat putus sekolah (DO) yang tinggi mengindikasikan adanya permasalahan dan memerlukan penanganan sampai pada tahap kebijakan. Penelitian Singh (2011) menunjukkan kebutuhan peran kebijakan pemerintah dalam pendidikan dasar di India. Tingkat kemiskinan dan fasilitas pendidikan belum tersebar merata mengakibatkan tingkat putus sekolah di pendidikan dasar mencapai lebih dari 50%. Kebijakan pendidikan gratis tidak hanya dibutuhkan untuk tingkat dasar (s/d umur 14 tahun), namun diharapkan sampai pada jenjang di atasnya.

Pola pendidikan yang berbasis kebutuhan lokal antara lain diungkap oleh Jadhav *et al.* (2014) yang membahas kurikulum pendidikan untuk menghasilkan alumni yang sadar lingkungan hidup. Pendidikan tinggi mampu berperan dalam menjaga kelestarian alam dan pembangunan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya jaringan kerja, lingkungan akademis, dan membekali alumni dengan ilmu menangani permasalahan lingkungan.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, sangat jelas pengaruh positif pendidikan dan perlunya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan baik dalam lingkup makro, mikro, komunal, maupun personal. Kajian teoritis ini mendukung fakta bahwa orang tua, antara lain dari Indonesia Timur, mengirim anaknya sekolah dengan harapan akan memperoleh perbaikan kesejahteraan.

### 3. METODE PENELITIAN

Makalah yang disajikan menguraikan temuan hasil pengamatan empiris, penelusuran pustaka, dan data kuantitatif. Berdasarkan pengamatan tentang kondisi hasil belajar mahasiswa Indonesia Timur dilakukan penelusuran ilmiah terhadap pentingnya topik yang akan dibahas. Data diperoleh dari data administratif yang tersimpan di basis data *Program Studi X*. Hasil kajian pustaka dan data yang diperoleh mendukung gagasan perlunya topik untuk disajikan dalam bentuk makalah. Alur berpikir disajikan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Alur berpikir penelitian dan penulisan makalah

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh di *Program Studi X* disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Data tersebut menunjukkan sebaran mahasiswa INTIM dan hasil studi yang diperoleh.

**Tabel 1.** Mahasiswa per angkatan dan Indeks Prestasi Akademik di *Program Studi X*

Tahun Akademik	Mahasiswa Baru		Drop Out		IPK		Mahasiswa Aktif
	TOTAL	INTIM	TOTAL	INTIM	TOTAL	INTIM	TOTAL
2007/2008	114	0	2	0	2.67	-	9
2008/2009	82	0	7	0	2.78	-	18
2009/2010	90	0	7	0	3.01	-	34
2010/2011	93	7	6	1	2.75	1.60	85
2011/2012	143	10	4	2	2.46	1.86	120
2012/2013	188	22	0	0	2.53	2.16	176
2013/2014	196	12	0	0	2.69	2.30	196

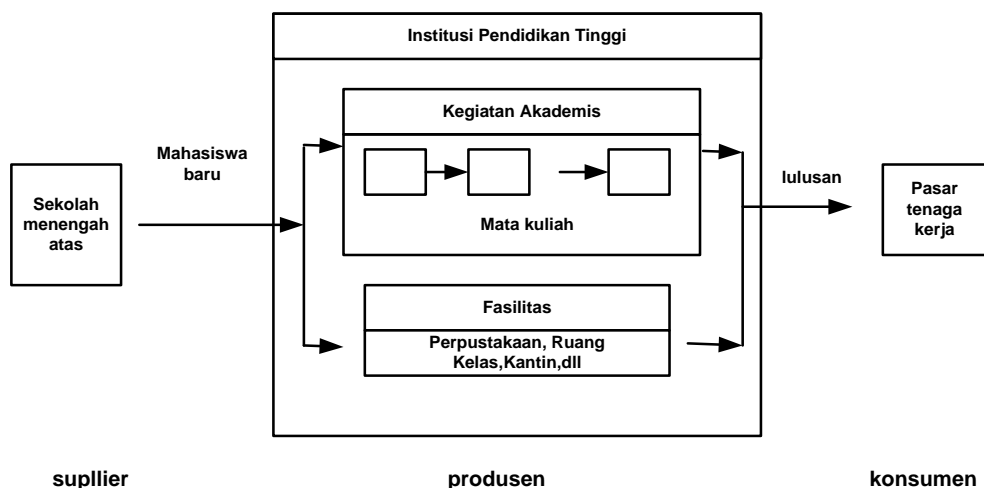
**Tabel 2** Hasil Studi per Angkatan di *Program Studi X*

Tahun Akademik	Studi < 4th		4th < Studi < 5th		Studi > 5th	
	TOTAL	INTIM	TOTAL	INTIM	TOTAL	INTIM
2007/2008	23	0	0	0	56	0
2008/2009	24	0	8	0	16	0
2009/2010	23	0	6	0	22	0
2010/2011	5	0	0	0	0	0
2011/2012	-	-	-	-	-	-
2012/2013	-	-	-	-	-	-
2013/2014	-	-	-	-	-	-

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa INTIM mengalami kesulitan dalam perkuliahan yang ditandai dengan IPK rendah. IPK rata-rata hampir di semua angkatan belum mencukupi salah satu syarat kelulusan IPK 2,25 (Tabel 2, kolom **IPK**). Mahasiswa baru asal INTIM tercatat sejak angkatan 2010/2011 dan belum ada mahasiswa INTIM yang lulus dalam waktu studi kurang dari empat tahun sejak tahun tersebut. Sebagai pembandingan, lima mahasiswa *Program Studi X* non INTIM telah lulus dalam masa studi kurang dari empat tahun (Tabel 2, kolom **Studi < 4th**).

Permasalahan hasil dan proses belajar mahasiswa INTIM dapat dianalisis mulai dari sistem pengelolaan *Program Studi X*. *Program Studi X* sebagai lembaga pendidikan harus menggunakan pola manajemen yang mampu menjamin bertahan dan berkembang dalam sistem industri pendidikan nasional, bahkan terhadap serbuan lembaga pendidikan asing. Konsep relasi supplier-produken-konsumen berlaku dalam sistem pendidikan. Proses belajar pada sistem pendidikan seperti di *Program Studi X* dipaparkan pada Gambar 3.



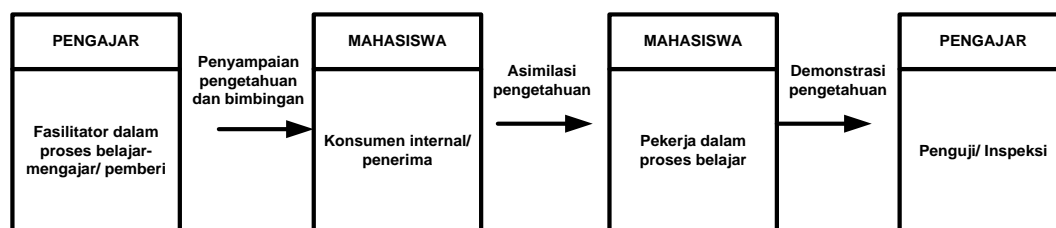


Gambar 3. Model proses belajar dalam sistem pendidikan (Nudu,2000)

*Program Studi X* selaku institusi pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Di sisi lain *Program Studi X* harus mampu memberikan tawaran yang menarik bagi calon mahasiswa (SMA/SMK/Orang tua). Dalam model ini, *Program Studi X* harus mampu mengatasi permasalahan internal, bertahan terhadap kompetitor dan substitutor, memenuhi harapan pengguna yang terdiri atas industri/pengguna yang memanfaatkan lulusan *Program Studi X* dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di *Program Studi X*. Paradigma ini mendasari berbagai pilihan strategis *Program Studi X* termasuk dalam merancang kurikulum.

Kurikulum adalah roh arah pendidikan dan kompetensi lulusan yang diharapkan. Kurikulum harus memuat sebanyak mungkin kompetensi agar menarik bagi industri/pengguna alumni, namun harus padat dan sederhana agar lama studi yang dirancang menarik bagi orang tua dan calon mahasiswa. Kurikulum *Program Studi X* disusun dengan kesadaran untuk memberikan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan jaman namun dibatasi oleh jumlah beban SKS yang fisibel, dalam hal ini jumlah sks total sebanyak 144 SKS atau setara dengan lama studi 8 semester (4 tahun). Keterbatasan alokasi SKS yang bisa dikelola membuat *Program Studi X* memilih kebijakan untuk tidak mengajarkan kembali materi yang sudah diberikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Asumsinya mahasiswa baru telah memiliki dasar dan siap mengulang kembali materi tersebut saat dibutuhkan selama dalam masa studinya. Materi seperti Kimia dan Pengetahuan Komputer secara sadar dihilangkan dari Kurikulum 2004 dan kurikulum sesudahnya.

Proses belajar membutuhkan partisipasi guru/dosen sebagai penyaji dan penguji serta partisipasi mahasiswa sebagai pembelajar dan individu/materi yang diolah. Model ini dijelaskan sebagai *Dual Role* seperti pada Gambar 4. Dalam model *dual role* mahasiswa tidak hanya diharuskan melakukan sesuatu (operator/belajar) namun juga harus berkembang (diolah). Untuk itu dibutuhkan keahlian dasar yang memungkinkan proses transformasi terjadi.



Gambar 4. Model dual-role dalam proses belajar-mengajar (Nudu, 2000)

Fakta bahwa *Program Studi X* terakreditasi A, menunjukkan bahwa secara keseluruhan pola pengelolaan sistem pendidikan di *Program Studi X* telah berlangsung dengan baik. Fakta bahwa IPK rata-rata mahasiswa INTIM di setiap angkatan lebih rendah daripada IPK rata-rata angkatan (Tabel 2, kolom **IPK**) menunjukkan tantangan yang harus dibenahi. IPK yang lebih rendah dari IPK rata-rata keseluruhan mahasiswa per angkatan dan IPK yang semakin menurun seiring lamanya studi menunjukkan adanya permasalahan studi mahasiswa INTIM di *Program Studi X*.

Kurikulum *Program Studi X* sejak kurikulum 2008 ditandai dengan kondisi tancap gas sejak semester 1 (satu). Artinya mahasiswa difasilitasi dan diminta tancap gas belajar sejak semester I. Nilai yang jelek di semester I mengakibatkan efek beruntun tidak bisa mengambil mata kuliah yang lain, baik karena batasan pengambilan sks maksimum maupun kuliah prasyarat. Meskipun jumlah mata kuliah prasyarat telah jauh dikurangi di kurikulum 2012 namun batasan jumlah maksimum sks yang dapat diambil menjadi kendala jika IPK rendah.

Sebagai catatan, perlu diketahui bahwa tidak semua mahasiswa INTIM di *Program Studi X* memiliki IPK yang rendah. Penelusuran singkat terhadap prestasi menonjol beberapa mahasiswa INTIM di *Program Studi X* dapat dibaca pada Tabel 3.

**Tabel 3** Contoh Capaian Prestasi Akademik Mahasiswa INTIM di *Program Studi X*

INISIAL	ID Mhs	Asal	Capaian
MAM	0506046xx	Wewewa, Sumba Barat Daya	IPK di atas 3, Asisten laboratorium, lulus S-2 (MM)
MVAL	1016063xx	Ende, Flores	IPK di atas 3, Asisten laboratorium, sedang S-2 di Jerman
YRD	1006061xx	NTT	IPK 3,26 ; sedang magang di Freeport

Tabel 3 memberikan gambaran sekilas bahwa mahasiswa INTIM pun dapat memiliki IPK yang baik, menjadi asisten (yang notabene memerlukan konduite yang baik dan kemampuan memberikan materi kepada praktikan), mengikuti proses magang di perusahaan besar multinasional (memerlukan kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa asing), dan melanjutkan studi (bahkan studi di luar negeri).

Dari pembahasan di atas terlihat masalah dalam sisi kemampuan mahasiswa INTIM untuk belajar, bersaing, dan berkembang di *Program Studi X*. Meskipun analisis ini membutuhkan data tambahan dan pengamatan lebih mendalam, beberapa permasalahan yang ditemui adalah:

1. Permasalahan bahasa. Terdapat kesulitan untuk memahami bahasa Indonesia yang digunakan oleh pengajar yang sebagian besar berdialek Jawa. Dosen juga mengalami kesulitan memahami maksud perkataan mahasiswa INTIM yang memiliki dialek dan struktur bahasa Indonesia yang berbeda.
2. Permasalaham budaya. Budaya INTIM adalah komunal sedangkan budaya di kelas/DIY cenderung lebih individual. Mahasiswa INTIM cenderung terlihat pasif sehingga penilaian keaktifan berkurang yang berpengaruh pada nilai akhir. Rasa malu juga membuat mahasiswa INTIM tidak berani bertanya untuk materi yang belum dipahami. Akibatnya nilai akhir menjadi jelek.
3. Permasalahan kemampuan berbahasa (Inggris). Hampir seluruh buku teks yang digunakan ditulis dalam bahasa Inggris. Semakin lama mahasiswa belajar di *Program Studi X*, akan semakin tertinggal.
4. Permasalahan pengoperasian komputer. *Program Studi X* mengandaikan bahwa mahasiswa baru sudah mahir mengoperasikan komputer dan memanfaatkan *software* yang mendukung perkuliahan seperti *MS OFFICE*.

5. Permasalahan penggunaan internet. *Program Studi X* mengandaikan bahwa mahasiswa baru sudah terbiasa menggunakan internet dan memanfaatkan fasilitas *browse* dan *download* untuk membantu proses belajar. Fasilitas jaringan internet tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses belajar.
6. Permasalahan kemampuan mengejar ketertinggalan materi dasar yang dibutuhkan untuk penyelesaian studi di *Program Studi X*, misalnya kalkulus.
7. Permasalahan manajemen waktu. *Program Studi X* mengandaikan bahwa mahasiswa baru sadar akan sumber daya waktu yang terbatas dan mampu mengalokasikan waktu dengan baik sesuai dengan beban SKS yang diambil setiap semester.

Hal-hal tersebut di atas adalah faktor-faktor yang teramati dan membutuhkan perhatian bagi mahasiswa INTIM untuk belajar dengan baik. Beberapa hal telah dilakukan oleh *Program Studi X* untuk menyiapkan mahasiswa baru agar dapat belajar lebih baik, antara lain: pengenalan budaya DIY dan tutorial. Dalam kasus mahasiswa INTIM barangkali dibutuhkan alokasi waktu yang lebih banyak. Program matrikulasi dapat menjadi pertimbangan. Matrikulasi membuat lama studi bertambah. Namun melihat kenyataan tidak ada mahasiswa INTIM yang lulus dalam 5 tahun studi, bertahan selama satu atau dua semester dalam program matrikulasi kemudian lancar studi dan lulus empat tahun sesudahnya, masih sangat layak dicoba. Karena matrikulasi menambah biaya studi (sehingga studi di *Program Studi X* menjadi tidak kompetitif dibanding Perguruan Tinggi lain), diperlukan skema pembiayaan lain misalnya CSR atau beasiswa PEMDA INTIM.

Akhir pembahasan dapat digarisbawahi bahwa *Program Studi X* sadar dan berusaha memfasilitasi proses belajar mahasiswa INTIM namun kondisi bahwa *Program Studi X* harus membiayai sendiri operasionalnya membuat pilihan menjadi terbatas. Diperlukan bantuan dan upaya semua pihak agar tujuan orang tua mahasiswa asal INTIM saat menyekolahkan anaknya di *Program Studi X* sungguh tercapai.

## 5. KESIMPULAN

Dari bahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa tantangan:

- Keterbatasan sumber daya, termasuk beban SKS, membuat kurikulum dirancang dengan asumsi bahwa calon mahasiswa baru memiliki kemampuan akademik tertentu sesuai dengan materi yang telah diajarkan di jenjang sebelumnya.
- Mahasiswa INTIM memiliki keterbatasan yang membuat mereka sulit belajar dengan baik.
- Mahasiswa INTIM memperoleh hasil belajar yang rendah di *Program Studi X*.

Namun demikian beberapa peluang yang dapat dikembangkan adalah:

- *Program Studi X* sebagai sebuah institusi pendidikan telah dikelola sedemikian sehingga memperoleh akreditasi yang baik dan alumninya mampu bekerja sesuai tuntutan kompetensi saat ini.
- Akreditasi A bermakna bahwa proses pendidikan di *Program Studi X* setara dengan standar pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Mahasiswa INTIM memperoleh kesempatan belajar setara dengan di universitas negeri dengan perbandingan pendaftar calon mahasiswa baru yang lebih sedikit.
- Alumni dan Mahasiswa INTIM yang masih aktif telah menunjukkan bahwa hasil studi yang baik di *Program Studi X* bukan sesuatu yang mustahil. Mahasiswa INTIM sebagaimana mahasiswa dari daerah lainnya dituntut belajar dengan tekun dan kerja keras.
- *Program Studi X* secara sadar telah berupaya menjembatani adanya permasalahan mahasiswa INTIM misalnya dengan pengenalan budaya DIY, namun diperlukan upaya bersama agar tujuan pendidikan dan kebijakan *Option for the Poor* dalam hal proses belajar mahasiswa INTIM, dapat tercapai

**6. DAFTAR PUSTAKA**

1. Amali, I.O.O., 2012, Schooling and Human Capital Development in Agro-Based Rural Economy in Southern Benue, Nigeria, *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 10 [Special Issue – May 2012]*, p.105-110
2. Asghar, N., Awan, A., Rehman, H., 2012, Human Capital and Economic Growth in Pakistan: A Cointegration and Causality Analysis, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 4, No. 4; April 2012, p.135-147
3. Brunello, G., Weber, G., Weiss, C.T., 2012, Books Are Forever: Early Life Conditions, Education and Lifetime Income, *Discussion Paper No. 6386*, IZA, Germany, February 2012
4. Gracia, P., 2014, Fathers' Child Care Involvement and Children's Age in Spain: A Time Use Study on Differences by Education and Mothers' Employment, *European Sociological Review* Volume 0 Number 0, 2014, p. 1–14 DOI:10.1093/esr/jcu037, available online at [www.esr.oxfordjournals.org](http://www.esr.oxfordjournals.org)
5. Jadhav A. S., Jadhav V.V. and Raut P. D., 2014, Role of Higher Education Institutions in Environmental Conservation and Sustainable Development: A case study of Shivaji University, Maharashtra, India, *Journal of Environment and Earth Science*, ISSN 2224-3216 (Paper) ISSN 2225-0948 (Online), Vol. 4, No.5, 2014, p.30-34
6. Magoutas , A.I., Papadogonas, T.A., Sfakianakis, G., 2012, Market Structure, Education and growth, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 12 [Special Issue – June 2012] ,p.88-95
7. Mavri, A., Loizides, F., Souleles, N., 2014, A Case Study on Using iPads to Encourage Collaborative Learning in an Undergraduate Web Development Class, *Proceedings of the First International Conference on the use of iPads in Higher Education 2014, 20<sup>th</sup>-22<sup>nd</sup> March 2014, Paphos*, ISBN: 978-9963-697-10-6 , p.248-265
8. Mincer, Y., 1975, Education, Experience and the Distribution of Earnings and employment: An Overview, Book Chapter in *Education, Income, and Human Behavior*, F. Thomas Juster, ed., <http://www.nber.org/chapters/c3693>, p.71-94
9. Muller, U., Ahamer, G., Peters, H., Weinke, E., Sapper, N., Salcher, E., Technologies and Collaborative Education Strengthen Conviviality in Rural Communities in the Alps and in Senegal, *Multicultural Education & Technology Journal*, Vol. 7 No. 2/3, 2013, pp. 207-227
10. Nudu, J.H., 2000, Perubahan Kurikulum (bagian I): Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif bagi Industri Pendidikan, *Jurnal Teknologi Industri*, Volume IV, no.1 ,p.63-75
11. Schultz , T.W., 1972, Human Capital: Policy Issues And Research Opportunities, Book Chapter in *Economic Research: Retrospect and Prospect Vol 6: Human Resources*, Theodore W. Schultz, ed., p. 1-84, Chapter URL: <http://www.nber.org/chapters/c4126>
12. Singh, S., 2011, Development of Education Sector Who Benefits?, *Bilingual Journal of Humanities & Social Sciences*, ISSN 2249-9180 (Online), Vol. 2, Issue 1 & 2, (Joint Issue), 15 Jan-15 July, 2011, p.1-5
13. Tien, P.D.N., 2014, Changes in Vietnam Education Governance in the Context of International Integration, *Proceedings of the 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014) "Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives"*, Hue City, Vietnam, 15-16 March, 2014.
14. Tuncalp, O., Souza, J.P., Hindin, M.J., Santos, C.A., Oliveira, T.H., Vogel, J.P., Togoobaatar, G., Ha, D.Q., Say, L., Gulmezoglu, A.M., 2014, Education and Severe Maternal Outcomes in Developing Countries: a multicountry cross-sectional survey, *BJOG 2014*; 121 (Suppl. 1): 57–65.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Irya Wisnubdra ST., MT. untuk abstraksi data studi, dan rekan-rekan (DM. Ratna Tungga Dewa, SSi., MT., Yosef Daryanto, ST., MSc, The Jin Ai, ST., MT., DEng) atas bantuannya sehingga makalah ini dapat diselesaikan.

# **PENINGKATAN PENDIDIKAN KESADARAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DENGAN PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Made Wahyu Adhiputra**  
**Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta, Bali**

***madewahyuadhiputra@gmail.com***

## **ABSTRAK**

Bertitik tolak dari keadaan dan kondisi wilayah geografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat luar biasa besarnya yang belum dapat didayagunakan secara optimal, sudah waktunya pembangunan pendidikan di wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius, agar upaya menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai. Masyarakat memegang peranan yang sangat penting terhadap sumber daya pesisir. Pendidikan kesadaran ekonomi dilakukan dengan mengembangkan pengelolaan berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Ini menjadi instrumen pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan berkelanjutan kesejahteraan masyarakat setempat. Tradisi dan hukum adat yang mempunyai kaitan dan bermanfaat terhadap upaya pengelolaan dan optimalisasi nilai ekonomi dari sumberdaya pesisir dan laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa nilai kearifan lokal yang mempunyai peranan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir adalah *Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang*. Dimana ketaatan masyarakat terhadap nilai kearifan lokal sangat tinggi, karena mereka memiliki kesadaran dan persepsi bahwa eksistensi kehidupan mereka tidak terlepas dengan eksistensi kehidupan makhluk lainnya dalam kebersamaan di bumi yang satu dan sama ini.

**Kata kunci:** Pendidikan, Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Kearifan Lokal dan Sumber Daya Pesisir

## **ABSTRACT**

*Based on the circumstances and conditions of the geographical region in the province of East Nusa Tenggara, and the availability of human resources and natural resources tremendous amount of which can not be utilized optimally, it was time to development of education in the region needs to be given serious consideration, in order to attempt prepare and improve the quality of human resources can be achieved. Society plays a very important to coastal resources. Economic awareness education is done by developing community-based management and local wisdom. It became an instrument of economic development of coastal communities activities based on local resources to improve the welfare of local communities sustainable. Traditions and customary laws that have links and useful to management efforts and optimize the economic value of coastal and marine resources in the province of East Nusa Tenggara.*

*Some of the value of Communal Wisdom plays important role in managing the coastal resources include *Badu, Muro, Kolo Umen Bale Lamaq, Poan Kemer Puru Larang, Toto, Bito Berue, Lepa Nua Dewe, Bruhu Bito dan Leffa Nuang*. The obedience of communities onthe communal wisdom is very uprooted as they realize and think that their life existence cannot be separated from the other living beings (creatures) that share the same world.*

**Keywords :** *Education, Community-Based Management, Communal Wisdom and Coastal Resources.*

## PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan SDM seutuhnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama bagi pembangunan, karena kualitas SDM sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Kualitas SDM antara lain dicerminkan oleh derajat kesehatan, tingkat intelegensia, kematangan emosional dan spiritual.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa belahan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbeda keadaannya dari provinsi lainnya. Secara geografis ketersebaran pulau-pulaunya berada di wilayah yang sangat luas. Pendidikan mempunyai peranan dalam suksesnya pembangunan di belahan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk sanggup mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia perlu lebih dahulu dipersiapkan. Pendidikan adalah sarana dan wahana untuk peningkatan sumber daya manusia itu secara utuh.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo dan Palue. Ibukotanya terletak di Kupang, Timor Barat. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba dan Timor Barat. Provinsi ini menempati bagian barat pulau Timor. Sementara bagian timur pulau tersebut adalah bekas provinsi Indonesia yang ke-27, yaitu Timor Timur yang merdeka menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002. Jumlah penduduk di provinsi ini adalah 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.326.487 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.357.340 jiwa (2010). Kepadatan penduduk di **Nusa Tenggara Timur** sebesar 96 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan prosentasi penduduk yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%, dan sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan. Sebagian besar penduduk beragama Kristen dengan rincian persentase kurang lebih sebagai berikut Katolik 54,14% Protestan 34,74%, Islam 9,05% , Hindu 0,11% Buddha 0,01% dan sebanyak 1,73% menganut agama dan kepercayaan lainnya. Tingkat pendaftaran sekolah menengah adalah 39% yang jauh dibawah rata-rata Indonesia, yaitu 80.49% tahun 2003/2004 (menurut UNESCO). Menurut berbagai standar ekonomi, ekonomi di provinsi ini lebih rendah dari pada rata-rata Indonesia, dengan tingginya inflasi (15%), pengangguran (30%) dan tingkat suku bunga (22-24%).

Mengingat potensi kelautan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat besar, pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran ekonomi dan penguasaan Iptek pengelolaan laut perlu diprioritaskan. Apabila terlambat dan tidak dijaga, kekayaan lautan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dikuras oleh pihak asing, dan tidak akan termanfaatkan untuk pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri.

Sumberdaya alam pesisir dan laut, dewasa ini sudah semakin disadari banyak orang bahwa sumberdaya ini merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Konsekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (*common property*) dan terbuka untuk umum (*open acces*) maka pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dewasa ini semakin meningkat di hampir semua wilayah.

Ekonomi masyarakat pesisir dengan predikat serba tertinggal dalam proses pembangunan perlu mendapatkan perhatian lebih banyak. Dalam hal ini pemihakan secara nyata pada ekonomi masyarakat pesisir tidak dapat dielakkan. Pemberian perhatian harus dengan pendekatan sosial ekonomi sesuai dengan tingkat pengembangan budaya masyarakat sebagai pelaku ekonomi rakyat melalui pendidikan, keterampilan, keahlian, kemantapan manajemen, dan peningkatan kesadaran dalam pembangunan akan menjadi dasar penguatan kemampuan ekonomi rakyat.

Dilihat dari perspektif secara ekonomi, adalah jelas bahwa pendidikan merupakan "*human capital investment*". Pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang dibentuk melalui proses pendidikan berkorelasi positif bagi peningkatan penghasilan dan kesejahteraan. Karena itulah, perspektif ekonomi menyakini bahwa hanya lewat upaya pendidikan kesadaran ekonomi, kesejahteraan ekonomi dapat dibangun.

Pengelolaan sumber daya kelautan (*marine management*) merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya (*sustainability*). Hal ini bertujuan agar sumberdaya kelautan yang ada tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Permasalahan pengelolaan pesisir dan laut selama ini terjadi karena pola pendekatan pembangunan yang kurang mengakomodasi dan mengintegrasikan potensi lokal baik sumberdaya alam pesisir maupun sumberdaya manusia termasuk nilai-nilai kearifan lokal/tradisional. Pengelolaan berbasis masyarakat dilaksanakan sebagai sarana pendidikan kesadaran ekonomi atas kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang dilaksanakan selama ini sering bersifat parsial dan berpola “*top-down*”, sehingga sering kali kurang atau bahkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, tidak berpola “*bottom-up*”, sedang dalam implementasinya kurang mendayagunakan potensi yang ada secara optimal termasuk nilai-nilai atau kearifan lokal.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan interpretatif atau pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai obyek studi, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, maupun aturan (*rule*) yang mengikat obyek ilmu beserta profesinya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sesuatu masalah yang menjadi topik penelitian atau konsepsi tersebut. Pendekatan ini sangat sesuai untuk kondisi rendahnya pendidikan kesadaran ekonomi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kaya dengan kearifan lokal dengan pendekatan Pengelolaan Berbasis Masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sumber Daya Pesisir

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 1996). Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Wilayah pesisir dan laut sebagai ekosistem yang dinamis memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan wilayah ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut untuk dikelola secara terpadu dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam adalah usaha manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat maksimal, dengan mengupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian sumberdaya tersebut (Afiati, 1999). Pengelolaan Sumberdaya alam pesisir pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono, 2002).

Sumber daya alam pesisir dan laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur disadari bahwa sumber daya ini merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Konsekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (*common property*) dan terbuka untuk umum (*open acces*) maka pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dewasa ini semakin meningkat di hampir semua wilayah. Seiring dengan meningkatnya usaha penangkapan dalam memenuhi kebutuhan pangan baik bagi masyarakat di sekitarnya maupun terhadap permintaan pasar antar pulau dalam negeri dan luar negeri. Ghofar (2004), mengatakan bahwa perkembangan eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dewasa ini (penangkapan, budidaya, dan ekstraksi bahan-bahan untuk keperluan medis) telah menjadi suatu bidang kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh pasar (*market driven*) terutama jenis-jenis yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar.

Sebagai akibatnya pemanfaatannya cenderung melebihi daya dukung sumberdaya (*over exploitation*) dan bersifat destruktif. Kondisi ini semakin diperparah oleh peningkatan jumlah armada penangkapan, penggunaan alat dan teknik serta teknologi penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Disamping itu berbagai aktivitas manusia baik di wilayah pesisir dan laut serta kegiatan di daratan (*upland*) yang juga dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Kondisi ini menimbulkan tekanan lingkungan bahkan cenderung merusak sumberdaya alam pesisir dan laut yang cenderung meningkat intensitasnya dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya menimbulkan menurunnya daya dukung sumberdaya dan dalam jangka panjang akan mengakibatkan suatu tragedi bersama (*open tragedy*).

Kekurangan pengintegrasian atas rendahnya pendidikan kesadaran dan kesadaran atas kekayaan nilai lokal pada masyarakat pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyebabkan kegagalan dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam pesisir. Di banyak tempat/daerah di Indonesia terdapat tingginya kesadaran dan kebiasaan adat istiadat yang selalu serta terus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal/tradisional dan ternyata cocok dan efektif dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sumberdaya alam pesisir.

### **Pengelolaan Berbasis Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*empowerment*" yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*selfreliant communities*), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moebiyarto, 1996) dalam Wahyono, 2001.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*communitybased management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*). Dalam kaitan ini, Moebiyarto (1999), mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumberdaya lokal yang berbasis masyarakat, yang meliputi:

a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan, b. Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset-asset yang ada dalam masyarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhannya, c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis, d. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi, e. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, bank lokal dan sebagainya yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya setempat.

Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut *Community-Based Management*, menurut Nikijuluw (1994) dalam Latama (2002), merupakan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolannya. Selain itu mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (*religion*). Carter (1996) dalam Latama (2002) memberikan definisi pengelolaan berbasis masyarakat sebagai : "*A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area*



*lies with the people in the communities of that area*” atau sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat pesisir terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman dan pendidikan mengenai proses adaptasi masyarakat pesisir terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community-based resource management*). Pentingnya memperhatikan aspek strategi adaptasi masyarakat pesisir dalam pendidikan kesadaran ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan tersebut adalah karena strategi adaptasi yang dikembangkan memungkinkan masyarakat pesisir mengatur daya tahan (*resilience*) terhadap persoalan-persoalan spesifik yang berhubungan pesisir dan nelayan seperti fluktuasi, ketidakpastian hasil tangkapan, musim, dan menurunnya sumber daya perikanan.

### **Kearifan Lokal**

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Konsep kearifan lokal menurut Mitchell, *et al.* (2000) berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama (Babcock, 1999 sebagaimana dikutip oleh Arafah, 2002). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sirtha (2003) sebagaimana dikutip oleh Sartini (2004) dalam Aulia & Darmawan (2010), menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah:

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Pengertian kearifan lokal (tradisional) menurut Keraf (2002) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa kearifan lokal/tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Pengertian di atas memberikan cara pandang bahwa manusia sebagai makhluk integral dan merupakan satu kesatuan dari alam semesta serta perilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta serta mengubah cara pandang antroposentrisme ke cara pandang biosentrisme dan ekosentrisme. Nilai-nilai kerarifan lokal yang terkandung dalam suatu sistem sosial masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap alam maupun terhadap alam. Menurut Nababan (2003),

mengatakan bahwa masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Pengertian masyarakat adat disini adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya. Pandangan ini sejalan dengan dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun (1999) mengatakan bahwa *masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun atas satu wilayah adat, yang diatur oleh hukum adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.*

Masyarakat pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi dan kekayaan kearifan lokal yang cukup banyak. Kearifan tersebut dianut sebagai suatu bentuk peradaban dan sistem nilai serta pranata berkaitan dengan usaha pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam laut dan pesisir. Kekayaan kearifan lokal/tradisi tersebut menuntun mereka untuk selalu hidup selaras, harmonis dengan alam lingkungannya. Kuatnya nilai-nilai kearifan lokal, hukum adat dan tradisi budaya di masyarakat pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah modal besar atas kesadaran dan pengetahuan dalam pengendalian pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, dan menjaga pelestarian ekosistem laut dari aktivitas yang bersifat destruktif dan merusak. Beberapa sistem tradisional masih cukup banyak yang bertahan dan terus dipraktekkan oleh sekelompok anggota masyarakat walaupun terdapat tekanan dari konfigurasi sistem pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan modern. Di sisi lain, terdapat pengakuan bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia terutama yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dapat merupakan modal nasional yang memiliki nilai strategis dan penting dalam menunjang pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Oleh karena itu dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti UU No. 09 Tahun 1985 yang ditelaah disahkan oleh DPR RI tanggal 14 September 2004 dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi : *Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran-serta masyarakat*

Tabel 1. Beberapa Nama Kearifan Lokal, Makna dan Manfaatnya

o	Nama Kearifan Lokal	Manfaat
	<i>Kolo umen bale lamaq</i> <i>Poan kemer puru larang</i>	Keselamatan, hasil penangkapan dan konservasi Larangan, konservasi
	<i>Toto</i> <i>- Bito Berue</i> <i>- Lepa Nua Dewe,</i> <i>- Bruhu Brito</i> <i>- Tula Lou Wate</i> <i>Leffa Nuang</i>	Hasil penangkapan dan keselamatan Penangkapan dan konservasi Penangkapan dan konservasi Penangkapan dan konservasi Perburuan ikan paus (penangkapan), keselamatan
	<i>Badu</i> <i>Muro</i> <i>Badu</i>	Penangkapan Larangan, konservasi Larangan, Konservasi Penangkapan, Larangan, konservasi

Sumber : Olahan Peneliti, 2005

Masyarakat pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat ini memandang bahwa nilai kearifan lokal terutama dalam kaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir merupakan bagian integral dan melekat dengan aktivitas kehidupan mereka. Sistem nilai ini merupakan pranata yang dapat menuntun dan mengatur hubungan mereka dengan alam lingkungannya. Mereka memiliki pemahaman dan kepercayaan bahwa alam memiliki suatu kekuatan dan alamlah yang dapat memberi mereka rezeki serta keberuntungan. Dilain pihak mereka juga percaya bahwa pada kondisi tertentu, ketika penghuni alam ini, maksudnya manusia serakah dan bertindak dalam memanfaatkan sumberdaya alam laut dan pesisir tidak sesuai dengan sistem nilai, hukum adat dan tradisi budaya yang dianut, maka alam akan bertindak sebaliknya yakni memberi sanksi dan hukuman kepada manusia. Ketika sanksi dan hukuman dari alam diterima oleh masyarakat pesisir, tidak akan ada nilai ekonomi yang akan diperoleh dari sumber daya laut dan pesisir. Pendidikan dan pengetahuan atas kesadaran nilai ekonomi dari sumber daya alam dan pesisir tidak berjalan.

### **Kearifan Lokal dan Sistem Pengetahuan Masyarakat Pesisir**

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan sumberdaya yang mereka hadapi atau miliki. Masyarakat agraris menghadapi sumberdaya yang terkontrol yakni lahan untuk memproduksi suatu jenis komoditas dengan hasil yang dapat diprediksi. Dengan sifat yang demikian memungkinkan tetapnya lokasi produksi sehingga menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan faktor resiko pun relatif kecil.

Dilihat dari perspektif antropologis, masyarakat pesisir nelayan berbeda dari masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan atau masyarakat di dataran tinggi. Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi kerangka berpikir atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Satria, A, (2004), mengatakan bahwa secara teologis, memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan semakin terjamin.

Kearifan lokal, tradisi dan hukum adat serta lembaga adat yang terdapat di masyarakat pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peluang untuk dihidupkan dan diajaga dan dipertahankan sebagai pengetahuan masyarakat pesisir sehingga dapat mengatur kehidupan dan menjadi pranata, norma dan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Adanya sistem nilai ini memberi pendidikan kesadaran kepada masyarakat pesisir tentang bagaimana cara sebaiknya sebelum memanfaatkan alam lingkungan di sekitarnya, apalagi yang terkait dengan kesadaran nilai ekonomi yang diperoleh.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, peranan lembaga adat di masyarakat pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta kearifan lokal, tradisi dan hukum adat memiliki peluang yang sangat strategis untuk dimanfaatkan dalam upaya pembinaan atau pendidikan kesadaran ekonomi terhadap masyarakat pesisir dan nelayan. Aspek ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk atau jembatan yang menghubungkan antara program dan kegiatan pemerintah dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Pembangunan nasional pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Meningkatkan pendidikan kesadaran ekonomi dan kesejahteraan rakyat juga mengandung pengertian upaya penanggulangan kemiskinan dan dengan mengikutsertakan setiap anggota masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi; secara berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang belum memperoleh kesempatan dalam pembangunan.

Kearifan lokal yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai hubungan yang erat dengan usaha dan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Tradisi dan kearifan tersebut memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Pengelolaan berbasis masyarakat yang merupakan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolannya, dipadukan dengan kearifan lokal masyarakat pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan akan meningkatkan pendidikan kesadaran terutama nilai ekonomi dan perubahan dasar perilaku sosial yang berkaitan dengan perilaku konservasi sumber daya pesisir dan laut. Perubahan tersebut hanya dapat terlaksana apabila secara penuh didasarkan pada kesadaran, keiklasan dan kesungguhan semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam proses pemenuhan pendidikan dan pengetahuan masyarakat pesisir.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Afiati, N., 1999. *Aspek Hayati Teknik Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pesisir*, Bapedalda, Semarang
- Clark, J., *Coastal Ecosystems Ecological Considerations for Management of the Coastal Zone*, Department the Conservation Foundation 1717 Masschu setts Avenue, N. W. Washington, D.C.
- Ghofar, A., 2004, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, Cipayung-Bogor.
- Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Institute of Southeast Asian Studies. 2003.
- Keraf, S. A., 2002, *Etika Lingkungan*, Pn. Buku Kompas, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Ed. III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kotan, J., et.al., 2003, *Revitalisasi dan Refungsionalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Terumbu Karang dan Mangrove di Nusa Tenggara Timur*, Kerjasama Bappeda dengan Universitas Nusa Cendana.
- Mitchell, Bruce, B Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Mustafid. 2009. *Kampung Kuta; Dusun Adat Yang Tersisa Di Ciamis*. <http://artikelindonesia.com/kampung-kuta-dusun-adat-yang-tersisa-di-ciamis.html>. diakses 22 April 2014, pukul 18:09.
- Mubyarto, 1999. *Etos Kerja dan Kohesi Sosial Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timor Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: P3PK " UGM.
- Nababan, 2003, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat, Tantangan dan Peluang*, [http://dte.gn.org.../makalah\\_ttg\\_psd\\_berb-ma\\_di\\_pplh\\_ipb.htm](http://dte.gn.org.../makalah_ttg_psd_berb-ma_di_pplh_ipb.htm).
- Nikijuluw, V.P.H. 2000. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya*. Jakarta: P3R dan PT Pustaka Cidesindo.
- Satria, A., 2004, *Karakteristik Sistem Sosial Masyarakat Pesisir*, Kendari.
- Soekamto, S., 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta
- Supriharyono, 2000, *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*, Pn. Djambatan, Jakarta.
- Suyanto, B., 1996, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*; Kumpulan Hasil Penelitian, Aditya Media, Yogyakarta.
- Tohir M., 2002, *Penelitian Sosial Budaya dari Memahami ke Melakukan dan Memuliskan*, UNDP, Semarang.
- Undang-Undang Negara RI Nomor 32 tentang Perikanan dan Kelautan, Tahun 2004
- Wahyono, A., 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Media Pressindo, Yogyakarta.

**Seminar Nasional Indonesia TIMUR 2014 - SENANTI**

**Sekretariat:**

Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur (PUSKIT) Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Email : [puskit@mail.uajy.ac.id](mailto:puskit@mail.uajy.ac.id) Website : <http://puskit.uajy.ac.id>